

DISERTASI

**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
MANAJEMEN LABA DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PADA
BANK SULSEL DI BULAWESI SELATAN DAN BARAT**

The Effect of Good Corporate Governance on Earnings Management and Financial Performance in Bank Sulsel, South Sulawesi and West Sulawesi

NASRUDDIN NAWAWI

NIM : P0800308005



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2011

DISERTASI

**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
MANAJEMEN LABA DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PADA
BANK SULSEL DI SULAWESI SELATAN DAN BARAT**

*The Effect of Good Corporate Governance on Earnings Management and Financial
Performance in Bank Sulsel, South Sulawesi and West Sulawesi*

NASRUDDIN NAWAWI

NIM : P0500308005



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2011

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
MANAJEMEN LABA DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PADA
BANK SULSEL DI SULAWESI SELATAN DAN BARAT**

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Doktor

Program Doktor Ilmu Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

NASRUDDIN NAWAWI



Kepada

**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2011**

DISERTASI

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PADA BANK SULSEL DI SULAWESI SELATAN DAN BARAT

Disusun dan diajukan oleh :

NASRUDDIN NAWAWI

Nomor Pokok P0500308005

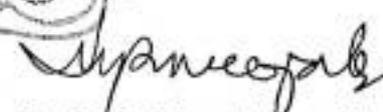
Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Disertasi
pada tanggal 07 September 2011
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Telah disetujui oleh

Tim Promotor,


Prof. Dr. H. A. Karim Saleh
Promotor


Prof. Dr. Cepi Pahlevi, SE., M.Si
Co-Promotor

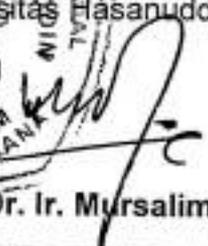

Dr. Muh. Idrus Taba, SE., M.Si
Co-Promotor

Ketua Program Studi
Ilmu Ekonomi


Prof. Dr. H. Djabir Hamzah, MA



Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Ir. Mursalim

KATA PENGANTAR

Setiap kata punya arti. Setiap langkah punya tujuan. Setiap perjuangan butuh pengorbanan. Dibalik setiap kesuksesan ada campur tangan Tuhan dan dukungan serta doa.

Menjelang akhir episode perjuangan tiada henti dan pengorbanan tanpa batas untuk memenuhi sunnah Rasulullah **"tuntutlah ilmu kapanpun dan dimanapun berada"** berupa penyelesaian tugas akhir Program Doktor Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar. Dari lubuk hati yang paling dalam dan dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan puji syukur kehadiran Allah SWT atas semua karunia tiada batas yang memungkinkan saya dapat menyelesaikan seluruh program Doktor ini sejak awal hingga penulisan tugas akhir dalam disertasi dengan judul **"Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Bank Sulsel di Sulawesi Selatan dan Barat"**.

Dalam perjalanan penyelesaian studi program Doktor ini, banyak kendala yang dihadapi, tetapi semuanya dapat diatasi dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada :

Prof. Dr. H. A. Karim Saleh, Guru besar Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin selaku Promotor. Kepiawaian, kecerdasan dalam ilmu ekonomi, wawasan berpikir, serta kearifan beliau sebagai ilmuan sehingga dalam proses pembimbingan hampir tidak ada kendala yang dihadapi. Keterbukaan beliau menjadikan tidak ada batas waktu dan ruang dalam proses bimbingan, semua berjalan dengan baik dan lancar serta tetap dalam proses dan koridor akademik yang terjaga, mendorong penulis untuk selesai secepatnya.

Prof. Dr. Cepi Pahlevi, SE., M.Si, Guru Besar Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, dan Dr. Muh. Idrus Taba, SE., M.Si masing-masing selaku Ko-Promotor. Kepiawaian, kecerdasan,

wawasan berpikir, dan kearifan beliau dalam meluangkan waktu untuk penulis melakukan proses konsultasi. Di sela-sela kesibukan beliau tetap menyempatkan waktunya untuk memberikan perhatian dan membimbing penulis dengan penuh bijak dan bersahaja, sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Prof. Dr. Chalik Imran Musa, SE., M.Si, Prof. Dr. Djabir Hamzah, M.A, Prof. Dr. Muhammad Ali, SE.,MS, Prof. Dr. Hj.Sitti Khaerani, SE.,MSi, Prof. Dr. Syamsu Alam, SE., M.Si dan Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si sebagai tim penguji, di samping menguji dengan sangat arif juga memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam setiap tahapan perbaikan proposal dan disertasi ini.

Istriku tercinta Drg.Hj.Andi Ernawati Sumange MARS, serta anak-anakku tersayang Muhammad Rifqi Erdiansyah,SE , Muhammad Fawzi Zulfikar, S.Ked dan Annisa Ramadhani yang dengan penuh kesabaran dan perhatian yang tulus serta senantiasa memberikan dorongan emosional dan inspirasional selama pendidikan hingga tulisan ini selesai.

Orang yang terdekat dengan kehidupan penulis, ayahanda H. Muh. Nawawi, BA , ibunda Hj. Sitti Zaenab, mertua saya Drs. A. Sumange Alam Atjo (almarhum) dan Hj.Andi Mardayang yang tidak henti-hentinya mendoakan anaknya semoga menjadi anak yang berguna. Sembah sujud anakda semoga dapat berbakti dengan baik.

Saudaraku terkasih kakak Dra.Hj.Nurwaty, adik-adikku Drg.Abdul Haris, MARS; Ir. Muh. Jumaeri; Ir. Faridah; Ir. Netty Herawati; Mukhlis,S.IPD,MSi dan Firdaus serta saudara ipar dan keponakan yang selalu mendoakan dan memberi dorongan selama mengikuti pendidikan.

Rekan-rekan se-angkatan Mahasiswa S3 Program Ilmu Ekonomi tahun 2008 pada Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah turut memberikan sumbangan pikiran hingga tulisan ini selesai.

Penghargaan dan terima kasih juga saya tujukan kepada Komisaris dan Direksi Bank Sulselbar beserta seluruh jajarannya, juga buat

Komisaris dan Direksi PT.Techindo Pratama beserta jajarannya atas segala bantuan dan pemahaman yang diberikan selama ini.

Semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu per satu dalam tulisan ini, penulis mohon maaf dan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan, doa, dan kerjasamanya. Semoga semua yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin Ya Rabbil Alamin.

Makassar, Agustus 2011

Penulis,

ABSTRAK

NASRUDDIN NAWAWI. *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Perusahaan pada Bank Sulsel di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat* (dibimbing oleh **A. Karim Saleh, Cepi Pahlevi, Muh. Idrus Taba**)

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) cabang Bank Sulsel yang memiliki indeks GCG terkecil yang melambangkan tingkat pencapaian yang baik, (2) pengaruh GCG terhadap manajemen laba dan kinerja keuangan perusahaan, dan (2) pengaruh manajemen laba terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian ini menggunakan metode survey dan explanatory. Populasi penelitian adalah kantor cabang dan kantor cabang utama Bank Sulsel yang memiliki laporan keuangan lima tahun yaitu tahun 2006 s.d. 2010. Sampel yang diambil sebanyak 135 unit yang tersebar di seluruh kantor cabang dan cabang utama Bank Sulsel yang terdiri atas 27 kantor cabang pada 27 kabupaten dan kota di Sulsel dan Sulbar yang diambil secara purposif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan model persamaan struktural atau structural equation modeling (SEM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian indeks GCG selama empat tahun secara rata-rata pelaksanaan GCG pada Bank BPD Sulsel berada pada kategori baik untuk 12 cabang dan kategori cukup baik untuk 15 cabang. Good corporate governance berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Good corporate governance terdiri atas internal corporate governance dan eksternal corporate governance berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan dan manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Kata kunci: indeks GCG, internal corporate governance, eksternal corporate governance, manajemen laba, kinerja keuangan perusahaan



ABSTRACT

NASRUDDIN NAWAWI. *The Influence of Good Corporate Governance on Profit Management and Financial Performance at Bank Sulsel in South Sulawesi and West Sulawesi* (supervised by H. A. Karim Saleh, Cepi Pahlevi, and Muh. Idrus Taba)

The aims of the research are to determine the branch of Bank Sulsel which has the smallest GCG index which can simultaneously represent a good level of management, to determine and analyze the influence of good corporate governance on profit management and financial performance, and to analyze the influence of profit management on financial performance.

The research used descriptive survey and explanatory methods. The population consisted of branch office and main branch office of Bank Sulsel having financial report within the last five years, i.e. from 2006 to 2010. The sample was selected by using purposive sampling method consisting of 135 units located in all branch offices and main branches of Bank Sulsel, i.e. 27 branch offices in 27 regencies and cities in South Sulawesi and West Sulawesi. The data were analyzed by using structural equation model (SEM).

The results of the research reveal that based on the assessment of GCG Index for four years, the average implementation of GCG at Bank Sulsel in South Sulawesi is in a good category in 12 branches and quite good category in 15 branches. Good corporate governance has a negative influence on profit management. Good corporate governance consisting of internal corporate governance and external corporate governance has a positive significant influence on financial performance, and profit management has a positive significant influence on financial performance.

Key words : GCG Index, internal corporate governance, external corporate governance, profit management, financial performance



DAFTAR ISI

	halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Kegunaan Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Sejarah Perbankan dan Sejarah <i>Good Corporate Governance</i> ..	20
1. Sejarah Perbankan	20
2. Sejarah <i>Corporate Governance</i>	23
B. Kajian Teoritik	30
1. Paradigma <i>Good Corporate Governance</i>	30
2. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	35
3. Manajemen laba	41
4. Kinerja Keuangan Perusahaan	46
C. Kajian Penelitian Sebelumnya	49
1. Hubungan Antara GCG dengan Manajemen Laba	49
2. Hubungan antara GCG dengan Kinerja	52
3. Hubungan antara Manajemen Laba dengan Kinerja Keuangan	57
4. Praktik GCG dalam industri Perbankan	61
5. Penerapan GCG di Indonesia	73
6. Prinsip-Prinsip dan Mekanisme Penerapan GCG	76
D. Indeks GCG	95
1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Pemimpin Cabang	96
2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Kepala Seksi ...	100
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	103
4. Penanganan Benturan Kepentingan	105
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	107
6. Penerapan Fungsi Audit Intern	110
7. Penerapan Fungsi Audit Ektern	112
8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	113
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposures</i>)	118

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan Pelaporan Internal	121
11. Rencana Strategis Bank	125
E. Beberapa Penelitian terkait Sebelumnya	128
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	144
A. Kerangka Teoritis Hubungan Antar Variabel	144
B. Konseptual Penelitian	147
C. Hipotesis Penelitian	150
BAB IV METODE PENELITIAN	151
A. Jenis dan Rancangan Penelitian	151
B. Populasi, Sampel, Besar Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	152
C. Jenis dan Sumber Data	152
D. Metode dan Alat Analisis	153
E. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran	159
1. <i>Indeks Good Corporate Governace</i>	159
2. <i>Internal Corporate Governance-Manajer</i>	159
3. <i>Internal Corporate Governance-Pemilik</i>	161
4. <i>External Corporate Governance</i>	162
5. Manajemen laba	164
6. Kinerja perusahaan	166
BAB V HASIL PENELITIAN	168
A. Gambaran Umum Bank Sulsel	168
1. Sejarah Singkat Bank Sulsel	168
2. Visi dan Misi	170
3. Pelaksanaan GCG Tahun 2010	172
B. Self Assesment GCG	216
C. Gambaran Umum Variabel	224
1. <i>Internal Corporate Governance Manajerial</i>	224
2. <i>Internal Corporate Governance Pemilik</i>	226
3. CAR	228
4. ATIM	230
5. <i>Primary Ratio</i>	232
6. LDR	234
7. <i>Quick Ratio</i>	236
8. Manajemen Laba	238
9. ROA	240
10. ROE	242
D. Hubungan Fungsional Internal Corporate Governance, Eksternal Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan	245
1. Pengaruh Internal GCG terhadap Manajemen Laba	246
2. Pengaruh Eksternal GCG terhadap Manajemen Laba	246
3. Pengaruh Internal GCG terhadap Kinerja Keuangan	247
4. Pengaruh Eksternal GCG terhadap Kinerja Keuangan	248

5. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Kinerja Keuangan	249
E. Pengaruh Internal Corporate Governance dan Eksternal Corporate Governance, Terhadap Manajemen Laba Kinerja Keuangan	252
1. Pengaruh langsung (Direct Effect)	252
2. Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect)	253
3. Total Pengaruh (<i>Total Effect</i>)	253
BAB VI PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	254
A. Analisis dan Implikasi <i>Self Assesment GCG</i>	254
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pimpinan cabang	254
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Seksi ...	255
3. Pelaksanaan dan Kelengkapan Tugas Komite	255
4. Penanganan Benturan Kepentingan	255
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	256
6. Penerapan Fungsi Audit Intern	256
7. Penerapan Fungsi Audit Ektern	257
8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	257
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>related party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposures</i>)	258
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan , laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan Pelaporan Internal	258
11. Rencana Strategis Bank	259
B. Analisis dan Implikasi Pengaruh Internal Corporate Governance dan Eksternal Corporate Governance, Terhadap Manajemen Laba Kinerja Keuangan	266
1. Pengaruh Internal Corporate Governance terhadap Manajemen Laba	266
2. Pengaruh Eksternal GCG terhadap Manajemen Laba	266
3. Pembahasan Pengaruh Internal GCG dan Eksternal GCG terhadap Manajemen Laba	267
4. Pengaruh Internal GCG terhadap Kinerja Keuangan	269
5. Pengaruh Eksternal GCG terhadap Kinerja Keuangan	270
6. Pembahasan Pengaruh Internal GCG dan Eksternal GCG terhadap Kinerja Keuangan	270
7. Pengaruh Manajemen laba Terhadap Kinerja Keuangan ...	273
C. Temuan Empiris Hasil Penelitian	274
D. Keterbatasan Penelitian	275
BAB VII SIMPULAN DAN SARAN	276
A. Simpulan	276
B. Saran	277
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

No		halaman
1.1	Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)	16
3.1	Hubungan antar Variabel dan Teori/Penelitian pendukung sebelumnya	145
5.1	Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2010	213
5.2.	Kasus Fraud yang Dilakukan Oleh Karyawan Tetap Bank Sulsel	215
5.3	Hasil Self Assesment Pelaksanaan GCG Bank BPD Sulsel Periode 2007-2010	218
5.4	Hasil perhitungan ICG-M Bank Sulsel periode 2006 - 2010 ...	224
5.5	Distribusi frekuensi rata-rata ICG-M Bank Sulsel	225
5.6	Hasil perhitungan ICG-P Bank Sulsel periode 2006 – 2010 ...	226
5.7	Distribusi frekuensi rata-rata ICG-P Bank Sulsel	227
5.8	Hasil perhitungan CAR Bank Sulsel periode 2006 – 2010	228
5.9	Distribusi frekuensi rata-rata CAR Bank Sulsel	229
5.10	Hasil perhitungan ATIM Bank Sulsel periode 2006 – 2010	230
5.11	Distribusi frekuensi rata-rata ATIM Bank Sulsel	231
5.12	Hasil perhitungan <i>Primary Ratio</i> Bank Sulsel periode 2006 – 2010	232
5.13	Distribusi frekuensi rata-rata <i>Primary Ratio</i> Bank Sulsel	233
5.14	Hasil perhitungan LDR Bank Sulsel periode 2006 – 2010	234
5.15	Distribusi frekuensi rata-rata LDR Bank Sulsel	235
5.16	Hasil perhitungan <i>Quick Ratio</i> Bank Sulsel periode 2006 – 2010	236
5.17	Distribusi frekuensi rata-rata <i>Quick Ratio</i> Bank Sulsel	237
5.18.	Hasil perhitungan Manajemen Laba Bank Sulsel periode 2006 – 2010	238
5.19.	Distribusi frekuensi rata-rata Manajemen Laba Bank Sulsel ...	239
5.20.	Hasil perhitungan <i>ROA</i> Bank Sulsel periode 2006 – 2010	240
5.21.	Distribusi frekuensi rata-rata <i>ROA</i> Bank Sulsel	241
5.22.	Hasil perhitungan <i>ROE</i> Bank Sulsel periode 2006 – 2010	242
5.23.	Distribusi frekuensi rata-rata <i>ROE</i> Bank Sulsel	243
5.24	Hasil Rekapitulasi Indikator Tiap Variabel	244
5.25	Hubungan Fungsional Antar Variabel	245

DAFTAR GAMBAR

No		halaman
3.1	Konseptual Penelitian	147
3.2	Skema Kerangka Konseptual Penelitian	148
5.1	Hasil Estimasi Dalam Bentuk Skema	251

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia perbankan Indonesia hingga saat ini masih dihadapkan pada kondisi sulit, walaupun harus diakui telah menunjukkan gejala perbaikan akibat krisis yang berkepanjangan. Masalah pertama ialah sektor perbankan sendiri masih mengalami proses restrukturisasi, sementara banyak pihak yang menuntut agar sektor perbankan mendukung pemulihan ekonomi dan menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Di sisi lain, sektor riil pun belum sepenuhnya pulih akibat lambatnya restrukturisasi sektor riil hingga banyak perusahaan yang dapat dikategorikan belum *bankable*.

Dalam konteks pertumbuhan perbankan yang sehat, pemerintah telah mengeluarkan *blue print* perbankan nasional dalam bentuk Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang merupakan arah dan tatanan perbankan nasional ke depan. API merupakan *policy direction* dan *policy recommendations* untuk industri perbankan nasional dalam jangka panjang yaitu untuk jangka waktu sepuluh tahun ke depan. Keberadaan API memiliki tujuan menciptakan industri perbankan nasional yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.



Arah ke depan perbankan nasional tersebut telah tertuang di dalam Visi API, sehingga, setiap bank akan melihat kembali kemampuan dan sumber daya masing-masing apakah mereka mempunyai tujuan jangka panjang untuk menjadi bank internasional, bank nasional atau menjadi bank spesialis yang memiliki fokus kegiatan tertentu. Dengan kejelasan visi tersebut, bank-bank sudah harus mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga dalam jangka panjang mereka sudah memiliki tujuan yang jelas, apakah ingin menjadi bank internasional, bank nasional, bank dengan fokus tertentu.

Adapun visi API adalah untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya visi tersebut dijabarkan menjadi enam pilar API, yakni:

- a. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
- b. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada Standar Internasional.
- c. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.
- d. Menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.

- e. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.
- f. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Diantara keenam pilar tersebut tampak bahwa salah satu program API yang dicanangkan dalam kurun waktu dua sampai lima tahun ke depan adalah *Good Corporate Governance (GCG)*. *Good Corporate Governance* diyakini dapat memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Dengan menerapkan GCG pada aktivitas perbankan diharapkan kinerja operasional perbankan akan semakin kuat dengan kemampuan menghadapi risiko yang semakin baik, baik saat ini maupun dimasa-masa yang akan datang.

Seiring dengan tuntutan penerapan GCG pada sektor perbankan, maka pada tahun 2006 Bank Indonesia menggagas peraturan yang secara khusus mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan GCG di Bank Umum. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum yang kembali disempumakan melalui PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Peraturan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip

dasar yakni keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Dalam pelaksanaan GCG tersebut, diperlukan keberadaan Komisararis Independen dan Pihak Independen. Keberadaan pihak-pihak independen tersebut, diharapkan dapat menciptakan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *stakeholders* khususnya pemilik dana dan pemegang saham minoritas. Selain itu, PBI ini juga mewajibkan bank untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dan paling lambat 5 bulan setelah tahun buku berakhir. Bagi bank yang tidak memenuhi ketentuan dalam PBI ini akan dikenakan sanksi.

Good corporate governance pada industri perbankan di negara berkembang seperti halnya Indonesia pada pasca krisis keuangan menjadi semakin penting mengingat beberapa hal. Pertama, bank menduduki posisi dominan dalam sistem ekonomi, khususnya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi (King dan Levine, 1993a,b; Levine, 1997). Kedua, di negara yang ditandai oleh pasar modal yang belum berkembang, bank berperan utama bagi sumber pembiayaan perusahaan. Ketiga, bank merupakan lembaga pokok dalam mobilisasi simpanan nasional. Keempat, liberalisasi sistem perbankan baik melalui privatisasi maupun deregulasi ekonomi menyebabkan manajer bank

memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam menjalankan operasi bank (Arun dan Turner, 2003).

Sebagaimana dikemukakan oleh Caprio dan Levine (2002), terdapat dua hal yang saling terkait menyangkut lembaga intermediasi keuangan perbankan yang berpengaruh terhadap *corporate governance*. Pertama, bank merupakan sektor usaha yang tidak-transparan, sehingga memungkinkan terjadinya masalah keagenan. Kedua, bank merupakan sektor usaha yang memiliki tingkat regulasi tinggi yang dalam hal tertentu justru menghambat mekanisme *Good corporate governance*.

Masalah keagenan dalam sektor keuangan-perbankan pada hakekatnya dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama masalah keagenan akibat utang (*debt agency problem*) dan kedua masalah keagenan akibat pemisahan kepemilikan dan pengendalian (*separation of ownership and control*). Teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) menjelaskan konflik yang mungkin terjadi jika pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain yang lebih profesional. Konflik keagenan terjadi antara pemegang saham dengan manajer atau antara pemegang saham dengan kreditur (Ariyoto dkk, 2000). Namun dalam perkembangannya, konflik keagenan juga terjadi antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas, antara pemegang saham mayoritas dengan *stakeholder* lain, seperti pemasok dan karyawan (Zhuang dkk, 2000; dan Ariyoto dkk, 2000). Adanya konflik

keagenan yang semakin meluas dan kompleks tersebut memerlukan adanya *good corporate governance*.

Salah satu dampak adanya masalah keagenan adalah manajemen laba (*earning manajemen*), yaitu adanya ketidakselarasan kepentingan antar pemilik dan manajemen (Beneish dalam Wijayanti, 1999). Fisher dan Rosenzweigh (1995) mendefinisikan manajemen laba sebagai tindakan seorang manajer dengan menyajikan laporan yang menaikkan atau menurunkan laba periode berjalan dari unit usaha yang menjadi tanggung jawabnya, tanpa menimbulkan kenaikan atau penurunan profitabilitas ekonomi unit tersebut dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Healy dan Wahlen (1999), manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan (*judgment*) dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan, dengan tujuan untuk memanipulasi besaran (*magnitude*) laba kepada beberapa *stakeholders* tentang kinerja keuangan perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan.

Manajer melakukan manajemen laba dengan memilih metoda atau kebijakan akuntansi tertentu untuk menaikkan laba atau menurunkan laba. Manajer dapat menaikkan laba dengan menggeser laba periode akan datang ke periode kini dan begitupula sebaliknya. Manajer dapat memanipulasi laba dengan berbagai cara, baik yang secara langsung berpengaruh terhadap keputusan operasi, pendanaan dan investasi dan

dalam bentuk pemilihan prosedur akuntansi yang diperbolehkan dalam prinsip akuntansi.

Terdapat dua motivasi manajer melakukan manajemen laba yaitu motivasi oportunistik dan motivasi *signalling* (Chen dan Cheng, 2002). Kedua motivasi tersebut dapat dijelaskan oleh teori keagenan dan teori *signalling*. Teori keagenan menjelaskan bahwa kontrak yang dibuat dalam hubungan keagenan biasanya didasarkan pada kinerja perusahaan. Kinerja buruk perusahaan dapat mengakibatkan suatu bentuk pelanggaran kontrak dan manajer sebagai agen akan berada dalam kondisi tidak menguntungkan karena menghadapi kemungkinan dianggap melanggar kontrak.

Tindakan *earnings management* telah menimbulkan beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi dalam dunia bisnis, antara lain Enron, Merck, World Com dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat (Cornett, Marcuss, Saunders dan Tehranian, 2006). Selain itu, di Indonesia juga terjadi hal serupa, seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk juga melibatkan pelaporan keuangan (*financial reporting*) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi (Gideon, 2005). Hal menarik lainnya ditemukan oleh Bank Indonesia. Evaluasi Bank Indonesia terhadap 101 bank pada periode September 2007, menemukan bahwa 69,3% bank yang beroperasi di Indonesia belum mematuhi ketentuan GCG (Muchammad Ghufro, 2008). Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa belum ada perubahan yang berarti atas pelaksanaan GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk dibidang perbankan.

Menurut Bagnoli dan Watts (2000), praktik manajemen laba banyak dilakukan oleh manajemen karena mereka menganggap bahwa perusahaan lain juga melakukan hal yang sama. Dengan demikian, kinerja kompetitor juga dapat menjadi pemicu untuk melakukan praktik manajemen laba karena investor dan kreditor akan melakukan komparasi untuk menentukan perusahaan mana yang mempunyai rating yang baik (*favorable*). Menurut teori keagenan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance = GCG*).

Corporate governance (CG) merupakan suatu mekanisme yang digunakan pemegang saham dan kreditor perusahaan untuk mengendalikan tindakan manajer (Dallas dalam Dwicaksono, 1996). Mekanisme tersebut dapat berupa mekanisme internal dan eksternal yaitu : komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, keberadaan komite audit, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, spesialisasi industri Kantor Akuntan Publik (KAP), dan lain lain.

Konsep *corporate governance* (tata kelola perusahaan) diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. *Corporate governance* diciptakan untuk menanggulangi penerapan *earning management*. Bila konsep

tersebut diterapkan dengan baik, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik (Nasution, 2007). Sistem *corporate governance* memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh return atas investasinya dengan benar. *Corporate governance* juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan *sustainable* di sektor korporat.

Corporate governance dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan *stakeholder* internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya (FCGI, 2001). *Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Nasution, 2007).

Penelitian Theresia (2005) menunjukkan bahwa tindakan manajemen laba merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Manajemen akan memilih metode akuntansi tertentu untuk mendapatkan laba yang sesuai dengan motivasinya. Sedangkan Boediono Gideon (2005) menyatakan bahwa manajemen laba akan



sangat mempengaruhi tingkat kualitas kinerja yang dilaporkan oleh manajemen (Gideon, 2005).

Mekanisme corporate governance di sektor perbankan terkait dengan dua hal. Pertama, *external corporate governance* yang menyangkut jaring pengaman keuangan (*financial safety nets*), dan regulasi kehati-hatian. Kedua, *internal corporate governance* yang menyangkut efektivitas dan akuntabilitas dewan direksi, pengungkapan (*disclosure*), dan transparansi (*transparency*) yang bertitik tolak pada menciptakan peningkatan kinerja bank dan meminimalisasi tindakan penyimpangan moral.

Mengembangkan model *corporate governance* dalam industri perbankan memerlukan pemahaman tentang bagaimana regulasi berpengaruh terhadap pendelegasian wewenang pengambilan keputusan oleh prinsipal (Jensen dan Smith, 1984) dan efek pendelegasian wewenang tersebut terhadap perilaku agen (Freixas dan Rochet, 1997).

Corporate governance dalam industri perbankan berkaitan erat dengan eksistensi regulasi yang mencerminkan beberapa hal diantaranya (i) regulasi menunjukkan adanya faktor kekuatan eksternal yang independen dari kekuatan pasar dan berpengaruh terhadap pemilik dan manajer (ii) mengingat pasar dimana bank beroperasi tidak lepas dari pengaruh regulasi, maka pasar menjadi regulatif dan ikut berperan sebagai unsur kekuatan tata kelola (*governance*) eksternal bagi perusahaan. (iii) eksistensi regulator dan regulasi sebagai representasi

kepentingan publik akan mendisiplinkan pemilik dan manajer bank dalam bentuk yang berbeda dengan industri *non-regulatif*, dan (iv) dalam kaitannya dengan upaya mencegah risiko sistemik, regulasi perbankan menunjukkan adanya pihak eksternal yang ikut berbagi risiko (*risk sharing*) sebagaimana ditunjukkan oleh adanya kebijakan *lender of last resort* dan penjaminan simpanan (Ciancanelli, 2000).

Sebagai salah satu mekanisme *external corporate governance*, regulasi kehati-hatian (*prudential regulation*) dan supervisi dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya risiko sistemik (*systemic risk*) dan memberikan perlindungan kepada penyimpan skala kecil (*small depositors*). Mengingat para penyimpan tidak mempunyai insentif untuk mengawasi bank secara optimal, regulator bertindak mewakili kepentingan penyimpan dalam bentuk menerapkan regulasi. Bentuk kebijakan regulasi diantaranya melalui penggunaan instrumen kewajiban pemenuhan kecukupan modal minimum (*capital adequacy ratio*), cadangan wajib bank (*reserve requirement*) dan kebijakan pengungkapan (*disclosure*) (Bhattacharya, Boot, Thakor, 1998; Dewatripont dan Tirole, 1994).

Mekanisme pengendalian yang dapat diharapkan mendukung mekanisme eksternal adalah melalui *internal corporate governance*. *The Basel Committee on Banking Supervision* (1999) menekankan bahwa dewan direksi dan manajemen bank bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan *good corporate governance*. Dalam usaha menunjang

efektivitas kerja dewan direksi, beberapa aspek perlu dipertimbangkan diantaranya: struktur dan independensi dewan direksi, fungsi dan aktivitas dewan direksi, kompensasi dan insentif lainnya (Nam, 2004). Insentif seperti halnya kinerja atas dasar rencana pemberian insentif (*performance-based incentive plan*) diyakini dapat menjadi alat pengendali manajemen dalam upaya menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemilik (Brigham dan Gapenski, 1999). Hal yang sama ditegaskan oleh Megginson (1997), bahwa paket kompensasi merupakan satu-satunya alat untuk menyelaraskan kebijakan investasi antara manajer dengan pemegang saham.

Dewasa ini penelitian mengenai pelaksanaan *corporate governance* berkembang dengan adanya tinjauan interaksi antara aspek legal dengan keuangan (*law and finance*). Penelitian La-Porta, Lopez-de-Salines, Shliefer dan Vishny (LLSV, 1997) menunjukkan adanya hubungan antara perlindungan hukum kepada investor dengan bentuk kepemilikan suatu perusahaan. Kurangnya perangkat hukum dalam perlindungan kepentingan pemegang saham dalam suatu negara akan mendorong kepemilikan perusahaan lebih kearah bentuk kepemilikan terkonsentrasi. (Shleifer dan Vishny, 1997). Terkait dengan kinerja usaha, penelitian mengenai hal tersebut masih menunjukkan hasil yang tidak konklusif. Penelitian Demsetz dan Lehn (1985) tidak menemukan bukti adanya hubungan sistematis antara kepemilikan terkonsentrasi dengan laba akuntansi. Sedangkan Demsetz dan Villalonga (2001) menegaskan

bahwa kepemilikan terkonsentrasi ataupun tersebar tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja. Dalam hubungannya dengan penelitian masalah keagenan dalam industri perbankan di Indonesia saat ini, isu pokok banyak berkaitan dengan konsentrasi kepemilikan: kepemilikan mayoritas versus minoritas, kepemilikan asing versus domestik, dan kepemilikan swasta versus pemerintah.

Masing-masing bentuk kepemilikan memiliki tingkat masalah keagenan yang berbeda. Bank milik asing dalam konteks ini adalah bank asing yang memiliki reputasi dan kepercayaan internasional yang diyakini pasar menerapkan *good corporate governance*. Dengan kata lain, eksistensi dan pertumbuhan bank ditingkat internasional terwujud karena mereka menerapkan pengelolaan bank yang baik. Oleh karena itu, upaya-upaya manajemen akan mengarah pada peningkatan kinerja bank.

Dalam Perda Nomor 2 tahun 1993 misi PT. Bank Sulsel sebagai salah satu perangkat otonomi daerah bertugas mengembangkan potensi daerah dengan jalan menggali dan menghimpun sumber dana untuk membantu dan membiayai usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II, usaha swasta yang menunjang pertumbuhan ekonomi dalam rangka mempertinggi taraf hidup rakyat, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

PT. Bank Sulsel sebagai perusahaan milik Pemerintah Daerah mempunyai aktivitas dan salah satu tujuannya adalah untuk menggerakkan dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta berfungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan ke masyarakat. Selain sebagai bank umum, juga merupakan penyimpan dana - dana Pemerintah Daerah yang dahulu disebut sebagai Pemegang Kas Daerah.

PT Bank Sulsel saat ini seluruh modalnya masih dihimpun dari pemda propinsi dan pemda tingkat dua se Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, tentunya sangat mempengaruhi tingkat kesehatan PT. Bank Sulsel, olehnya itu diperlukan suatu kebijakan tertentu untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan peraturan yang memberi peluang kepada Pemda untuk menarik dananya pada PT. Bank Sulsel. Jika hal ini terjadi maka tidak menutup kemungkinan kondisi keuangannya akan terganggu yang sudah barang tentu berpengaruh dan impeknya terhadap kesehatan PT. Bank Sulsel.

Bank milik pemerintah merupakan bentuk kepemilikan yang unik karena sesungguhnya tidak terdapat pemilik murni yang melakukan pengendalian terhadap manajemen perusahaan. Pemerintah baik dalam konteks eksekutif dan legislatif serta berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan bank milik pemerintah sesungguhnya merupakan agen dari rakyat (an agent without principal). Dengan demikian, bank milik pemerintah merupakan proksi kepemilikan yang secara ekstrim

berlawanan dengan kepemilikan terkonsentrasi, karena bentuk kepemilikannya sangat tersebar secara sempurna. Oleh karena itu derajat masalah keagenan pada area ini diduga paling kuat relatif terhadap bentuk kepemilikan lainnya.

Pada tahun 2005 lalu, Bank Sulsel secara resmi berubah status dari perusahaan daerah menjadi Perseroan terbatas (PT). Perubahan status juga ditandai dengan perubahan logo serta nama, dari sebelumnya Bank Pembangunan Daerah Sulsel menjadi Bank Sulsel. Kendati demikian core business yang digeluti sebelumnya tak berubah. Sejak berdirinya Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulsel sudah beberapa kali berganti status. Pergantian status itu diikuti pula oleh perubahan nama dan logo.

Dengan perubahan nama dan logo baru, terjadi banyak sekali perubahan. Selain pola pikir karyawan yang berubah juga terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam sisi usaha. Ekspansi dan perluasan jaringan menjadi prioritas utama Bank Sulsel di samping mengejar keuntungan. Total aset Bank Sulsel tumbuh dari tahun ke tahun. Pada 2004 aset Bank Sulsel sekitar Rp2,4 triliun lalu naik menjadi Rp2,9 triliun pada 2005. Tahun 2006, naik menjadi Rp4,1 triliun, dan tahun 2007 menjadi 4,04 triliun. Dari sisi dana juga melonjak. Pada 2004 DPK Bank Sulsel Rp1,9 triliun kemudian naik menjadi Rp2,27 triliun, lalu 2006 menjadi Rp3,32 triliun dan pada 2007 turun menjadi Rp. 3,044 triliun. Jumlah tabungan - yaitu Tabungan Simpeda yang merupakan

produk nasional Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia - yang berhasil dihimpun selama tahun 2006 sebesar Rp. 546.006 juta mengalami kenaikan sebesar Rp. 215.030 juta atau 64,97% dibandingkan tahun 2005 yang berjumlah Rp. 330,980 juta. Sementara pada tahun 2007 jumlah tabungan kembali naik menjadi Rp. 680.038 juta atau mengalami pertumbuhan sebesar 134.030 atau 24,5% dibandingkan tahun 2006.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (PDK)

(Rp. 000.000)

URAIAN	2010	2009	2008	2007	2006
Giro	554,658	549,794	900,172	1,924,874	2,493,693
Tabungan	847,551	129,250	111,501	680,038	546,006
Simpanan Berjangka	847,000	850,895	256,450	439,782	284,743
Jumlah	2,249,209	1,529,939	1,268,123	3,044,694	3,324,442
Pertumbuhan	2009-2010	2008-2009	2007-2008	2006-2007	2005-2006
Giro	0.88	(38.92)	(53.23)	(22.81)	--
Tabungan	555.75	15.92	(83.60)	24.55	--
Simpanan Berjangka	(0.46)	231.80	(41.69)	54.45	--
Total	47.01	20.65	(58.35)	(8.41)	--

Sumber : Annual Report Bank Sulsel : 2007 – 2011

Secara Umum Pertumbuhan dana pihak ketiga mulai mengalami peningkatan secara total di tahun 2008 – 2009 yaitu sebesar 20.65 % begitujuga dengan 2009 – 2010 mengalami peningkatan cukup drastis yaitu sampai 47.01 %. Hal ini disebabkan jumlah tabungan di tahun 2008 – 2010 mengalami peningkatan.

Sebagai bank daerah, Bank Sulsel sangat konsen pada pembiayaan terutama UKM dan program-program pemerintah daerah. Dari tahun ke tahun ekspansi kredit Bank Sulsel naik signifikan. Pada 2004 total kredit yang disalurkan mencapai Rp1,03 triliun lalu naik menjadi Rp1,49 triliun pada tahun 2005. Dan, tahun 2006 telah mencapai Rp2,03 triliun atau tumbuh sekitar 30 persen. Tahun ini Bank Sulsel memprediksi bisa mencapai Rp2,4 triliun lebih.

Perolehan laba Bank Sulsel juga mengalami kenaikan signifikan. Pada 2004 laba usaha (sebelum pajak/sebelum audit) baru mencapai Rp135,45 miliar kemudian naik menjadi Rp165,003 miliar pada 2005, dan tahun 2006 mencapai Rp211,692 miliar. Ditargetkan tahun 2007 ini Bank Sulsel bisa mencapai laba usaha Rp245-Rp250 miliar.

Peningkatan laba bukan berarti perusahaan tersebut telah memiliki kualitas laba dan kinerja keuangan baik, sehingga dibutuhkan sebuah analisis lebih mendalam terkait kinerja keuangan dan juga manajemen laba.

Bank Sulsel terdiri dari 27 cabang dimana masing-masing cabang mempunyai perilaku berbeda dalam memperoleh laba. Dari 27 cabang tersebut diperlukan analisis indeks untuk mengetahui rangking masing masing cabang. Secara khusus perolehan laba dapat dikaitkan dengan variabel – variabel tersebut, oleh karena itu dalam penelitian ini diajukan judul Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba

dan Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Bank Sulsel di Sulawesi Selatan dan Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka secara rinci rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Dari cabang Bank Sulsel manakah yang memiliki indeks GCG terkecil yang sekaligus dapat melambangkan tingkat pencapaian yang baik.
2. Apakah *good corporate governance* yang terdiri atas *internal corporate governance* dan *external corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen laba ?
3. Apakah *good corporate governance* yang terdiri atas *internal corporate governance* dan *external corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan ?
4. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui cabang Bank Sulsel yang memiliki indeks GCG terkecil yang sekaligus dapat melambangkan tingkat pencapaian yang baik.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *good corporate governance* yang terdiri atas *internal corporate governance* dan *external corporate governance* dan terhadap manajemen laba
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *good corporate governance* yang terdiri atas *internal corporate governance* dan *eksternal corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh manajemen laba terhadap kinerja keuangan perusahaan

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dan komisaris Bank Sulsel dalam pengambilan kebijakan terkait masalah *good corporate governance* hubungannya dengan kinerja keuangan bank
2. Sebagai upaya kajian teoritis bagi pengembangan teori dalam memperkaya khasanah dan literatur khususnya yang berkaitan dengan manajemen sumberdaya manusia, manajemen pemasaran dan manajemen keuangan.
3. Sebagai referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan obyek yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Perbankan dan Sejarah *Good Corporate Governance*

1. Sejarah Perbankan

Usaha perbankan dimulai dari zaman Babylonia, dilanjutkan ke zaman Yunani Kuno dan Romawi. Pada saat itu, kegiatan utama bank hanya sebagai tempat tukar menukar uang. Selanjutnya, kegiatan bank berkembang menjadi tempat penitipan dan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat, oleh bank dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkannya. Sementara itu, mengenai sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada saat itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda antara lain: *De Javasche NV*, *De Post Paar Bank*, *De Algemeenevolks Crediet Bank*, *Nederland Handles Maatscappij (NHM)*, *Nationale Handles Bank (NHB)*, dan *De Escompto Bank NV*. Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik pribumi, Cina, Jepang, dan Eropa lainnya. Bank-Bank tersebut antara lain: *Bank Nasional Indonesia*, *Bank Abuah Saudagar*, *NV Bank Boemi*, *The Matsui Bank*, *The Bank of China*, dan *Batavia Bank* (Kusuma, 2009).

Di jaman kemerdekaan perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh



pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan, antara lain:

- a. Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 kemudian menjadi BNI 1946.
- b. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari DE ALGEMENE VOLKREDIET bank atau Syomin Ginko.
- c. Bank Surakarta MAI (Maskapai Adil Makmur) tahun 1945 di Solo.
- d. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.
- e. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.
- f. Indonesia Banking Corporation tahun 1946 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta.
- g. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.
- h. Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin tahun 1949.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Berdasarkan pengertian di atas, bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Menurut Malayu S.P Hasibuan (1993,9) "kata Bank berasal dari bahasa Itali Banco artinya

meja yang dipergunakan untuk penitipan dan penukaran uang di pasar. Kemudian secara resmi dan populer menjadi Bank "Menurut Prof.G.M. Verryn Stuart " Bank politik" dalam buku karangan Malayu S.P Hasibuan (1993, 10) menyatakan bahwa " Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat - alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral". Menurut Kasmir (2000, 11) menyatakan bahwa "Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya".

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa : Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selau berkaitan masalah bidang keuangan.

Pada dasarnya bank berfungsi sebagai pengumpul dana pemberi kredit, dan menjadi peraturan didalam lalu lintas pembayaran. Usaha Bank bukan saja sebagai penyimpan, pemberi kredit, tetapi juga pencipta alat-alat pembayaran, stabilitas moneter dan dinamisator pertumbuhan perekonomian suatu negara. Bahkan bank mendorong terjadinya hubungan perekonomian perdagangan internasional antar negara di dunia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-

hatian. Demokrasi ekonomi itu sendiri dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan asas yang digunakan dalam perbankan, maka tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, fungsi bank di Indonesia adalah:

- a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat Bank bertugas mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam rekening koran atau giro. Fungsi tersebut merupakan fungsi utama bank.
- b. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan terutama untuk usaha-usaha produktif.

2. Sejarah *Corporate Governance*

Konsep *corporate governance* bisa ditelusuri secara konseptual mulai abad ke 18 Masehi yang dipelopori oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul "*The Wealth of Nations*". Beliau menyatakan bahwa perkembangan perekonomian suatu negara harus berdampak pada tercapainya kemakmuran seluruh masyarakat. Adam Smith (1776) yang menyatakan adanya persoalan menyangkut bentuk atau struktur perusahaan melalui pemisahan antara pemilik dan manajemen (Denis

dan McConnel, 2003). Selanjutnya dalam perkembangannya hingga awal abad 21, konsep *corporate governance* telah mengalami dua tahapan perkembangan pemikiran.

Generasi pertama pemikiran *corporate governance* dilakukan oleh Berle dan Means (1932) dengan menekankan konsekuensi yang timbul sebagai akibat pemisahan kepemilikan dan pengendalian atas suatu perusahaan modern. Sejalan dengan berkembangnya perusahaan maka pengelolaan perusahaan yang semula dilakukan oleh pemilik (*owner-manager*) menuntut untuk dikelola oleh kaum profesional. Hal ini dikarenakan adanya potensi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal sehingga diperlukan mekanisme guna menjamin bahwa manajemen akan mengelola perusahaan sesuai kepentingan pemilik. Perkembangan pemikiran mengenai konsep *corporate governance* semakin jelas dengan munculnya Teori Keagenan (*Agency Theory*) yang diformulasikan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang membawa akibat berbagai bidang ilmu sosial seperti sosiologi, manajemen strategik, manajemen, akuntansi, etika bisnis, mulai menggunakan teori keagenan guna memahami *corporate governance*. Pada era generasi pertama ini muncul derivasi teori keagenan hasil sintesis dari berbagai bidang keilmuan diatas.

Generasi kedua pemikiran *corporate governance* ditandai oleh konsep yang diperkenalkan La-Porta, Lopez-de-Salines, Shliefer dan Vishny (disingkat LLSV) pada tahun 1998 yang mengidentifikasi

terdapatnya kecenderungan konsentrasi kepemilikan perusahaan pada pihak-pihak tertentu. Menurut LLSV (1998) penerapan *corporate governance* di suatu negara sangat dipengaruhi oleh kondisi perangkat hukum di negara tersebut dalam upaya melindungi kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan, terutama pemilik minoritas. Berbeda dengan Berle dan Means (1932) yang menegaskan bahwa konflik kepentingan terjadi antara pemilik dengan pengelola perusahaan. LLSV (1998) menegaskan bahwa di berbagai negara di luar AS dan Inggris, kepemilikan perusahaan sangat terkonsentrasi. Hal ini berakibat konflik kepentingan terjadi antara "pemilik mayoritas" yang kuat dengan "pemilik minoritas" yang lemah. Lebih lanjut LLSV (1999, 2000) menyatakan bahwa sistem hukum yang belum memadai

Kemudian dilanjutkan oleh Berle dan Means (1932) yang menyatakan bahwa perkembangan perusahaan mendorong terpisahnya kepemilikan dan kontrol, sehingga diperlukan suatu mekanisme untuk menjamin agar manajemen dapat mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan pemilik. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang dikenal dengan Teori Keagenan, yang menjadi tonggak perkembangan riset *corporate governance*.

Teori Keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) menyatakan bahwa dalam perusahaan modern terdapat adanya pemisahan antara kepemilikan dan kontrol. Pemisahan ini menimbulkan masalah keagenan, karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen sebagai agen

dan pemilik perusahaan sebagai prinsipal. Dengan kata lain, teori keagenan menjelaskan munculnya konflik, esensi konflik, serta solusi atas konflik tersebut.

Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa secara ideal agen dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memaksimalkan kemakmuran pemilik. Namun kenyataannya, karena adanya informasi asimetri, di mana agen mempunyai informasi yang lebih banyak dibanding pemilik, maka agen akan menggunakan *power* yang mereka miliki untuk mengutamakan kepentingan mereka dibanding kepentingan pemilik (Jensen, 1992).

Namun dalam perjalanan waktu, masalah keagenan semakin kompleks, di mana masalah keagenan tidak hanya terjadi antara manajer dengan pemilik (pemegang saham), tetapi juga antara pemegang saham dengan kreditur, antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas, bahkan antara pemegang saham mayoritas dengan *stakeholder* lain, seperti pemasok dan karyawan (Shleifer dan Vishny, 1997; Zhuang dkk, 2000; Ariyoto dkk., 2000). Adanya konflik keagenan yang semakin kompleks ini diperlukan adanya *corporate governance* agar kepentingan berbagai pihak yang terlibat dengan perusahaan tidak dirugikan.

Definisi *Corporate Governance*

Definisi *corporate governance* sangat beragam. Pertama kali, istilah *corporate governance* diperkenalkan oleh *Cadbury Committee*

tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang menentukan praktik *corporate governance* di seluruh dunia. Cadbury Committee mendefinisikan *corporate governance* sebagai: " *A set of rules that define the relationship between shareholder, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities*" (Nyoman, dkk, 2003).

Mitton (2002) mendefinisikan *corporate governance* sebagai alat (*means*) agar pemegang saham minoritas terlindung dari ekspropriasi yang dilakukan oleh manajer atau pemegang saham mayoritas. Definisi ini sesuai dengan definisi LaPorta, dkk (1998) yang mendefinisi *corporate governance* sebagai seperangkat mekanisme agar investor luar (*outsiders*) terlindung dari tekanan *insiders*.

Menurut Sullivan (2000) *corporate governance* berhubungan dengan cara-cara di mana para penyedia dana yakin bahwa dana yang mereka investasikan akan kembali sesuai dengan yang mereka harapkan. Shleifer dan Vishny (1997) mendefinisi *corporate governance* sebagai bagian dari cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh imbal hasil yang sesuai dengan investasi yang ditanamkan. Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisi *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang

menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Dengan kata lain, *corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku pengelola perusahaan. Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*, *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya.

Sistem *corporate governance* terdiri dari (Zhuang dkk., 2000) :

- a. Seperangkat aturan yang mendiskripsikan hubungan antara pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan *stakeholders* lain.
- b. Seperangkat mekanisme yang membantu secara langsung atau tidak langsung untuk mendukung pelaksanaan aturan-aturan tersebut.

The Organization for Economic Corporation and Development (OECD), mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut :
" *Corporate governance is the system by which business corporations are directed and control. The corporate governance structure specifies the distribution of right and responsibilities among different participant in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholder, and spells out the rule and procedure for making decision on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the*



means of attaining those objectives and monitoring performance. (Siswanto dan John, 2005).

Australia Stock Exchange (ASE), mendefinisikan *corporate governance*:

" is the system by which companies are direct and managed. It influences how the objectives of the company set and achieved, how risk is monitored and assessed, and an how performance is optimized".

Dari berbagai jenis definisi tersebut di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa *corporate governance* berkaitan dengan :

- a. Seperangkat tata hubungan yang diatur dalam suatu struktur, proses dan prosedur bagi organ perseroan dan pemangku kepentingan lainnya;
- b. Tata hubungan ini harus sesuai dengan peraturan perundang-perundangan dari kebiasaan praktik bisnis yang sehat serta etis. Selain itu harus memastikan adanya keseimbangan wewenang dan pengendalian (*check and balances*) diantara organ perseroan; untuk menghindari penyalahgunaan wewenang ataupun penyimpangan tujuan perseroan;
- c. Tata hubungan ini diatur menurut prinsip-prinsip tertentu, di Indonesia dikenal dengan "TARIF" (*Transparency, accountability, responsibility, independency, fairness*);
- d. Melalui tata hubungan ini perseroan akan diarahkan dan dikendalikan dengan menetapkan sasaran perseroan serta cara-

cara untuk memantau pencapaian kinerja. Selain itu *Corporate Governance* juga harus memberikan insentif yang layak bagi pengurus dan manajemen perseroan dalam upayanya mencapai sasaran perseroan;

Keseluruhan proses ini diarahkan untuk pencapaian sasaran jangka panjang perseroan yaitu warga negara korporasi (*good corporate citizen*) yang sehat, kuat dan mampu bersaing guna meningkatkan nilai pemegang saham.

B. Kajian Teoritik

1. Paradigma *Good Corporate Governance*

Ada 2 (dua) paradigma *corporate governance*, yaitu paradigma *shareholding* dan paradigma *stakeholding* (Letza dan Sun, 2002). Paradigma *shareholding* menyatakan *corporate governance* mempunyai ciri "*individual liberty*" tujuannya hanya untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Paradigma *stakeholding* menyatakan *corporate governance* mempunyai ciri "*justice for all*" tujuannya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh *stakeholders* dalam perusahaan, selain pemegang saham juga karyawan, konsumen, pemerintah, dan masyarakat.

Kedua paradigma tersebut memberikan analisis dan teori yang mempunyai "*polarisasi*" satu dengan yang lain dalam memahami konsep *corporate governance*. Bahkan "*polarisasi*" tersebut juga muncul pada masing-masing paradigma, karena asumsi-

asumsi yang mereka gunakan berbeda. Analisis dan teori masing-masing perspektif dijelaskan berikut ini:

a. Shareholding Perspective

1) Inherent property rights theory

Teori ini didasarkan pada pandangan bahwa kepemilikan privat adalah dasar bagi kepentingan sosial dan bagi perkembangan efisiensi ekonomi. Asumsi teori ini "*right to incorporate*" yaitu hak untuk mempunyai dan membuat kontrak, serta perusahaan harus bertindak sebagai perluasan legal dari pemilik. Teori ini menilai perusahaan sebagai *property of shareholders*, sedangkan direktur dan manajer sebagai agen yang tidak mempunyai kewajiban legal kepada pemegang saham lain.

Sternberg (Letza dan Sun, 2002) tetap mempertahankan *shareholder property right* dan mengkritik *stakeholder theory* sebagai penggali *private property*. Stenberg kemudian mengajukan sistem *corporate governance* dengan mempertinggi *accountability* kepada pemegang saham. Hal ini dapat berupa monitoring secara efektif seperti *voting right*, direktur independen, *disklosur*, dan *market control*.

2) Agency theory

Masalah keagenan ini muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan kontrol dalam perusahaan. Dalam kondisi ini terjadi hubungan keagenan di mana prinsipal (pemegang saham)

mendelegasikan pekerjaan kepada agen (direktur atau manajer) untuk kemakmuran prinsipal. Asumsi teori ini adalah manajer sebagai agen tidak selalu bertindak untuk kepentingan pemegang saham, namun manajer justru lebih mengutamakan kepentingannya atas biaya pemegang saham. Ada 2 (dua) hal yang menimbulkan masalah keagenan, yaitu kesulitan monitoring pada perilaku prinsipal secara rutin dan adanya preferensi yang berbeda antara agen dengan prinsipal.

3) *Stewardship theory*

Teori *stewardship* mempunyai pandangan terhadap perilaku manusia yang berbeda dengan teori keagenan. Teori keagenan dibangun berdasarkan asumsi bahwa manajer sebagai agen tidak dapat dipercaya dan harus dimonitor selama menjalankan perusahaan. Jadi adanya pemisahan kepemilikan justru menimbulkan konflik keagenan antara prinsipal dan agen. Sementara itu, teori *stewardship* dibangun berdasarkan asumsi bahwa manajer sebagai pelayan yang selalu memuaskan kepentingan pemegang saham, dapat dipercaya, dan rajin bekerja untuk mendapatkan keuntungan perusahaan dan kemakmuran pemegang saham. Teori ini menjelaskan adanya pemisahan antara kepemilikan dan kontrol justru dapat meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab manajer dalam meningkatkan keuntungan perusahaan dan kemakmuran pemegang saham.

4) *The Finance model*

Model ini menjelaskan keefektifan *market governance* dalam menjamin agar manajer selalu memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Oleh karena itu pasar modal efisien sangat diperlukan. Asumsi teori ini adalah kemakmuran pemegang saham tercermin pada maksimisasi harga saham. Harga saham dijadikan sebagai indikator kinerja perusahaan dan pasarlah yang mengevaluasi kinerja manajemen. Jika ada masalah keagenan, maka pasar dan ancaman takeover merupakan cara yang efektif untuk mendisiplinkan manajemen.

5) *The myopic market model*

Model ini berargumentasi bahwa satu-satunya tujuan yang harus dicapai perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Model ini mengkritik *corporate governance* model Anglo-Amerika yang hanya terfokus pada tujuan jangka pendek dan mengorbankan tujuan jangka panjang, misalnya kinerja manajemen jangka pendek, harga saham jangka pendek, keuntungan jangka pendek, dan pengeluaran jangka pendek. Model tersebut juga berargumentasi bahwa pasar modal bukan merupakan indikator kinerja perusahaan yang baik, karena tidak mampu menangkap ketidakpastian dan harga asset sering salah taksir. Pasar bukan mekanisme yang efisien untuk mendisiplinkan manajer, karena harga sering berubah tanpa didasari oleh

perubahan faktor fundamental perusahaan. Dapat disimpulkan *myopic market model* lebih terfokus pada tujuan jangka panjang, termasuk meningkatkan loyalitas pemegang saham, menurunkan kemudahan pemegang saham untuk beralih ke perusahaan lain, dan membatasi pengambil alihan.

b. Stakeholding Perspective

1) *Social entity theory*

Teori ini menyatakan bahwa perusahaan bukan sebuah asosiasi privat yang dimiliki individu, tetapi asosiasi publik yang disahkan melalui proses legal dan politik untuk mencapai tujuan bersama, baik tujuan komersial maupun tujuan sosial. Teori ini juga berargumentasi bahwa perusahaan merupakan institusi sosial yang didasarkan pada nilai-nilai fundamental dan moral masyarakat. Konflik yang terjadi diselesaikan dengan menasionalisasikan perusahaan atau menggunakan hukum publik dan meningkatkan sistem *check and balances*.

2) *The pruralistic model*

Model ini berargumentasi bahwa perusahaan harus melayani dan mengakomodasi kepentingan seluruh *stakeholder* untuk mewujudkan perusahaan yang lebih efisien dan lebih terlegitimasi. *Corporate governance* dalam model ini menyatakan bahwa hak pemegang saham tidak hanya diklaim oleh pemegang saham saja, tetapi juga diklaim oleh *stakeholder* lain, seperti karyawan,

pelanggan, dan pemerintah. Seluruh *stakeholder* ikut mendanai perusahaan, menanggung risiko, dan memberi kontribusi dalam pengambilan keputusan untuk mempertinggi efisiensi perusahaan.

3) *The trusteeship model*

Model ini mengadopsi perspektif deskriptif dan realistik dalam melihat situasi *corporate governance* perusahaan publik. Model ini menolak ide bahwa manajemen adalah agen pemegang saham, tetapi manajer adalah *trustees of corporation*. *The trusteeed* model berbeda dengan model keagenan dalam beberapa hal, yaitu : a). Tugas komisaris selain mempertahankan asset-aset perusahaan dan kemakmuran pemegang saham juga meningkatkan nilai-nilai *stakeholder*, seperti skill karyawan, harapan pelanggan dan pemasok, dan reputasi perusahaan di masyarakat. Manajer sebagai komisaris harus dapat meningkatkan kepentingan perusahaan secara keseluruhan dan tidak semata-mata kepentingan pemegang saham saja. b). Manajer harus dapat menyeimbangkan kepentingan *stakeholder* saat ini dan yang akan datang. Manajer dapat mengembangkan kapasitas perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Awalnya perusahaan dikelola dan dimiliki oleh individu yang sama. Pada perusahaan ini semua keuntungan dinikmati sendiri dan apabila perusahaan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut



ditanggung sendiri. Fenomena ini dijelaskan oleh teori Neoklasik Tradisional.

Standar dari teori neo-klasikal mengasumsikan situasi dimana sebuah perusahaan memandang bahwa setiap individu dalam organisasi dapat diinstruksikan untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan *profit* dalam kondisi dimana *agency problem* tidak ada. Hal ini terjadi karena individu-individu dalam organisasi tersebut telah dipersiapkan untuk menjalankan instruksi tanpa dibebani oleh target akan hasil aktivitas organisasi yang harus dicapai. Selain itu berbagai jenis biaya dan usaha memperoleh penggantian secara langsung sehingga individu dalam organisasi tidak perlu dimotivasi lagi melalui pemberian insentif. *Governance structure* (kepemilikan aset) juga tidak dibutuhkan dalam hal ini karena masalah ketidaksepakatan (*disagreement*) dalam organisasi tidak ditemui.

Namun dalam perkembangannya, adanya persaingan yang semakin ketat dan tuntutan konsumen yang semakin beragam mendorong perusahaan untuk menyerahkan pengelolaan perusahaannya kepada pihak lain yang lebih profesional, sehingga terpisahlah antara kepemilikan dan kontrol dalam perusahaan. Adanya pemisahan antara kepemilikan dan kontrol ini muncul masalah keagenan yang dijelaskan oleh teori keagenan.

Dalam perusahaan tersebut terjadi hubungan keagenan antara prinsipal dan agen. Prinsipal sebagai pihak yang mempunyai dana

memberi kepercayaan kepada agen untuk mengelola dana yang mereka miliki agar mendapatkan hasil sesuai dengan yang mereka harapkan. Sebagai imbalannya agen akan memperoleh gaji, bonus, kompensasi, dan insentif lainnya. Namun dalam kenyataannya, agen tidak selalu memenuhi keinginan pemegang saham, namun cenderung memaksimalkan kepentingan mereka sendiri. Fenomena inilah yang bisa memicu munculnya masalah keagenan. Hal lain yang menjadi penyebab munculnya masalah keagenan adalah sikap yang berbeda antara agen dan prinsipal terhadap risiko (Eisenhardt, 1989). Misalnya pemegang saham lebih memilih investasi dengan risiko tinggi, sedangkan manajer lebih memilih investasi dengan risiko rendah untuk mempertahankan posisi mereka di perusahaan (Crutchley dan Hansen, 1989). Selain itu, konflik keagenan juga disebabkan adanya informasi asimetri antara *insiders* dan *outsider*. Artinya *insider* lebih mengetahui tentang kondisi dan prospek perusahaan di masa depan dibanding *outsider*.

Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi ini akan memicu munculnya kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Dengan adanya asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) akan memberi kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) sehingga akan menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Penelitian

Richardson (1998) menunjukkan adanya hubungan positif antara asimetri informasi dengan manajemen laba.

Dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory* (Chinn, 2000; Shaw, 2003). *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan *fidusia* yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder*. Sementara itu, *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.

Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Monks, 2003). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Konsep GCG baru populer di Asia. Konsep ini relatif berkembang sejak tahun 1990-an. Konsep GCG baru dikenal di Inggris pada tahun 1992. Negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok *OECD* (kelompok Negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara) mempraktikkan pada tahun 1999.

Terminologi *good corporate* mulai marak tahun 1992 ketika *Cadbury Committee* dan *Treadway Commission* menerbitkan laporannya. Hal ini diikuti dengan pembentukan berbagai *Code of GCG* dari berbagai negara. *OECD Organization for Economic Cooperation and Development*) menerbitkan "*OECD Principles of Corporate Governance*" pertama kali pada tahun 1999 dan revisi pedoman ini telah diterbitkan pada tahun 2004.

Ada banyak definisi mengenai *corporate governance*, definisi pertama dikeluarkan oleh *Cadbury Committee* (1992) yang

menyatakan bahwa "*corporate governance* adalah system untuk mengarahkan dan mengendalikan perseroan".

Kemudian *International Chamber of Commerce* (2003) memberikan definisi bahwa "*corporate governance* adalah suatu tata hubungan diantara manajemen perseroan, direksi, pemodal, masyarakat dan institusi lain yang ikut menginvestasikan uangnya pada perseroan serta mengharapkan imbalan atas investasinya tersebut. *Corporate governance* juga harus memastikan bahwa direksi bertanggungjawab dan akuntabel terhadap pencapaian sasaran perseroan serta memastikan bahwa perseroan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Investment Council Assosiation of Canada (2003) memberikan definisi yang agak lain yaitu *corporate governance* adalah seperangkat prinsip, aturan dan prosedur yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perseroan. Sasaran dari GCG adalah menjadikan perusahaan sebagai warga korporasi negara yang baik (*good corporate governance citizenship*) dengan menjadikannya sebagai perusahaan yang kuat, mampu bersaing dan mampu menerapkan kebiasaan bisnis yang sehat dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang.

Corporate governance dalam pengertian terbatas (*narrow views*) merupakan mekanisme guna memberikan keyakinan kepada pemegang saham bahwa manajer akan bertindak atas nama

kepentingan pemegang saham (Berle dan Means, 1932). Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas (*broader views*) sebagaimana praktik *Corporate governance* di dunia dewasa ini, *Corporate governance* merupakan prinsip penyelenggaraan korporasi dalam bentuk sistem dan sebuah metoda guna mendukung pemegang saham melakukan pengendalian terhadap manajer agar menjamin tidak akan terjadi ekspropriasi atas modal mereka sehingga akan diperoleh kembali *return* atas investasi yang mereka lakukan.

Informasi tentang penerapan prinsip-prinsip GCG masih terbatas baik pada negara-negara maju, apalagi pada negara-negara berkembang sehingga perlu penelitian khusus untuk menjembatani kelangkaan informasi. Hal ini disebabkan GCG perbankan dapat diperbandingkan dengan GCG korporasi non perbankan.

3. Manajemen laba

Scott (2000) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut :

"Given that managers can choose accounting policies from a set (for example, GAAP), it is natural to expect that they will choose policies so as to maximize their own utility and/or the market value of the firm".

Dari definisi tersebut manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dari standar akuntansi yang ada dan secara alamiah dapat memaksimalkan utilitas mereka dan atau nilai pasar perusahaan.

Schipper (1989) mendefinisikan manajemen laba sebagai *"the purposeful intervention in the Eksternal financial reporting process with intent obtain some private gain."* Jadi Schipper (1989) mendefinisikan manajemen laba sebagai intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Defenisi tersebut mengartikan bahwa manajemen laba merupakan perilaku oportunistik manajer untuk memaksimumkan utilitas mereka.

Manajer melakukan manajemen laba dengan memilih metoda atau kebijakan akuntansi tertentu untuk menaikkan laba atau menurunkan laba. Manajer dapat menaikkan laba dengan menggeser laba periode akan datang ke periode kini dan begitupula sebaliknya.

Manajer dapat memanipulasi laba dengan berbagai cara, baik yang secara langsung berpengaruh terhadap keputusan operasi, pendanaan dan investasi dan dalam bentuk pemilihan prosedur akuntansi yang diperbolehkan dalam prinsip akuntansi.

Menurut Watt & Zimmerman (1986) manajemen laba dilakukan berdasarkan tiga hipotesis, yakni (1) bonus plan hypotesis, (2) debt covenant hypotesis atau leverage hypothesis, dan (3) political cost hypothesis.

Tiga hipotesis PAT yang dapat dijadikan dasar pemahaman tindakan manajemen laba yang dirumuskan oleh Watts and Zimmerman (1986) adalah :

a. *The Bonus Plan Hypothesis*

Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menggeser laba dari masa depan ke masa kini sehingga dapat menaikkan laba saat ini. Hal ini dikarenakan manajer lebih menyukai pemberian upah yang lebih tinggi untuk masa kini. Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah yaitu *bogey* (tingkat laba terendah untuk mendapatkan bonus) dan *cap* (tingkat laba tertinggi). Jika laba berada di bawah *bogey*, tidak ada bonus yang diperoleh manajer sedangkan jika laba berada di atas *cap*, manajer tidak akan mendapat bonus tambahan. Jika laba bersih berada di bawah *bogey*, manajer cenderung memperkecil laba dengan harapan memperoleh bonus lebih besar pada periode berikutnya, demikian pula jika laba berada di atas *cap*. Jadi hanya jika laba bersih berada di antara *bogey* dan *cap*, manajer akan berusaha menaikkan laba bersih perusahaan.

b. *The Debt to Equity Hypothesis (Debt Covenant Hypothesis)*

Pada perusahaan yang mempunyai rasio *debt to equity* tinggi, manajer perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Perusahaan dengan rasio *debt to equity* yang tinggi akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditor bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian utang.

c. *The Political Cost Hypothesis (Size Hypothesis)*

Pada perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi, manajer akan lebih memilih metode akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode masa mendatang sehingga dapat memperkecil laba yang dilaporkan. Biaya politik muncul dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian media dan konsumen.

Terdapat dua motivasi manajer melakukan manajemen laba yaitu motivasi oportunistik dan motivasi *signalling* (Chen dan Cheng, 2002). Kedua motivasi tersebut dapat dijelaskan oleh teori keagenan dan teori *signalling*.

Teori keagenan menjelaskan bahwa kontrak yang dibuat dalam hubungan keagenan biasanya didasarkan pada kinerja perusahaan. Kinerja buruk perusahaan dapat mengakibatkan suatu bentuk pelanggaran kontrak dan manajer sebagai agen akan berada dalam kondisi tidak menguntungkan karena menghadapi kemungkinan dianggap melanggar kontrak.

Manajer mungkin mempunyai inisiatif mempengaruhi kebijakan akuntansi karena angka akuntansi sering dipakai dalam kontrak sebagai alat pengukuran kinerja manajemen. Kinerja buruk perusahaan dapat mendorong pemegang saham melakukan penggantian manajer, yang kemudian juga dapat menurunkan nilai pasar manajer yang bersangkutan di pasar tenaga kerja. Kinerja buruk

perusahaan mungkin mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba.

- a. Penjelasan teori keagenan dan teori akuntansi positif terhadap manajemen laba.

Teori keagenan sering digunakan dalam penelitian manajemen laba untuk menjelaskan dan memprediksi pilihan akuntansi oleh manajemen. Dalam teori keagenan suatu perusahaan dipandang sebagai *nexus of contacts*. Insentif pihak-pihak dalam pengontrakan dapat mempengaruhi pilihan akuntansi karena angka-angka akuntansi sering digunakan dalam kontrak atau sebagai mekanisme monitoring dalam hubungan keagenan. Manajemen laba merupakan suatu intervensi langsung dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tertentu (Peltier - Rivest, 2002). Teori akuntansi positif menggunakan teori keagenan untuk menjelaskan dan memprediksi pilihan kebijakan akuntansi oleh manajer (Peltier – Rivest, 1999, Peltier - Rivest dan Swirsky, 2000).

Watts dan Zimmerman (1986) menggunakan teori keagenan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manajemen sehubungan dengan pemilihan prosedur-prosedur akuntansi oleh manajer untuk mencapai tujuan tertentu.

- b. Penjelasan teori *signalling* terhadap manajemen laba

Teori *signalling* menjelaskan bahwa manajemen memberi sinyal untuk mengurangi asimetri informasi. Jika manajemen mempunyai lebih banyak mengenai kinerja dan prospek perusahaan daripada pemegang saham, mereka dapat memberi sinyal dengan mencatat *acrual diskresioner*. Apabila kinerja dan prospek perusahaan baik, manajemen dapat memberi sinyal dengan mencatat *acrual diskresioner positif* untuk menunjukkan bahwa laba periode kini serta akan datang lebih baik daripada yang diimplikasikan oleh laba *non diskresioner*.

Manajer perusahaan memberikan sinyal kabar baik maupun sinyal kabar buruk kepada pihak luar perusahaan. Jika kinerja perusahaan buruk, manajer melakukan manajemen laba untuk memberikan sinyal buruk dengan tujuan memberikan informasi kepada pasar bahwa manajer mempunyai integritas, bertindak jujur, dan mempunyai keyakinan dapat mengatasi masalah yang dihadapi. Selain untuk menunjukkan kualitas manajerial dengan memberi sinyal buruk sebagaimana adanya, manajer berharap memperoleh apresiasi pasar untuk menahan penurunan harga saham perusahaan.

4. Kinerja Keuangan Perusahaan

Dalam dunia perbankan memang sangat penting untuk mengetahui keadaan kinerja keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di segala aspek. Penilaian tingkat kinerja

keuangan juga berguna untuk memberikan informasi kepada *stakeholder* untuk menilai bagaimana kinerja bank tersebut dalam operasionalnya. Penilaian terhadap kinerja suatu bank merupakan penilaian terhadap suatu bank dalam kurun waktu tertentu.

Dalam kondisi seperti itu, tiap bank dituntut untuk meningkatkan pengelolaan banknya semaksimal dan seefisien mungkin. Salah satu sarana pengelolaan yang dapat digunakan adalah analisis laporan keuangan. Untuk mengadakan interpretasi dan analisis laporan keuangan, suatu bank memerlukan adanya ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan dalam menganalisis adalah rasio. Rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam aritmatika yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih data keuangan.

Dari rasio tersebutlah dapat diketahui kinerja bank yang dapat dianalisis, dan hasil analisis rasio itulah yang akan dijadikan sumber informasi dan pedoman prosedur kerja oleh pihak bank, serta menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pihak lain yang berkepentingan.

Kinerja perusahaan atau bank dapat diproksi dengan beberapa cara. Salah satu ukuran yang paling umum digunakan adalah *return on asset (ROA)*. Alasan penggunaan ROA sebagai indikator kinerja keuangan pada penelitian ini adalah karena rasio ROA dapat mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba berdasarkan sumberdaya total organisasi, sehingga penggunaan ROA sebagai pengukuran kinerja sangat tepat. Saat manajer mampu menghasilkan laba yang tinggi atas

sumber daya organisasi perusahaan yang ada sekaligus memberikan interpretasi terhadap kinerja manajemen yang sebenarnya yang dapat memberikan nilai terhadap perusahaan.

Proksi lain yang umumnya juga dipakai dalam mengukur kinerja bank dan yang mencerminkan kepentingan pemilik didasarkan pada kemampuan manajer untuk menghasilkan return dari investasi yang dilakukan oleh pemilik adalah ROE (Shleifer dan Vishny, 1997). Penelitian ini menggunakan proksi return on equity (ROE) untuk mencerminkan kepentingan pemilik yang sebenarnya yang tampak pada equity perusahaan.

Return On Asset (ROA) dan *Return On Equity (ROE)* keduanya digunakan untuk mengetahui kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan nilai total asetnya (untuk ROA) dan total modal sendirinya (untuk ROE). Semakin tinggi ROA, semakin baik produktivitas modal sendiri dalam meraih laba dan semakin besar ROE, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Kenaikan dalam ROE berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan dan kenaikan nilai ROE akan menyebabkan kenaikan harga saham.

C. Kajian Penelitian Sebelumnya

1. Hubungan Antara GCG dengan Manajemen Laba

Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak.

Sistem *corporate governance* memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh return atas investasinya dengan benar. *Corporate governance* juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan *sustainable* di sektor korporat. *Corporate governance* dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan *stakeholder* internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya (FCGI, 2003).

Penelitian mengenai efektifitas *corporate governance* dalam melindungi investor di Indonesia telah banyak dilakukan, antara lain:

Midiastuty dan Machfoedz (2003), Veronica dan Bachtiar (2004), Wedari (2004), dan Wilopo (2004), Boediono (2005), Veronica dan Utama (2005), Sugiarta (2004). Akan tetapi penelitian ini mencakup perusahaan yang listing di BEJ kecuali perusahaan perbankan. Oleh karena itu, perlu suatu penelitian tentang efektifitas corporate governance di industri perbankan karena karakteristik industri perbankan yang berbeda dengan industri lainnya.

Industri perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan industri lain, misalnya suatu bank harus memenuhi kriteria CAAR minimum. Bank Indonesia menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam penentuan status suatu bank (apakah bank tersebut merupakan bank yang sehat atau tidak). Oleh karena itu, manajer mempunyai insentif untuk melakukan manajemen laba supaya perusahaan mereka dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh BI (Setiawati dan Na'im, 2001, dan Rahmawati dan Baridwan, 2006). Setiawati dan Na'im (2001), Rahmawati (2006), dan Rahmawati dan Baridwan (2006) menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia melakukan manajemen laba untuk memenuhi kriteria BI tersebut. Setiawati dan Na'im (2001) berargumen bahwa laporan keuangan yang telah direkayasa oleh manajemen dapat mengakibatkan distorsi dalam alokasi dana. Selain itu, industri perbankan merupakan industri "kepercayaan". Jika investor berkurang kepercayaannya karena laporan keuangan yang bias karena tindakan manajemen laba, maka mereka akan melakukan



penarikan dana secara bersama-sama yang dapat mengakibatkan rush. Oleh karena itu, perlu suatu mekanisme untuk meminimalkan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan perbankan.

Beasley (1996) menyarankan bahwa masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitiannya juga melaporkan bahwa komposisi dewan komisaris lebih penting untuk mengurangi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan, daripada kehadiran komite audit. Analisis lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik komisaris yang berasal dari luar perusahaan (*outsider director*) juga berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.

Penelitian terkait dengan keberadaan dewan komisaris di Indonesia juga banyak dilakukan. Veronica dan Utama (2005) meneliti pengaruh praktik *corporate governance* terhadap manajemen laba. Praktik *corporate governance* yang diteliti yaitu proporsi dewan komisaris independen. Hasil dari penelitian ini adalah kesimpulan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Boediono (2005) meneliti apakah komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa secara parsial pengaruh *corporate governance* dalam hal ini komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Veronica dan Bachtiar (2004) menemukan bahwa variabel persentase dewan komisaris independen tidak berkorelasi secara signifikan terhadap akrual kelolaan, walau begitu interaksi antar variabel akrual kelolaan dan dewan komisaris independen menunjukkan koefisien positif yang signifikan terhadap return perusahaan. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan makin tingginya persentase dewan komisaris independen maka akrual kelolaan makin berpengaruh terhadap *return*.

2. Hubungan antara GCG dengan Kinerja

a. Hubungan *External corporate governance* dan Kinerja Keuangan Bank.

Regulasi merupakan mekanisme *external corporate governance* yang dalam industri perbankan dicerminkan oleh adanya fasilitas jaring pengaman keuangan termasuk dalam hal ini penjaminan simpanan (eksplisit maupun implisit), fungsi lender of last resort bank sentral dan beberapa prosedur menyangkut penanganan bank insolven. Dalam upaya menjaga jaring pengaman keuangan dari tindak penyimpangan moral, pemerintah menerapkan regulasi kehati-hatian dan supervisi (*prudential regulation and supervision*). Dalam hal ini, Dewatripont dan Tirole (1993) menegaskan bahwa regulasi kehati-hatian dan supervisi terutama dimaksudkan untuk menjaga solvabilitas (*solvency*) bank dan merupakan insentif bagi stakeholders dalam upaya melakukan pengendalian atau -secara lebih luas-menerapkan *corporate governance* di sektor perbankan.

Analisis *external corporate governance* pada industri perbankan melalui pendekatan aspek regulasi dan supervisi telah dilakukan oleh beberapa peneliti dan memperkuat pendapat bahwa regulasi dan supervisi berpengaruh positif terhadap daya tangkal suatu negara dalam menghadapi krisis keuangan. Penelitian Lindgren, Garcia dan Saal (1996) menunjukkan bahwa diantara 34 negara yang mengalami krisis keuangan hanya 5 negara yang memiliki sistem regulasi dan supervisi yang cukup kuat, sedangkan 29 negara lainnya lemah dalam pelaksanaan regulasi kehati-hatian dan supervisi. Penelitian Williamson dan Mahar (1998) dengan menggunakan konstruk tingkat indeks regulasi kehati-hatian menunjukkan bahwa indeks yang lebih tinggi (menunjukkan penerapan regulasi dan supervisi yang lebih baik) pada periode sebelum krisis terjadi terdapat pada negara-negara yang relatif tidak mengalami dampak berat akibat terjadinya krisis keuangan. Penelitian Demirguc-Kunt dan Detragiache (1998) mengenai analisis hubungan antara efektivitas lingkungan regulasi, liberalisasi dan krisis perbankan menunjukkan bahwa peningkatan lingkungan regulatif dapat mencegah terjadinya krisis perbankan yang ditimbulkan sebagai akibat liberalisasi pasar keuangan.

Oleh karena itu kapasitas kepatuhan terhadap regulasi menjadi bagian penting dalam manajemen bank, yakni sebagai indikator dari mekanisme *external corporate governance* dalam upaya meningkatkan

kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi kapasitas kepatuhan regulasi sebuah bank semakin baik upaya bank mengatasi ancaman kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan bank.

b. Hubungan Internal Corporate Governance (ICG) dan Kinerja Keuangan Bank.

Internal corporate governance mempunyai efek langsung guna mendorong manajer untuk meningkatkan kinerja (John dan Senbet, 2000). Dalam penelitian ini internal corporate governance dibedakan menjadi dua hal yakni internal corporate governance-manajer (ICG-manajer) internal corporate governance-pemilik (ICG-pemilik). Perbedaan ICG-manajer dan ICG-pemilik terletak pada fokus pengendaliannya. ICG-manajer menekankan pada pengendalian dalam diri manajer yang distimuli secara internal (melalui perhatian pemilik terhadap kepentingan manajer) agar manajer meningkatkan kinerja terutama dalam hal pendapatan bank (revenue). ICG-pemilik menekankan pada pengendalian diluar manajer (melalui pihak lain) agar manajer meningkatkan efisiensi. Dengan demikian, kombinasi dari dua bentuk ICG ini cenderung superior dalam menjelaskan kemampuan good corporate governance dalam mempengaruhi kinerja keuangan bank.

1) Internal corporate governance-Manajer. (ICG-Manajer).

Pemahaman terhadap kompensasi -sebagai bentuk kontrak manajemen- dalam kaitannya dengan kinerja pada industri perbankan merupakan upaya yang lebih seksama didalam melihat masalah keagenan yang lebih kompleks dibandingkan dengan industri lainnya (John, Saunders, dan Senbet, 2000). Insentif atas dasar kinerja diyakini dapat menjadi alat penyelaras antara kepentingan manajer dengan pemilik (Brigham dan Gapenski, 1994). Paket kompensasi merupakan satu-satunya alat untuk menyelaraskan kebijakan investasi antara manajer dengan pemegang saham (Megginson, 1996).

Kompensasi menjadi sarana penting bagi prinsipal untuk mengendalikan aktivitas agen (Jensen dan Meckling, 1976; Fama dan Jensen, 1983 a,b). Sejauh pemilik dapat mengidentifikasi dengan seksama setiap tindakan agen dan hasil kinerjanya, maka setiap potensi tindak penyimpangan yang akan dilakukan manajer dapat ditanggulangi melalui mekanisme pengawasan. Dalam hal ini insentif dalam bentuk kompensasi cenderung tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja. Sebaliknya, manakala prinsipal kurang dapat melakukan identifikasi dengan baik setiap tindakan manajer, maka kompensasi manajerial -sebagai insentif atas usahanya dalam meningkatkan kinerja- sensitif terhadap kinerja (Holstrom, 1979).

Penelitian tentang hubungan kompensasi dan kinerja diawali oleh Lewellen dan Huntsman (1970) yang menegaskan bahwa

kompensasi berhubungan dengan tingkat laba usaha atau besaran perusahaan. Studi Murphy (1985) menguji kepekaan kompensasi-kinerja (*pay performance sensitivity*) menyatakan adanya hubungan kuat dan signifikan antara kompensasi-kinerja. Demikian pula Coughlan dan Schmidt (1985) menyatakan adanya hubungan positif antara kompensasi dengan kinerja. Memperkuat penelitian sebelumnya, Houston dan James (1993) dan Saunders, Strock dan Travlos (SST) (1990), Evans, Noe, dan Thorton (1997), dan Knopf dan Teall (1996) menegaskan bahwa kompensasi manajerial berhubungan signifikan dengan kinerja keuangan bank.

2) Internal Corporate Governance-Pemilik.

Dewatripont dan Tirole (1994) menyatakan bahwa persoalan kesalahan manajemen dan potensi manajemen untuk melakukan penyimpangan (*mis-management and fraud opportunities*) senantiasa dimungkinkan terjadi. Dengan kata lain, manajer berpotensi melakukan pemanfaatan aktiva untuk kepentingannya. Pemanfaatan aktiva yang menyimpang dari tujuan pemilik ini menyebabkan inefisiensi operasi. Oleh karena itu bentuk pengendalian lain perlu dilakukan oleh pemilik, misalnya melalui:

- a) pemilihan dewan direksi yang bertindak untuk kepentingan pemilik,
- b) penugasan internal auditor atau bentuk-bentuk pengendalian lainnya.

Sejalan dengan hal itu, pendekatan ICG dalam konteks ini lebih menekankan pada upaya untuk melindungi kepentingan pemilik (*owner's interest*) yang dalam hal ini disebut sebagai ICG-pemilik. Sebagai proksi ICG-pemilik digunakan koefisien variasi *net interest margin* (NIM) yang mencerminkan kepentingan pemilik. NIM mencerminkan biaya intermediasi keuangan; yakni perbedaan antara biaya yang harus dibayar oleh para debitur kepada bank dan return yang diterima oleh para penyimpan (Brock dan Suarez, 2000). NIM juga mencerminkan risiko kredit, profitabilitas jangka panjang, biaya administrasi dan biaya pemupukan dana (*cost of loanable funds*) dan nilai valuasi jaminan (*collateral*). Kesemua ini merupakan cerminan efisiensi manajer dalam mengelola *asset-liabilities management* (ALM) yang selaras dengan kepentingan pemilik (Andreeva, 2004)

3. Hubungan antara Manajemen Laba dengan Kinerja Keuangan

Dalam pelaksanaan aktivitas manajemen laba, manajemen memiliki beberapa strategi dalam melaksanakan praktek ini. Dalam Wild, et al. (2008), dijelaskan tiga jenis strategi manajemen laba yaitu:

a. Meningkatkan laba (*increasing income*)

Cara ini dilakukan dengan meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang lebih baik. Peningkatan laba juga dimungkinkan selama beberapa periode. Pada skenario pertumbuhan, akrual pembalik lebih kecil dibandingkan akrual kini sehingga dapat meningkatkan laba. Kasus yang terjadi

adalah perusahaan dapat melaporkan laba yang lebih tinggi berdasarkan manajemen laba yang agresif sepanjang periode waktu yang panjang. Selain itu, perusahaan dapat melakukan manajemen untuk meningkatkan laba selama beberapa tahun dan kemudian membalik akrual sekaligus pada satu saat pembebanan. Pembebanan satu saat ini sering kali dilaporkan "di bawah laba bersih" (*below the line*) sehingga dipandang tidak terlalu relevan.

b. Mandi besar (*big bath*)

Strategi *big bath* dilakukan melalui penghapusan sebanyak mungkin pada satu periode. Periode yang dipilih biasanya periode dengan kinerja yang buruk (seringkali pada masa resesi dimana perusahaan lain juga melaporkan laba yang buruk) atau peristiwa saat terjadi satu kejadian yang tidak biasa seperti perubahan manajemen, merger, atau restrukturisasi. Strategi ini juga seringkali dilakukan setelah strategi peningkatan laba pada periode sebelumnya. Karena sifat *big bath* yang tidak biasa dan tidak berulang, pemakai cenderung tidak memperhatikan dampak keuangannya. Hal ini memberikan kesempatan untuk menghapus semua hal buruk di masa lalu dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan laba di masa depan.

c. Perataan laba (*Income smoothing*)

Perataan laba merupakan bentuk umum manajemen laba. Pada strategi ini, manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya. Perataan laba juga

mencakup tidak melaporkan bagian laba pada periode baik dengan menciptakan cadangan atau "bank" laba dan kemudian melaporkan laba ini saat periode buruk. Banyak perusahaan menggunakan bentuk manajemen laba ini.

Praktek manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen ini dapat memberikan informasi kinerja keuangan akan datang akan lebih baik dari kinerja keuangan saat ini. Sehingga saat manajer melakukan peningkatan laba akan memberikan informasi kinerja keuangan juga akan meningkat. Banyak alasan melakukan manajemen laba, termasuk meningkatkan kompensasi manajer yang terkait dengan laba yang dilaporkan, meningkatkan harga saham, dan usaha mendapatkan subsidi pemerintah. Dalam Wild, et al. (2008) dipaparkan sejumlah insentif utama untuk melakukan manajemen laba adalah sebagai berikut.

a. Insentif perjanjian.

Banyak perjanjian yang menggunakan angka akuntansi. Misalnya perjanjian kompensasi manajer biasanya mencakup bonus berdasarkan laba. Perjanjian bonus biasanya memiliki batas atas dan bawah, artinya manajer tidak mendapat bonus jika laba lebih rendah dari batas bawah dan tidak mendapatkan bonus saat laba lebih tinggi dari batas atas. Hal ini berarti manajer memiliki insentif untuk meningkatkan atau mengurangi laba berdasarkan tingkat laba yang belum diubah terkait dengan batas atas dan bawah.

b. Dampak harga saham

Potensi dampak harga saham misalnya manajer dapat meningkatkan laba untuk menaikkan harga saham perusahaan sementara sepanjang satu kejadian tertentu seperti merger yang akan dilakukan atau penawaran surat berharga, atau rencana menjual saham atau melaksanakan opsi. Manajer juga melakukan perataan laba untuk menurunkan persepsi pasar akan risiko dan menurunkan biaya modal.

c. Insentif lain.

Terdapat beberapa alasan manajemen laba lainnya. Laba seringkali diturunkan untuk menghindari biaya politik dan penelitian yang dilakukan badan pemerintah. Selain itu, perusahaan dapat menurunkan laba untuk memperoleh keuntungan dari pemerintah, misalnya subsidi atau proteksi dari persaingan asing. Perusahaan juga menurunkan laba untuk mengelakkan permintaan serikat buruh. Salah satu insentif lain adalah perubahan manajemen yang sering menyebabkan *big bath* karena beberapa alasan. Pertama, melemparkan kesalahan pada manajer yang berwenang. Kedua, sebagai tanda bahwa manajer baru harus membuat keputusan tegas untuk memperbaiki perusahaan. Ketiga, dan yang terpenting, yaitu memberikan kemungkinan dilakukannya peningkatan laba di masa depan.

4. Praktik GCG dalam industri Perbankan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 Undang-Undang Perbankan). Dalam undang-undang didefinisikan istilah perbankan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses untuk melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 butir 1 UU Perbankan).

Dari definisi tersebut terlihat bahwa sektor perbankan merupakan sektor yang sangat strategis sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat dan juga sekaligus sebagai gerbang investasi, sehingga posisinya sangat penting bagi perekonomian nasional. Sebagai lembaga intermediasi, kelangsungan usaha bank sangat tergantung dari kepercayaan masyarakat. Hal ini terlihat dari struktur dana yang dikelola oleh pengurus bank, dimana sekitar 90% adalah dana pihak ketiga dan hanya sekitar 10% yang merupakan modal pendiri bank. Kondisi ini mengakibatkan paparan risiko yang sangat tinggi (*high risk exposure*), atas dana yang dikelola.

Oleh karena itu diperlukan pengaturan dan pengawasan bank untuk memastikan bahwa bank dijalankan dengan hati-hati, penuh integritas dan profesional serta terhindar dari *moral hazard* para pengurusnya. Pengawasan dan pengaturan ini menjadi tanggung jawab otoritas

perbankan, yaitu Bank Indonesia. Selain itu juga harus dilakukan oleh Komisaris dan Direksi bank serta para pelaku pasar (*market discipline*), khususnya pada depositan sendiri.

Sesuai dengan fungsinya, sektor perbankan mempunyai karakter khusus bila dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Karakteristik yang membedakan sektor perbankan dengan sektor ekonomi lainnya antara lain :

- 1) Sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan, bank merupakan lembaga yang menjalankan usahanya :
 - a) Menghadapi berbagai macam jenis risiko usaha, baik risiko hukum, kredit, likuiditas, operasional, pasar dan lainnya.
 - b) Kegagalan kegiatan usaha perbankan mempunyai pengaruh luas terhadap sektor ekonomi lainnya, baik makro maupun mikro;
 - c) Sebagai industri jasa, bank harus dapat memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan fungsinya.
- 2) Mengingat karakteristik tersebut, maka sektor perbankan menjadi sektor yang *highly regulated*. dalam pengertian ini :
 - a) Perbankan mempunyai lembaga otoritas perbankan yang secara khusus melakukan pengawasan dan pembinaan dengan cakupan yang sangat luas, mulai dari pendirian, pengawasan operasional hingga penutupan operasi bank.
 - b) Terdapat lembaga internasional yang secara terus menerus mengkaji prinsip kehati-hatian dan pengawasan terhadap

perbankan. Lembaga tersebut adalah *Bank for International Settlement (BIS)* yang berkedudukan di Basel dan mempunyai komite yang terkenal dengan *Basel Committee on Banking Supervision*.

- c) Pengaturan – pengaturan untuk sektor perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia bersifat mengikat bagi bank di Indonesia, sedangkan yang dikeluarkan oleh BIS lebih merupakan rekomendasi yang harus diadopsi oleh masing-masing Bank Sentral yang menjadi anggotanya.
 - d) Selain peraturan dan regulasi yang diterbitkan oleh otoritas perbankan, bank secara internal juga harus memiliki aturan-aturan tertulis untuk semua kegiatan yang dilakukannya berupa kebijakan, manual dan pengaturan kewenangan.
- 3) Etika dan kehati-hatian merupakan aspek yang sangat penting bagi suatu bank. Oleh karena itu disamping ketentuan-ketentuan formal, terdapat kebiasaan-kebiasaan perbankan yang sehat (*best practices*) seperti *code of conduct* dan *Corporate Values*.

Usaha perbankan adalah usaha yang sarat dengan batasan-batasan, peraturan-peraturan, dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh aparat bank, sehingga usaha perbankan yang disebut sebagai "*Bank is the most regulated industry in the world*" oleh FP Richard dan D.Jhonson. Dari segi perilaku, penekanan terhadap nilai-nilai dan etika perusahaan harus disebarluaskan ke seluruh jajaran dan

karyawan, menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan *good corporate governance* pada perbankan.

Dalam upaya meningkatkan *corporate governance* pada industri perbankan, terdapat beberapa permasalahan. *Pertama*, sejauh mana regulasi kehati-hatian (*prudential regulation*) dan supervisi dapat menjamin penerapan *corporate governance* pada industri perbankan?. Kenyataan menunjukkan bahwa regulasi kehati-hatian yang dilaksanakan di negara-negara berkembang selama ini belum cukup efektif dalam mencegah terjadinya krisis perbankan, sehingga masih menjadi sebuah pertanyaan sejauh-mana regulasi kehati-hatian dapat memperkuat sistem perbankan nasional (Brownbridge dan Kirpatrick, 2002)

Regulator pada umumnya bertindak reaktif yakni baru bertindak setelah suatu peristiwa (krisis atau kejahatan) perbankan terjadi. Disamping itu, adanya kecenderungan regulator untuk kurang mendorong penerapan regulasi secara seksama (*weak enforcement*) sebagaimana dinyatakan oleh Honohan (1997) sebagai *regulatory forbearance*, *Kedua*, masalah menyangkut siapakah yang mengawasi pengawas (*inspector inspectorum*). Dengan kata lain, siapakah yang mampu mengawasi dan meyakini bahwa manajer bank telah menjalankan tugas pengawasan terhadap para debiturnya sehingga bank dapat terhindar dari risiko yang tidak diinginkan.

Sejauh mana diperlukan pemegang saham dari luar perusahaan sebagai pengawas, sedangkan -mungkin- mereka justru mempunyai

agenda "tersembunyi" tersendiri?. Pemegang saham dari luar perusahaan pada umumnya tidak mempunyai akses langsung terhadap informasi utama menyangkut kinerja bank, kecuali informasi terbatas yang diperoleh berdasarkan laporan dari pihak manajemen yang telah dipersiapkan "dengan sebaik-baiknya". Faktor tersebut mengurangi efektivitas pengawasan pemegang saham dari luar perusahaan terhadap manajemen (Klein, 1998). *Ketiga*, apakah pemegang saham dari dalam perusahaan-mampu melakukan pengawasan efektif terhadap manajer bank ?. Hal ini tergantung sejauh mana bank yang bersangkutan mempunyai pemegang saham pengendali (*block shareholders*). Dalam kepemilikan tersebar, pemegang saham individu kurang bergairah untuk mengawasi perusahaan. Sedangkan adanya pemegang saham pengendali memungkinkan pengawasan manajemen dilakukan secara lebih serius dan berkekuatan untuk melakukan perubahan manajemen.

Prowse (1995) mengemukakan bahwa rendahnya ancaman pengambil-alihan usaha (*take over threat*) dan kurangnya intervensi oleh direksi dari luar perusahaan, mengakibatkan rendahnya tingkat disiplin manajer sehingga penerapan *corporate governance* tidak cukup efektif. Lebih jauh, kurangnya tindakan pengawasan internal yang mengakibatkan bank dalam kesulitan karena salah urus manajemen menuntut perlunya intervensi regulatif. Prowse (1995) menegaskan bahwa bank yang membutuhkan intervensi regulatif biasanya mempunyai derajat kepemilikan terkonsentrasi rendah. Hal ini mengisyaratkan bahwa

derajat kepemilikan terkonsentrasi yang semakin tinggi akan meningkatkan kinerja sebagai akibat pengawasan yang -semakin- ketat oleh pemegang saham mayoritas dan/atau perwakilannya yang duduk dalam jajaran dewan direksi.

1) Regulasi sebagai faktor kekuatan eksternal.

Dalam literatur konvensional *corporate governance*, mekanisme pasar merupakan satu-satunya kekuatan eksternal guna meningkatkan disiplin agen. Dalam industri perbankan, regulasi merupakan faktor *external governance* yang membawa dampak bagi makro ekonomi (pada tingkatan sektor perbankan) maupun mikro ekonomi (pada tingkatan bank sebagai sebuah unit usaha). Berbeda dengan mekanisme pasar, regulasi perbankan dilandasi oleh kepastian peraturan sehingga dimungkinkannya verifikasi setiap dampak regulasi dengan menggunakan parameter terukur. Regulasi perbankan mencerminkan adanya kepentingan diluar kepentingan perusahaan yakni kepentingan untuk melindungi kepentingan publik, terutama kepentingan nasabah bank. Penerapan regulasi dilakukan oleh agen yang mewakili kepentingan publik yakni regulator yang dalam hal ini tidak memiliki hubungan kontrak dengan pemilik bank. Hubungan regulator dengan perusahaan dan pemilik lebih didasarkan pada hubungan politik.

2) Pasar regulatif (*Regulated markets*)

Secara umum, regulasi diartikan sebagai bentuk koreksi atas adanya penyimpangan pasar (*market failure*) dalam menjaga stabilitas finansial. Regulasi perbankan tidak berkaitan dengan struktur pasar (misal, pembatasan usaha atau mengatur monopoli pasar) namun lebih menekankan pada kewajiban terhadap pemenuhan kualifikasi minimum dalam kaitannya dengan manajemen bank dengan sejumlah sanksi-sanksi apabila terjadi pelanggaran regulasi. Dalam hal ini Visentini (1997) menegaskan bahwa dengan adanya regulasi, pasar keuangan menjadi lebih terkelola (*administered markets*).

3) Regulasi sebagai representasi kepentingan publik.

Dalam terminologi manajemen keuangan tugas pokok agen adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Manajer diharapkan untuk bertindak dan mengambil keputusan manajemen demi kepentingan pemilik. Implikasinya, setiap sistem dan metode *corporate governance* diarahkan bagi kepentingan prinsipal. Namun demikian, pada industri perbankan terdapat kepentingan lain yang harus diperhatikan yakni kepentingan regulator yang bertindak sebagai agen bagi kepentingan publik. Kepentingan ini berada diluar organisasi dan tidak berkaitan langsung dengan maksimisasi laba bank. Sekalipun demikian, kepentingan eksternal akan membawa dampak bagi kepentingan internal perusahaan. Oleh karena itu, mengingat kepentingan publik merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam industri perbankan maka setiap pencapaian

kepentingan internal perlu pula memperhatikan kepentingan eksternal. Hal ini menjadikan potensi konflik kepentingan pada bank lebih kompleks dibandingkan perusahaan non-keuangan.

Perlindungan terhadap kepentingan publik -terutama kepentingan para penyimpan denominasi kecil (*small depositors*)- dimaksudkan untuk mencegah tindak penyimpangan moral (*moral hazard*) dan salah pilih (*adverse selection*) yang dilakukan bank. Mengingat kurang mampuan para penyimpan dalam melakukan pengawasan secara langsung terhadap aktivitas bank, diperlukan representasi untuk mewakili kepentingan mereka. Hipotesis ini oleh Dewatripoint dan Tirole (1994) disebut hipotesis representasi (*Representation Hypothesis*).

4) Azas berbagi risiko bank (*sharing the bank's risk*).

Masalah keagenan pada industri perbankan menyangkut pendelegasian wewenang prinsipal kepada agen terutama menyangkut keputusan kredit. Mengingat setiap risiko kredit yang mungkin timbul menjadi tanggung jawab penuh prinsipal, maka pemilik cenderung bersikap *risk averse* yakni berusaha meminimasi risiko pada tingkat return tertentu (Fabozzi, Modigliani dan Ferri, 1994). Oleh karena itu, salah satu tujuan pokok *corporate governance* pada industri perbankan adalah mencegah agen dari pengambilan risiko usaha yang berlebihan diatas tingkat risiko yang dapat diterima prinsipal. Disisi lain, regulator berkepentingan untuk mencegah

terjadinya risiko sistemik melalui regulasi yang membatasi tingkat risiko bank. Kebijakan pembatasan risiko merupakan cerminan adanya hubungan berbagi risiko (*risk sharing*) antara pemilik dengan otoritas eksternal. Dengan adanya regulasi maka risiko bisnis tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang saham. Sekalipun demikian, adanya hubungan berbagi risiko dalam bank justru memungkinkan terjadinya tingkat pengambilan risiko yang berlebihan dibandingkan perusahaan *non-regulatif*.

Dalam upaya menjaga jaring pengaman keuangan dari tindak penyimpangan moral, pemerintah menerapkan regulasi kehati-hatian dan supervisi. Dalam hal ini, Dewatripont dan Tirole (1993) menegaskan bahwa regulasi kehati-hatian dan supervisi terutama dimaksudkan untuk menjaga solvabilitas (*solvency*) bank. Pendekatan pada aspek regulasi dan supervisi guna menganalisis faktor eksternal perbankan dalam kaitannya dengan *external corporate governance* telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang memperkuat pendapat bahwa regulasi dan supervisi berpengaruh positif terhadap daya tangkal suatu negara dalam menghadapi krisis keuangan. Penelitian Lindgren, Garcia dan Saal (1996) mengenai penerapan regulasi kehati-hatian dan supervisi pada 34 negara yang mengalami krisis keuangan menunjukkan bahwa dari jumlah tersebut hanya lima negara yang mempunyai sistem regulasi dan supervisi yang cukup kuat, sedangkan selebihnya (29 negara) termasuk dalam kategori



negara yang lemah dalam pelaksanaan regulasi kehati-hatian dan supervisi.

Sedangkan Williamson dan Mahar (1998) melakukan penelitian dengan menggunakan konstruk tingkat indeks regulasi kehati-hatian dan supervisi pada 33 negara yang menerapkan liberalisasi keuangan selama periode 1973 – 1995. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks yang lebih tinggi (menunjukkan penerapan regulasi dan supervisi yang lebih baik) pada periode sebelum krisis terjadi, terdapat pada negara-negara yang relatif tidak mengalami dampak berat akibat terjadinya krisis keuangan. Demircuc-Kunt dan Detragiache (2000) melakukan analisis hubungan antara efektivitas lingkungan regulasi (*regulatory environment*), liberalisasi dan krisis perbankan. Dengan menggunakan data panel 55 negara periode 1989-95 mereka menggunakan beberapa proksi untuk mengukur efektivitas lingkungan regulasi, yakni: tingkat penerapan hukum (*rule of law*), kualitas penerapan kontrak (*quality of contract enforcement*), kualitas birokrasi dan tingkat korupsi. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa peningkatan lingkungan regulatif dapat mencegah terjadinya krisis perbankan. Dengan lain perkataan, penelitian empiris tersebut menunjukkan bahwa (i) penerapan regulasi kehati-hatian dan supervisi merupakan bentuk *external corporate governance* dan (ii) pendekatan penelitian melalui penggunaan konstruk indeks regulasi kehati-hatian dan supervisi telah lazim digunakan.

Dalam undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, secara umum telah diatur ketentuan yang terkait dengan GCG baik yang termasuk *governance structure*, *governance process*, maupun *governance outcome*. *Governance structure* terdiri atas (LAN dan BPKP,2000) :

Pertama, uji kelayakan dan kepatutan, (*fit and proper test*), yang mengatur perlunya peningkatan kompetensi dan integritas manajemen perbankan melalui uji kelayakan dan kepatutan terhadap pemilik, pemegang saham pengendali, dewan komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif bank dalam aktivitas pengelolaan bank.

Kedua, independensi manajemen bank, di mana para anggota dewan komisaris dan direksi tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan atau memiliki hubungan *financial* dengan dewan komisaris dan direksi atau menjadi pemegang saham pengendali di perusahaan lain.

Ketiga, ketentuan bagi direktur kepatuhan dan peningkatan fungsi audit bank publik. Dalam standar penerapan fungsi internal audit bank publik, bank diwajibkan untuk menunjuk direktur kepatuhan yang bertanggung jawab atas kepatuhan bank terhadap regulasi yang ada.

Strategi dan rencana Bank Indonesia mewajibkan bank untuk memiliki rencana dan anggaran jangka panjang dan menengah dalam bentuk keputusan dewan direksi bank Indonesia tahun 1995, yang

dimaksudkan bagi bank untuk memiliki strategi korporasi dan yang tertuang dengan jelas, termasuk nilai-nilai yang harus dikomunikasikan kepada seluruh tingkatan di dalam organisasi dan risiko-risiko pengendalian.

Mengenai *governance outcome*, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa peraturan, antara lain transparansi mengenai kondisi keuangan bank dan peningkatan peran auditor eksternal. Bank diwajibkan untuk mengungkapkan *non performing loan* (NPL), pemegang saham pengendali dan afiliasinya, praktik manajemen risiko dalam pelaporan keuangan.

Peran bank sebagai lembaga intermediasi keuangan sangat krusial bagi perekonomian suatu negara. Selain itu fungsi bank adalah penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Oleh karena itu aset utama bank berupa kepercayaan masyarakat harus dijaga. Salah satu cara menjaga kepercayaan ini adalah dengan meningkatkan kinerja dan efisiensi bank, serta pengelolaan yang hati-hati (*prudential banking*).

Kegagalan pada suatu bank, dapat menimbulkan krisis kepercayaan kepada system perbankan (*systemic risk*) yang pada akhirnya berdampak kepada perekonomian suatu negara.

Secara sepintas nampaknya penerapan GCG di bank tidak berbeda dengan perusahaan lainnya. Dalam banyak hal perilaku manager dan pemilik bank merupakan faktor utama yang memerlukan perhatian dalam penerapan GCG. Dalam banyak hal konsep Agency Theory yang sering digunakan dalam penerapan GCG tidak sepenuhnya dapat digunakan dalam penerapan GCG dalam industry perbankan. Untuk itu perlu ditelaah lebih lanjut bagaimana seharusnya penerapan GCG pada industry perbankan dilakukan.

5. Penerapan GCG di Indonesia

Dalam rangka *economy recovery*, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan dan mengintroduksir konsep GCG sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat (Sulistyanto & Lidyah, 2002). Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stock holders*) dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya. Penelitian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB) menyimpulkan penyebab krisis ekonomi di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, adalah (1) mekanisme pengawasan dewan komisaris (*board of director*) dan komite audit (*audit committee*) suatu perusahaan tidak berfungsi dengan efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham dan (2) pengelolaan perusahaan yang belum profesional. Sehingga penerapan konsep GCG di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders*.

GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparans terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder* (YPPMI & SC, 2002). Atau secara singkat, ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG ini, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley, 1996). Chtourou et al. (2001) juga mencatat prinsip GCG yang diterapkan dengan konsisten dapat menjadi penghambat (*constrain*) aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Rekayasa kinerja yang dikenal dengan istilah *earnings management* ini sejalan dengan teori agensi (*agency theory*) yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (*principles*) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada profesional (*agents*) yang lebih mengerti dan memahami cara untuk menjalankan suatu usaha (YPPMI & SC, 2002). Namun pemisahan ini mempunyai sisi negatif, keleluasaan

manajemen untuk memaksimalkan laba akan mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan manajemen sendiri dengan biaya yang harus ditanggung pemilik perusahaan. Kondisi ini terjadi karena asimetri informasi (*information asymmetry*) antara manajemen dan pihak lain yang tidak mempunyai sumber dan akses yang memadai untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk memonitor tindakan manajemen (Richardson, 1998; DuCharme et al., 2000). Rekayasa ini merupakan upaya manajemen untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan untuk menyesatkan pemegang saham yang ingin mengetahui kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang mengandalkan angka-angka akuntansi yang dilaporkannya (Healy & Wahlen, 1998; DuCharme et al., 2000). Sehingga secara prinsipil manipulasi ini tidak sejalan dengan semangat GCG.

Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani *letter of intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencatuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia (YPPMI & SC, 2002). Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional. Namun, walau menyadari pentingnya GCG, banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut. Masih banyak perusahaan menerapkan prinsip GCG

karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada dibandingkan yang menganggap prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan. Selain itu, kewajiban penerapan prinsip GCG seharusnya mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan.

6. Prinsip-Prinsip dan Mekanisme Penerapan GCG

Dalam rangka *economy recovery*, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan dan mengintroduksi konsep GCG sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat (Sulistyanto & Lidyah, 2002). Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stock holders*) dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya. Penelitian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB) menyimpulkan penyebab krisis ekonomi di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, adalah (1) mekanisme pengawasan dewan komisaris (*board of director*) dan komite audit (*audit committee*) suatu perusahaan tidak berfungsi dengan efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham dan (2) pengelolaan perusahaan yang belum profesional. Sehingga penerapan konsep GCG di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders*.

GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam

konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparans terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder* (YPPMI & SC, 2002). Atau secara singkat, ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG ini, yaitu *faimess*, *transparancy*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley, 1996). Chtourou et al. (2001) juga mencatat prinsip GCG yang diterapkan dengan konsisten dapat menjadi penghambat (*constrain*) aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Rekayasa kinerja yang dikenal dengan istilah *earnings management* ini sejalan dengan teori agensi (*agency theory*) yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (*principles*) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada profesional (*agents*) yang lebih mengerti dan memahami cara untuk menjalankan suatu usaha (YPPMI & SC, 2002). Namun pemisahan ini mempunyai sisi negatif, keleluasaan manajemen untuk memaksimalkan laba akan mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan manajemen sendiri dengan biaya yang harus ditanggung pemilik perusahaan. Kondisi ini terjadi karena asimetri

informasi (*information asymmetry*) antara manajemen dan pihak lain yang tidak mempunyai sumber dan akses yang memadai untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk memonitor tindakan manajemen (Richardson, 1998; DuCharme et al., 2000). Rekayasa ini merupakan upaya manajemen untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan untuk menyesatkan pemegang saham yang ingin mengetahui kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang mengandalkan angka-angka akuntansi yang dilaporkannya (Healy & Wahlen, 1998; DuCharme et al., 2000). Sehingga secara prinsipil manipulasi ini tidak sejalan dengan semangat GCG.

Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani *letter of intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencatuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia (YPPMI & SC, 2002). Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional. Namun, walau menyadari pentingnya GCG, banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut. Masih banyak perusahaan menerapkan prinsip GCG karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada dibandingkan yang menganggap prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan. Selain itu, kewajiban penerapan prinsip GCG

seharusnya mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan

A. Prinsip-prinsip GCG

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari GCG yaitu:

- 1) *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- 2) *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- 3) *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 5) *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

B. Mekanisme Penerapan GCG

Mekanisme *corporate governance* di sektor perbankan terkait dengan dua hal. Pertama, *external corporate governance* yang menyangkut jaring pengaman keuangan (*financial safety nets*), dan regulasi kehati-hatian. Kedua, *internal corporate governance* yang menyangkut efektivitas dan akuntabilitas dewan direksi, pengungkapan (*disclosure*), dan transparansi (*transparency*) yang bertitik tolak pada menciptakan peningkatan kinerja bank dan meminimalisasi tindakan penyimpangan moral.

1) Mekanisme *External Corporate Governance*.

Mengembangkan model *corporate governance* dalam industri perbankan memerlukan pemahaman tentang bagaimana regulasi berpengaruh terhadap pendelegasian wewenang pengambilan keputusan oleh prinsipal (Jensen dan Smith, 1984) dan efek pendelegasian wewenang tersebut terhadap perilaku agen (Freixas dan Rochet, 1997).

Corporate governance dalam industri perbankan berkaitan erat dengan eksistensi regulasi yang mencerminkan beberapa hal

diantaranya (i) regulasi menunjukkan adanya faktor kekuatan eksternal yang independen dari kekuatan pasar dan berpengaruh terhadap pemilik dan manajer (ii) mengingat pasar dimana bank beroperasi tidak lepas dari pengaruh regulasi, maka pasar menjadi regulatif dan ikut berperan sebagai unsur kekuatan tata kelola (governance) eksternal bagi perusahaan. (iii) eksistensi regulator dan regulasi sebagai representasi kepentingan publik akan mendisiplinkan pemilik dan manajer bank dalam bentuk yang berbeda dengan industri non-regulatif, dan (iv) dalam kaitannya dengan upaya mencegah risiko sistemik, regulasi perbankan menunjukkan adanya pihak eksternal yang ikut berbagi risiko (risk sharing) sebagaimana ditunjukkan oleh adanya kebijakan lender of last resort dan penjaminan simpanan (Ciancanelli, 2000).

Regulasi sebagai faktor kekuatan eksternal. Dalam literatur konvensional *corporate governance*, mekanisme pasar merupakan satu-satunya kekuatan eksternal guna meningkatkan disiplin agen. Dalam industri perbankan, regulasi merupakan faktor external governance yang membawa dampak bagi makro ekonomi (pada tingkatan sektor perbankan) maupun mikro ekonomi (pada tingkatan bank sebagai sebuah unit usaha). Berbeda dengan mekanisme pasar, regulasi perbankan dilandasi oleh kepastian peraturan sehingga dimungkinkannya verifikasi setiap dampak regulasi dengan menggunakan parameter terukur. Regulasi perbankan mencerminkan

adanya kepentingan diluar kepentingan perusahaan yakni kepentingan untuk melindungi kepentingan publik, terutama kepentingan nasabah bank. Penerapan regulasi dilakukan oleh agen yang mewakili kepentingan publik yakni regulator yang dalam hal ini tidak memiliki hubungan kontrak dengan pemilik bank. Hubungan regulator dengan perusahaan dan pemilik lebih didasarkan pada hubungan politik.

Pasar regulatif (*Regulated markets*). Secara umum, regulasi diartikan sebagai bentuk koreksi atas adanya penyimpangan pasar (*market failure*) dalam menjaga stabilitas finansial. Regulasi perbankan tidak berkaitan dengan struktur pasar (misal, pembatasan usaha atau mengatur monopoli pasar) namun lebih menekankan pada kewajiban terhadap pemenuhan kualifikasi minimum dalam kaitannya dengan manajemen bank dengan sejumlah sanksi-sanksi apabila terjadi pelanggaran regulasi. Dalam hal ini Visentini (1997) menegaskan bahwa dengan adanya regulasi, pasar keuangan menjadi lebih terkelola (*administered markets*).

Penelitian ini menggunakan aspek regulasi dan supervisi perbankan sebagai cerminan dari *external corporate governance* dengan menitik-beratkan pada faktor kepatuhan terhadap regulasi dan supervisi. Kepatuhan regulasi dalam penelitian ini merupakan kecenderungan manajemen untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam regulasi. Bank yang melanggar regulasi dapat

dikenai sanksi administratif, atau bila pelanggaran dinilai melampaui batas tertentu, bank yang bersangkutan dapat dimasukkan dalam daftar bank dalam pengendalian atau disebut sebagai bank tidak sehat. Dengan demikian kepatuhan regulasi tercermin dari klasifikasi bank sehat dan tidak sehat.

Syarat yang ditetapkan dalam regulasi perbankan di Indonesia untuk klasifikasi bank tidak sehat dan bank sehat tidak didasarkan pada indikator tunggal absolut, melainkan berdasarkan beberapa indikator tertimbang yang meliputi permodalan, aktiva produktif, dan pengukuran lain yang tidak terdapat dalam laporan keuangan (akuntansi). Masing-masing indikator ditimbang dengan proporsi tertentu untuk mendapatkan skor total atau skor komposit sebagai dasar dalam menentukan apakah bank dianggap secara keseluruhan melanggar regulasi atau patuh pada regulasi.

Masalah empiris dalam pengukuran skor kepatuhan regulasi adalah tidak semua data dapat diperoleh dari laporan keuangan. Oleh karena itu penelitian ini mengembangkan suatu model untuk memproksi dan memprediksi skor kepatuhan regulasi dengan menggunakan beberapa variabel rasio keuangan sebagai proksi kepatuhan regulasi. Penentuan komposisi atau proporsi penimbang setiap variabel didasarkan pada estimasi model regresi logistik atau model logit (Gujarati, 2003), yakni dengan mencari koefisien regresi logistik dari masing-masing variabel. Penelitian ini menggunakan

variabel komposit kepatuhan regulasi dalam bentuk probabilitas logistik sebagai proksi *external corporate governance*. Semakin tinggi nilai probabilitas kepatuhan regulasi berarti semakin tinggi niat bank untuk menjalankan operasi perusahaan yang sejalan dengan regulasi.

Variabel-variabel proksi *external corporate governance* yang terkait dengan kepatuhan regulasi dan yang dapat diproksi berdasarkan laporan keuangan meliputi permodalan dan aktiva produktif.

Terdapat dua pandangan mengenai permodalan bank dalam kaitannya dengan aktiva produktif. Pandangan pertama, permodalan yang memperhitungkan bobot risiko masing-masing jenis kategori aktiva-produktif mendorong manajer bank untuk menurunkan portofolio aktiva produktif yang berisiko (lebih) tinggi untuk dialihkan pada jenis aktiva-produktif risiko yang (lebih) rendah. Hasil penelitian Thakor, Passmore dan Sharpe (1994) menegaskan bahwa peningkatan modal akan mendorong bank untuk menurunkan portofolio kredit mereka dan mengalihkan investasi mereka dalam bentuk surat berharga/sekuritas yang mempunyai bobot risiko lebih rendah.

Furfine (2000) menunjukkan bahwa bahwa pergeseran portofolio aktiva-produktif pada bank-bank di Amerika Serikat terjadi menyusul diberlakukannya Basel Accord 1988. Bank secara bersamaan mengurangi porsi portofolio jenis pinjaman yang berisiko tinggi pada

bentuk sekuritas pemerintah yang mempunyai bobot risiko yang lebih rendah. Sebagai dampak dari pergeseran portofolio bank, maka total aktiva produktif dalam bentuk fasilitas kredit komersial maupun investasi menurun dari 23 persen di tahun 1989 menjadi 16 persen di tahun 1994, dan pada periode yang sama investasi dalam sekuritas pemerintah meningkat dari 15 persen menjadi 25 persen. Pandangan kedua, permodalan yang memperhitungkan bobot risiko masing-masing jenis aktiva-produktif sebagaimana disyaratkan Basel Accord 1988 justru mendorong bank untuk meningkatkan pengambilan risiko yang lebih tinggi. Hal ini terjadi jika terdapat informasi asimetri antara regulator atau lembaga pemeringkat kredit dengan manajer bank mengenai kualitas aktiva-produktif. Dasar pemikirannya, manajer bank mempunyai kecenderungan untuk mengalihkan pada jenis fasilitas aktiva-produktif yang lebih berisiko sejauh mempunyai bobot biaya modal yang sama. the Basel Committee of Banking Supervision mengakui kemungkinan terjadinya pengeseran pemberian fasilitas kredit dalam kaitannya dengan rasio kecukupan permodalan tersebut:

" in this case, the bank's total risk weighted assets and regulatory capital ratios would appear unchanged, even as its overall riskiness increased" (Bank for International Settlement, 1999, p.23).

Studi empiris mengenai hubungan antara tingkat kecukupan modal (capital adequacy ratio) dengan pengambilan tingkat risiko aktiva produktif menghasilkan kesimpulan yang beragam. Sheldon (1996) menyimpulkan bahwa aktiva-produktif bank meningkat pada

periode 1987-1994 baik pada bank yang melakukan maupun yang tidak melakukan peningkatan permodalan.

Penelitian Gennote dan Pyle (1991) menunjukkan bahwa tingkat risiko bank berhubungan positif dengan peningkatan permodalan. Calem dan Robb (1999) meneliti efek regulasi permodalan di Amerika Serikat periode 1984-1993 menghasilkan kesimpulan adanya hubungan *U-shaped* antara permodalan dengan pengambilan risiko aktiva produktif bank: bank dengan tingkat permodalan yang rendah cenderung untuk mengambil tingkat risiko yang lebih tinggi dan bersamaan dengan permodalan yang meningkat, bank cenderung untuk menurunkan tingkat risiko. Namun demikian, dengan keberlanjutan kenaikan permodalan, bank cenderung untuk menaikkan kembali tingkat risiko aktiva-produktif. Bank dengan tingkat permodalan yang rendah cenderung mengambil tingkat risiko yang lebih tinggi dengan pertimbangan, apabila terjadi kebangkrutan usaha maka risiko tersebut akan dibebankan pada dana penjaminan simpanan. Sedangkan bagi bank dengan tingkat permodalan yang relatif tinggi cenderung untuk mengambil tingkat risiko yang lebih tinggi karena kemampuan laba usaha yang tinggi dan probabilitas kebangkrutan yang rendah.

Masing-masing indikator kepatuhan regulasi diukur dengan aspek permodalan dan aktiva produktif dengan rumus sebagai berikut:

a) Permodalan:

Salah satu aspek yang paling mendasar dalam pelaksanaan kehati-hatian Bank adalah kecukupan modal. Hal ini menjadi fokus utama dari seluruh otoritas pengawasan Bank di seluruh dunia. Modal yang dimiliki oleh suatu bank pada dasarnya harus cukup untuk menutupi seluruh risiko usaha yang dihadapi bank. Risiko utama yang menjadi perhatian bank antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko likuiditas. Perhitungan modal di Indonesia pada saat ini telah menerapkan Capital Accord 1988 . Selanjutnya pada tahun 1996 telah dilakukan amndemen dengan menambahkan komponen modal bank yaitu Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) serta memperhitungkan risiko pasar. Adapun rasio permodalan diantaranya adalah:

(1) Capital adequacy ratio (CAR) :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}}$$

(2) Aktiva tetap terhadap modal (ATIM):

$$\text{ATIM} = \frac{\text{Aktiva Tetap dan Inventaris}}{\text{Modal}}$$

(3) Rasio Primer (*Primary ratio*, PR):

$$\text{PR} = \frac{\text{Modal ekuitas}}{\text{Total Aktiva}}$$

(4) Rasio *Capital Ratio* (CR):

$$\text{CR} = \frac{(\text{PPAPt} + \text{Ekuitas})}{\text{Total Pinjaman Yang Diberikan}}$$

(PPAPt = Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang dibentuk)

b) Aktiva produktif.

Aktiva produktif merupakan penanaman atau penempatan dana bank yang dimaksudkan untuk mendapatkan penghasilan secara langsung. Jenis-jenis penanaman ini antara lain:

- (1) Penempatan pada bank lain
- (2) Surat-surat berharga
- (3) Kredit yang diberikan
- (4) Penyertaan
- (5) Transaksi rekening Administratif termasuk transaksi derivatif.



Penilaian terhadap aktiva produktif didasarkan pada kriteria atas kualitas dari masing-masing penanaman, yang umumnya diukur dari tingkat kemungkinan diperolehnya kembali penanaman tersebut beserta bunganya (kolektibilitas). Adapun beberapa rasio aktiva produktif antara lain :

- (1) Rasio Aktiva Produktif Terhadap Utang, (*loan to deposit ratio - LDR*). Rasio ini menunjukkan peran dana simpanan masyarakat dalam pembiayaan pinjaman/kredit. LDR yang semakin tinggi menunjukkan semakin kecil porsi *liquid assets* yang dibiayai dengan giro/tabungan/deposito masyarakat.

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Pinjaman Yang Diberikan}}{\text{Total Dana Giro/Tabungan/deposito}}$$

(2) *Allowance for Loan Losses (ALLOW)* : Rasio ini untuk mengukur aktiva produktif yang diukur dari perbandingan Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang telah dibentuk (PPAPt) diproksi dengan total pinjaman:

$$\text{ALLOW} = \frac{\text{PPAP}_t}{\text{Total Pinjaman Yang Diberikan}}$$

(3) *Secondary Reserve Ratio (SRR)*: Rasio ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan bank dalam melunasi kewajiban kepada para penyimpannya melalui penjualan surat-surat berharga yang dimilikinya.

$$\text{SRR} = \frac{\text{Sekuritas}}{\text{Total Dana Tabungan/deposito}}$$

(4) *Quick Ratio (QR)*. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank untuk membayar kembali simpanan para penyimpannya dengan alat-alat paling likuid yang dikuasai oleh bank (*cash assets*).

$$\text{QR} = \frac{\text{Aktiva Lancar (Cash Assets)}}{\text{Total Dana Tabungan/deposito}}$$

Bank sehat mencerminkan perilaku manajemen bank yang mematuhi regulasi. Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur probabilitas kepatuhan regulasi adalah model logit sebagai berikut

$$Z = \alpha_0 + \beta_1 PR + \beta_2 CR + \beta_3 ATIM + \beta_4 SRR + \beta_5 ALLOW + \beta_6 QR + \beta_7 LDR + e \quad [3.4e]$$

$e = 2,71828$, P_i adalah probabilitas kepatuhan regulasi, simbol a konstan dan b adalah koefisien parameter. Dalam penelitian ini, hasil estimasi probabilitas kepatuhan regulasi pada persamaan digunakan untuk meramalkan probabilitas kepatuhan regulasi oleh bank untuk seluruh periode penelitian.

2) *Internal Corporate Governance-Manajer.*

Internal corporate governance-Manajer menyangkut usaha untuk mendorong keselarasan kepentingan antara manajer dengan pemilik, yang diaktualisasikan dalam bentuk kompensasi; gaji dasar (*base salary*), bonus, *capital gain*, dan bentuk insentif lainnya (Jensen dan Murphy, 1990). Pada jenjang awal, paket kompensasi terdiri dari gaji dasar tahunan ditambah beberapa insentif dalam bentuk asuransi kesehatan, asuransi jiwa dan tunjangan pensiun. Seiring dengan jenjang karir manajerial, paket insentif meningkat menjadi empat komponen (1) gaji dasar (*base salary*) (2) bonus tunai (*cash bonus*) yang diterima berdasarkan prestasi kerja (3) opsi saham.

Internal corporate governance dalam penelitian dibedakan dalam dua hal yaitu *Internal corporate governance* yang mewakili kepentingan manajer (*ICG-manajer*) dan *Internal corporate governance* yang mewakili kepentingan pemilik (*ICG-pemilik*). *ICG-manajer* terkait dengan hal-hal yang menyangkut kompensasi dan

insentif manajerial. ICG-pemilik terkait dengan hal-hal yang menyangkut pengendalian manajerial agar meningkatkan efisiensi

- 3) **Internal Corporate Governance-Manajer** ICG-manajer diproksi dari kepekaan kompensasi terhadap kinerja. Jensen dan Murphy (1990) meneliti tentang kepekaan kompensasi terhadap kinerja. Mereka mendefinisikan kepekaan kompensasi-kinerja, sebagai perubahan uang (kompensasi dan insentif) yang diterima sebagai cerminan kemakmuran manajer yang terkait dengan perubahan kemakmuran pemegang saham. Kepekaan kompensasi-kinerja (pay-performance) tercermin dari koefisien parameter yang diestimasi dengan model regresi kompensasi dan insentif terhadap kemakmuran pemegang saham.

Berdasarkan model Jensen dan Murphy (1990), model untuk mengukur keselarasan kepentingan dalam penelitian ini menggunakan laba operasi sebagai proksi kepentingan pemilik, sedangkan kepentingan manajer tercermin dari pengeluaran untuk personalia. Proksi ini dipilih berdasarkan ketersediaan data laporan keuangan perbankan di BPD Sulsel. Model yang dipakai dalam penelitian ini relatif berbeda dengan model Jensen dan Murphy (1990). Pertama, sistem pemberian bonus dan kompensasi di perbankan Indonesia umumnya mengacu pada kinerja pada masa sebelumnya, sehingga penggunaan dasar kinerja saat ini menjadi kurang relevan. Kedua, terdapat pola yang tidak linear dalam

pemberian bonus dan kompensasi di perbankan Indonesia. Artinya, pada level-level tertentu, pergerakan kinerja yang semakin besar tidak selalu diimbangi dengan pergerakan bonus dan kompensasi yang semakin besar pula. Dalam hal ini bonus dan kompensasi akan bergerak lebih lamban setelah kinerja bank melampaui level-level tertentu.

Untuk menekan berkurangnya derajat bebas, model yang dipakai dalam hal ini adalah model linear, menjadi sebagai berikut:

$$ICG_M = \Delta SE_t = \alpha + \beta_1 \Delta OP_{t-1} + \varepsilon$$

Dalam hal ini ICG_M adalah *internal corporate governance* sebagai representasi kepentingan manajer yang diproksi dari estimasi koefisien parameter. ΔSE adalah perubahan biaya personalia (staff expenses), ΔOP adalah perubahan laba operasi (operating profit), sedangkan α adalah konstanta.

4) *Internal Corporate Governance*-pemilik.

ICG-pemilik merupakan intervensi langsung pemilik dalam bentuk pengendalian kepada manajer, diantaranya melalui pemilihan dewan direksi yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan pemilik, dan penugasan internal auditor. Esensi dari *ICG*-pemilik adalah pada faktor efisiensi yakni mencegah manajer melakukan ekspropriasi aktiva. Usaha pemilik untuk senantiasa melakukan pengendalian kepada pihak manajemen agar manajer senantiasa bertindak selaras dengan kepentingannya. Hal ini

didasarkan pada kenyataan bahwa bahwa kesalahan manajemen (mis-management) dan kesempatan untuk melakukan tindak penyelewengan (fraud opportunities) senantiasa dimungkinkan terjadi (Dewatripont dan Tirole, 1994).

Sebagai proksi ICG-pemilik digunakan *net interest margin* (NIM) yakni perbedaan antara tingkat bunga pinjaman (lending rate) dengan tingkat bunga simpanan (deposit rate). Dengan kata lain, analisis NIM bertujuan untuk menaksir biaya intermediasi keuangan; yakni perbedaan antara biaya kotor (*gross cost*) yang harus dibayar oleh para debitur kepada bank dan return bersih (*net return*) yang diterima oleh para penyimpan (Brock dan Suarez, 2000). NIM mencerminkan risiko kredit, profitabilitas jangka panjang, biaya administrasi dan biaya pemupukan dana (*cost of loanable funds*) dan nilai valuasi jaminan (*collateral*). Kesemua ini merupakan cerminan efisiensi manajer dalam mengelola *asset-liabilities management* (ALM) yang selaras dengan kepentingan pemilik. (Andreeva, 2004).

Penelitian Angbazo (1997) mengenai faktor-faktor determinan NIM pada bank-bank di AS periode 1989-1993 menghasilkan kesimpulan bahwa NIM mencerminkan fungsi dari beberapa variabel: default risk, interest rate risk rate, interaksi antara default dan interest risk, liquidity risk, leverage, dan efisiensi manajemen. Pada umumnya, NIM yang tinggi diupayakan untuk

dihindari karena mencerminkan tingginya biaya intermediasi. Tingkat bunga simpanan yang rendah mencerminkan tingkat return yang kurang menarik bagi para penyimpan untuk menempatkan dananya pada bank, sedangkan di pihak lain, biaya dana (*cost of loanable funds*) yang tinggi kurang menarik para debitur untuk menggunakan fasilitas pinjaman kredit guna mendukung kegiatan investasi mereka. Namun demikian, sekalipun NIM mencerminkan inefisiensi, NIM mempunyai peran dalam memperkuat sistem perbankan nasional (Saunders dan Schumacher, 2000). Hal ini terjadi manakala laba usaha (profit) yang dihasilkan dari tingginya spread (perbedaan tingkat bunga pinjaman dengan tingkat bunga simpanan) disalurkan untuk memperkuat modal bank. Sebagai misal, spread yang tinggi dan rasio permodalan yang sehat keduanya tercermin pada bank-bank di Columbia (Barajas, Steiner, dan Salazar, 1999). Di sisi lain, tingkat spread yang sangat rendah tidak dapat diartikan sebagai sesuatu yang positif apabila bank-bank yang kurang sehat (dalam permodalan) diperkenankan untuk tetap beroperasi. Dikhawatirkan, bank-bank tersebut cenderung untuk menawarkan tingkat bunga yang relatif rendah semata untuk tujuan meluaskan pangsa pasar dan kurang mempertimbangkan faktor likuiditas dan solvabilitas usaha. Apabila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada kesulitan usaha yang dimungkinkan akan dapat mengganggu sistem perbankan nasional.

Penelitian ini menggunakan asumsi bahwa penggunaan NIM pada satu periode waktu belum mencerminkan mekanisme yang sesuai bagi pemilik dalam menerapkan *ICG_p*. Dengan kata lain, penelitian ini lebih menekankan pada faktor kestabilan NIM dari waktu ke waktu yang lebih mencerminkan keberhasilan mekanisme pengawasan pemilik daripada NIM pada satu waktu/periode. Untuk itu, penelitian ini menggunakan koefisien variasi (*coefficient of variation*) NIM sebagai proksi *internal corporate governance* yang mencerminkan kepentingan pemilik (*ICG_p*) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NIM} = \frac{\text{Interest Income} - \text{Interest Expense}}{\text{Earning Asset}}$$

D. Indeks GCG

Dalam penilaian Indeks GCG, indikator yang digunakan dalam penilaian tetap mengikuti kaidah GCG dan mengacu pada penelitian sebelumnya.

Adapun penilaiannya dibagi menjadi 11 indikator yaitu :

- 1) Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Pemimpin Cabang
- 2) Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Kepala Seksi
- 3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
- 4) Penanganan Benturan Kepentingan
- 5) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
- 6) Penerapan Fungsi Audit Intern

- 7) Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- 8) Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
- 9) Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) Dan Debitur Besar (*Large Exposures*)
- 10) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan Internal
- 11) Rencana Strategis Bank

Dengan penilaian

- | | |
|------------|-----------------------------|
| < 1.5 | = Sangat Baik (Peringkat 1) |
| ≤ NK < 2,5 | = Baik (peringkat 2) |
| ≤ NK < 3,5 | = Cukup Baik (peringkat 3) |
| ≤ NK < 4,5 | = Kurang Baik (peringkat 4) |
| ≤ NK < 5 | = Tidak Baik (peringkat 5) |



1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Pemimpin Cabang

Tujuan menilai:

- a. Integritas dan kompetensi anggota Pemimpin cabang dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi anggota pemimpin cabang ;
- b. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemimpin cabang
- c. Efektivitas penyelenggaraan rapat Pemimpin cabang ;
- d. Kepatuhan pemimpin cabang terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis dan Interpretasi

Peringkat 1.

- a. Integritas dan kompetensi anggota pemimpin cabang sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- b. Pemimpin cabang mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemimpin cabang telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
- d. Rapat pemimpin cabang terselenggara secara sangat efektif dan efisien.
- e. Aspek transparansi pemimpin cabang sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku

Peringkat 2.

- a. Integritas dan kompetensi pemimpin cabang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- b. Mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemimpin cabang telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.
- d. Rapat terselenggara secara efektif dan efisien.

- e. Aspek transparansi pemimpin cabang baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku

Peringkat 3

- a. Integritas dan kompetensi pemimpin cabang cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
- b. Mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemimpin cabang cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif dan terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor.
- d. Rapat pemimpin cabang terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.
- e. Aspek transparansi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.

Peringkat 4

- a. Integritas dan kompetensi pemimpin cabang kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta kurang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- b. Pemimpin cabang bertindak dan mengambil keputusan secara kurang independen.
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemimpin cabang kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG dan terdapat kelemahan penerapan

yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG.

- d. Rapat pemimpin cabang terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien.
- e. Aspek transparansi kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.

Peringkat 5

- a. Integritas dan kompetensi pemimpin cabang tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- b. Pemimpin cabang bertindak dan mengambil keputusan secara tidak independen.
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemimpin cabang tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG yang dapat berakibat pada penurunan kualitas GCG atau penurunan Peringkat Komposit GCG Bank, aspek Manajemen dalam CAMELS, serta Peringkat Komposit CAMELS.
- d. Rapat pemimpin cabang terselenggara secara tidak efektif dan tidak efisien.
- e. Aspek transparansi pemimpin cabang tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/perundangan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Kepala Seksi

Tujuan menilai:

- a. Integritas dan kompetensi anggota Kepala seksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi anggota kepala seksi ;
- b. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala seksi
- c. Efektivitas penyelenggaraan rapat Kepala seksi ;
- d. Kepatuhan kepala seksi terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis dan interpretasi

Peringkat 1.

- a. Integritas dan kompetensi anggota kepala seksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- b. Kepala seksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala seksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
- d. Rapat kepala seksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien.
- e. Aspek transparansi kepala seksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku

Peringkat 2.

- a. Integritas dan kompetensi kepala seksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- b. Mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala seksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.
- d. Rapat terselenggara secara efektif dan efisien.
- e. Aspek transparansi kepala seksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku

Peringkat 3

- a. Integritas dan kompetensi kepala seksi cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
- b. Mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala seksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif dan terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor.
- d. Rapat kepala seksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.

- e. Aspek transparansi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.

Peringkat 4

- a. Integritas dan kompetensi kepala seksi kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta kurang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- b. Kepala seksi bertindak dan mengambil keputusan secara kurang independen.
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala seksi kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG.
- d. Rapat kepala seksi terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien.
- e. Aspek transparansi kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.

Peringkat 5

- a. Integritas dan kompetensi kepala seksi tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- b. Kepala seksi bertindak dan mengambil keputusan secara tidak independen.

- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala seksi tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG yang dapat berakibat pada penurunan kualitas GCG atau penurunan Peringkat Komposit GCG Bank, aspek Manajemen dalam CAMELS, serta Peringkat Komposit CAMELS.
- d. Rapat kepala seksi terselenggara secara tidak efektif dan tidak efisien.
- e. Aspek transparansi kepala seksi tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan /perundangan yang berlaku.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Tujuan menilai:

- a. kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite;
- b. efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite;
- c. efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat Komite.

Analisis dan Interpretasi

Peringkat 1

- a. Komposisi dan kompetensi anggota Komite sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
- b. Pelaksanaan tugas Komite telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
- c. Rekomendasi Komite-Komite, sangat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan pemimpin cabang.
- d. Penyelenggaraan rapat Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara sangat efektif dan efisien.

Peringkat 2

- a. Komposisi dan kompetensi anggota Komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
- b. Pelaksanaan tugas Komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.
- c. Rekomendasi Komite-Komite, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan pemimpin cabang.
- d. Penyelenggaraan rapat Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien.

Peringkat 3

- a. Komposisi dan kompetensi anggota Komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
- b. Pelaksanaan tugas Komite telah berjalan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor.
- c. Rekomendasi Komite-Komite, cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Pemimpin cabang.
- d. Penyelenggaraan rapat Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.

Peringkat 4

- a. Komposisi dan kompetensi anggota Komite kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.

- b. Pelaksanaan tugas Komite berjalan kurang efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG.
- c. Rekomendasi Komite-Komite, kurang bermanfaat dan kurang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan pemimpin cabang.
- d. Penyelenggaraan rapat Komite berjalan kurang sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara kurang efektif dan efisien.

Peringkat 5

- a. Komposisi dan kompetensi anggota Komite tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
- b. Pelaksanaan tugas Komite berjalan tidak efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan peringkat komposit GCG.
- c. Rekomendasi Komite-Komite, tidak bermanfaat dan tidak dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Pemimpin cabang.
- d. Penyelenggaraan rapat Komite berjalan tidak sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara tidak efektif dan efisien.

4. Penanganan Benturan Kepentingan

Tujuan

Untuk menilai efektifitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapan (disclosure)-nya serta dampak benturan kepentingan tersebut terhadap profitabilitas Bank.

Analisis dan Interpretasi

Peringkat 1

- a. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif.
- b. Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik.
- c. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Peringkat 2

- a. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif.
- b. Benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.
- c. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Peringkat 3

- a. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif.
- b. Benturan kepentingan telah cukup diungkap dalam keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.

- c. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Peringkat 4

- a. Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan Bank kurang lengkap dan efektif.
- b. Benturan kepentingan kurang diungkap dalam keputusan, sebagian telah dilengkapi dengan risalah rapat, belum diadministrasikan secara lengkap dan didokumentasikan secara kurang baik.
- c. Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Peringkat 5

- a. Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan tidak lengkap dan efektif.
- b. Benturan kepentingan tidak diungkap dalam keputusan, tidak dilengkapi dengan risalah rapat, tidak diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik.
- c. Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Tujuan menilai:

- a. Tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang;

- b. Menjamin ketersediaan pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang kini di seluruh bidang/jenjang organisasi;
- c. Tersedianya MIS yang memadai.

Analisis dan Interpretasi

Peringkat 1

- a. Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat.
- b. Pelaksanaan tugas dan independensi berjalan sangat efektif.
- c. Melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional.
- d. Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap, kini dan sangat sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

Peringkat 2

- a. Kepatuhan Bank tergolong baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan telah diselesaikan pada masa triwulan penilaian CAMELS Rating.
- b. Pelaksanaan tugas dan independensi berjalan efektif.
- c. Melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional.

- d. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

Peringkat 3

- a. Kepatuhan Bank cukup baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada masa triwulan berikutnya.
- b. Pelaksanaan tugas dan independensi berjalan cukup efektif.
- c. Melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan sebagian satuan kerja operasional.
- d. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia cukup lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

Peringkat 4

- a. Kepatuhan Bank kurang baik dan pernah melakukan pelanggaran yang cukup material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada 2 (dua) masa triwulan berikutnya.
- b. Pelaksanaan tugas dan independensi berjalan kurang efektif .
- c. Melakukan review namun dalam frekuensi yang tidak teratur terhadap kepatuhan sebagian satuan kerja operasional.
- d. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia kurang lengkap, kini dan kurang sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

Peringkat 5

- a. Kepatuhan Bank tidak baik dan sering melakukan pelanggaran yang material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan kemungkinan penyelesaiannya akan memakan waktu lebih dari 2 (dua) masa triwulanan.
- b. Pelaksanaan tugas dan independensi berjalan tidak efektif.
- c. Tidak pernah melakukan review terhadap kepatuhan satuan kerja operasional.
- d. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia tidak lengkap, kini dan tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern

Tujuan menilai :

- a. Kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Analisis dan Interpretasi

Peringkat 1

- a. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan sangat efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan tidak ada kelemahan minor.

- b. SKAI telah menjalankan fungsinya secara sangat independen dan obyektif.

Peringkat 2

- a. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin.
- b. SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.

Peringkat 3

- a. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern cukup sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang apabila tidak segera diatasi dapat menurunkan kualitas pelaksanaan fungsi audit intern.
- b. SKAI menjalankan fungsinya secara cukup independen dan obyektif.

Peringkat 4

- a. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan kurang efektif, pedoman intern kurang sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang cukup signifikan.
- b. SKAI menjalankan fungsinya secara kurang independen dan obyektif.

Peringkat 5

- a. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan tidak efektif, pedoman intern tidak sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang signifikan.
- b. SKAI menjalankan fungsinya secara tidak independen dan obyektif.

7. Penerapan Fungsi Audit Ektern**Tujuan menilai:**

- a. Efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik;
- b. Kualitas hasil audit Akuntan Publik;
- c. Kesesuaian penunjukkan Akuntan Publik dan KAP dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku.

Peringkat 1

- a. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.
- b. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik.
- c. Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Peringkat 2

- a. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan namun terdapat kekurangan minor.
- b. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.

- c. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP telah independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Peringkat 3

- a. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan namun terdapat kekurangan.
- b. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik cukup baik.
- c. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP cukup independen dan cukup memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Peringkat 4

- a. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik kurang efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan dan terdapat kekurangan yang cukup material.
- b. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik kurang baik.
- c. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP kurang independen.

Peringkat 5

- a. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik tidak efektif dan tidak sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan dan terdapat kekurangan yang material.
- b. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik tidak baik.
- c. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP tidak independen.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Tujuan menilai :

- a. Efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya;
- b. Memastikan bahwa telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.

Analisis dan Interpretasi

Peringkat 1

- a. Manajemen sangat efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
- b. Manajemen sangat aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan sangat efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.
- c. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank sangat komprehensif dan sangat sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi Bank.
- d. Manajemen sangat efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sangat sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.
- e. Penerapan pengendalian intern, tidak menunjukkan adanya kelemahan.

Peringkat 2

- a. Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
- b. Manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.
- c. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.
- d. Manajemen efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.
- e. Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi bank.

Peringkat 3

- a. Manajemen cukup efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
- b. Manajemen cukup aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.

- c. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank cukup komprehensif dan cukup sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.
- d. Manajemen cukup efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.
- e. Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan yang tidak material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank.

Peringkat 4

- a. Manajemen kurang efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
- b. Manajemen kurang aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan kurang efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.
- c. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank kurang komprehensif dan kurang sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.
- d. Manajemen kurang efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan

yang berlaku serta kurang sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.

- e. Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank.

Peringkat 5

- a. Manajemen tidak efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
- b. Manajemen tidak aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan tidak efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.
- c. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank tidak komprehensif dan tidak sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.
- d. Manajemen tidak efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.
- e. Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya beberapa kelemahan dan pelanggaran material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif yang menyeluruh akan menimbulkan

pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank atau hampir dipastikan akan menimbulkan kerugian yang material.

9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (related party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposures)

Tujuan Menilai:

- a. penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure);
- b. penerapan manajemen risiko terkait dengan konsentrasi penyediaan dana;
- c. independensi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.

Analisis dan Interpretasi

Peringkat 1

- a. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan sangat lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar .
- b. Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian.
- c. Diversifikasi penyediaan dana sangat merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat tidak signifikan.
- d. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan sangat independen.

Peringkat 2

- a. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
- b. Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun pernah ada pelampauan BMPK, namun telah diselesaikan.
- c. Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.
- d. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.

Peringkat 3

- a. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang cukup up to date, dan cukup lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
- b. Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, karena masih dalam jangka waktu penyelesaian sesuai action plan.
- c. Diversifikasi penyediaan dana cukup merata.
- d. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan cukup independen.

Peringkat 4

- a. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang kurang up to date, kurang lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
- b. Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, tetapi telah melampaui jangka waktu penyelesaian action plan
- c. Diversifikasi penyediaan dana kurang merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana signifikan.
- d. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan kurang independen.

Peringkat 5

- a. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis namun tidak up to date, tidak lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
- b. Ada pelanggaran BMPK dan prinsip kehati-hatian maupun ada pelampauan BMPK yang penyelesaiannya telah melampaui masa 2 (dua) jangka waktu penyelesaian action plan.

- c. Diversifikasi penyediaan dana tidak merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat signifikan.
- d. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan tidak independen.

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pelaporan Internal

Tujuan menilai:

- a. Ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada stakeholders
- b. Efektifitas pengelolaan informasi produk dan jasa Bank, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah;
- c. Cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu;
- d. Cakupan pihak-pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG;
- e. Keandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bank, mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, akurat dan handal

Analisis dan Interpretasi

Peringkat 1

- a. Bank sangat transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage Bank dan media yang sangat mudah diakses.
- b. Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia sangat tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.

- c. Bank sangat transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan sangat efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah dengan sangat memadai.
- d. Cakupan laporan pelaksanaan GCG sangat lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara sangat tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan sangat tepat waktu, akurat, lengkap dan sangat handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

Peringkat 2

- a. Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai.
- b. Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.
- c. Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.
- d. Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.

- e. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

Peringkat 3

- a. Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang cukup mudah diakses.
- b. Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara cukup tepat waktu, lengkap, akurat dan kini.
- c. Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan cukup efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara cukup memadai.
- d. Cakupan laporan Pelaksanaan GCG cukup lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara cukup tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank cukup mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta cukup handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.



Peringkat 4

- a. Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik.
- b. Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia kurang lengkap dan kurang akurat.
- c. Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan kurang efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara kurang memadai.
- d. Cakupan laporan pelaksanaan GCG kurang lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada shareholder kurang sesuai ketentuan yang berlaku/terlambat.
- e. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank kurang mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta kurang handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

Peringkat 5

- a. Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik.
- b. Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tidak lengkap dan kurang akurat.

- c. Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, tidak menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah serta tidak memelihara data dan informasi pribadi nasabah.
- d. Cakupan laporan pelaksanaan GCG tidak lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada shareholder tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank tidak mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta tidak handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

11. Rencana Strategis Bank

Tujuan Menilai :

- a. kecukupan Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) dikaitkan dengan visi dan misi Bank, sasaran strategis serta nilai-nilai perusahaan (corporate value) –nya;
- b. kematangan penyusunan Rencana Bisnis Bank (business plan).

Analisis dan Interpretasi

Peringkat 1

- a. Rencana Bisnis Bank (business plan) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank.
- b. Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) disusun sangat realistis dan telah memperhatikan

seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.

- c. Realisasi Rencana Bisnis sangat sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (*business plan*).
- d. *Low Strategic Risk Rating*.

Peringkat 2

- a. Rencana Bisnis Bank (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (*corporate plan*) Bank.
- b. Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*business plan*) disusun realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.
- c. Realisasi rencana bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (*business plan*).
- d. *Low Strategic Risk Rating* atau *Moderate to Low Strategic Risk Rating*.

Peringkat 3

- a. Rencana Bisnis Bank (*business plan*) cukup sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (*corporate plan*) Bank.
- b. Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*business plan*) disusun cukup realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.

c. Realisasi rencana bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (business plan).

d. *Moderate Strategic Risk Rating*.

Peringkat 4

a. Rencana Bisnis Bank (business plan) kurang sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank.

b. Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) disusun kurang realistis dan kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.

c. Realisasi rencana bisnis kurang sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (business plan).

d. High Strategic Risk Rating atau Moderate to high Strategic Risk Rating.

Peringkat 5

a. Rencana Bisnis Bank (business plan) tidak sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank.

b. Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) disusun tidak realistis dan tidak memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.

c. Realisasi rencana bisnis sangat tidak sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (business plan).

d. High Strategic Risk Rating.

E. Beberapa Penelitian terkait Sebelumnya

Dewasa ini penelitian mengenai pelaksanaan *corporate governance* berkembang dengan adanya tinjauan interaksi antara aspek legal dengan keuangan (*law and finance*). Penelitian La-Porta, Lopez-de-Salines, Shliefer dan Vishny (LLSV, 1997) menunjukkan adanya hubungan antara perlindungan hukum kepada investor dengan bentuk kepemilikan suatu perusahaan. Kurangnya perangkat hukum dalam perlindungan kepentingan pemegang saham dalam suatu negara akan mendorong kepemilikan perusahaan lebih kearah bentuk kepemilikan terkonsentrasi. (Shleifer dan Vishny, 1997). Terkait dengan kinerja usaha, penelitian mengenai hal tersebut masih menunjukkan hasil yang tidak konklusif. Penelitian Demsetz dan Lehn (1985) tidak menemukan bukti adanya hubungan sistematis antara kepemilikan terkonsentrasi dengan laba akuntansi. Sedangkan Demsetz dan Villalonga (2001) menegaskan bahwa kepemilikan terkonsentrasi ataupun tersebar tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja. Dalam hubungannya dengan penelitian masalah keagenan dalam industri perbankan di Indonesia saat ini, isu pokok banyak berkaitan dengan konsentrasi kepemilikan: kepemilikan mayoritas versus minoritas, kepemilikan asing versus domestik, dan kepemilikan swasta versus pemerintah.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa indeks *Good Corporate Governance* Indonesia yang terendah diantara negara-negara Asia Timur lainnya (Djalil, 2000), sekalipun telah dilakukan perbaikan penerapan praktik *corporate governance*. Rendahnya indeks *Good Corporate Governance* di

Indonesia berkaitan dengan rendahnya transparansi di lingkungan bisnis. Menurut *Political & Economis Risk Consultancy* (PERC), lingkungan bisnis di Indonesia relatif tidak transparan (*Asian Intellegence Issue*, 1999) yang menyebabkan berkembangnya praktik perusahaan yang tidak sehat yang sangat merugikan kepentingan pemegang saham pemilik minoritas. Oleh karena itu, penerapan *Good Corporate Governance* sangat penting bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Beberapa studi yang menitik-beratkan pada analisis pengaruh *corporate governance* dan bentuk kepemilikan terhadap kinerja bank diantaranya dilakukan oleh Mehran (2003) dan Berger et.al., (2004) yang menekankan pada operasi perbankan komersial di Amerika Serikat. Mehran (2003) memusatkan studi pada mekanisme *internal corporate governance* sedangkan Berger et.al., (2004) lebih menekankan pada identifikasi masing-masing bentuk kepemilikan dalam kaitannya dengan pelaksanaan *corporate governance*.

Penelitian La Porta, Silanes, Shleifer dan Vishny (2000) tentang *corporate governance* menyimpulkan bahwa penerapan *corporate governance* di setiap negara tidak dapat disamakan. Hal ini mengingat adanya perbedaan dasar bukan sekedar pada struktur *governance*, melainkan juga terkait dengan pengaruh budaya, sosial politik serta model hukum perusahaan yang diterapkan oleh suatu negara di mana korporasi itu berada. Untuk itu LLSV (1999) mengelompokkan berbagai negara berdasarkan atas dasar hukum perusahaan yang digunakan. Kelompok

negara yang tergolong dalam model Anglo Saxon mempunyai hukum komersial berbasis "*common law tradition*", sementara kelompok negara lainnya dianggap berbasis "*civil law tradition*". Dengan tinjauan atas dasar perbedaan "asal hukum korporasi" maka perkembangan governance di setiap negara menjadi relatif berbeda.

Hubungan antara pemegang saham yang merupakan pemilik aktiva dengan manajer sebagai pengelola aktiva, merupakan subyek dalam *corporate governance*. Masalah muncul sebagai akibat pemisahan kepemilikan dengan pengendalian perusahaan dalam bentuk pendelegasian tanggung jawab operasi perusahaan dari pemilik kepada manajer. Hal ini menimbulkan masalah prinsipal agen berupa potensi konflik kepentingan antar pemilik dengan manajer sebagai akibat ketidak-selarasan insentif dan kepentingan diantara keduanya (Gelouff dan Broeder, 1997). Pemisahan kepemilikan dan pengendalian menyebabkan manajer memiliki peluang untuk bertindak untuk kepentingannya atas beban pemilik (Berle dan Means 1932, Jensen dan Meckling 1976). Hart (1995) menegaskan bahwa *corporate governance* timbul ketika masalah keagenan pada internal perusahaan meningkat dan biaya transaksi tidak dapat diselesaikan melalui kontrak secara eksplisit.

Wu dan Cui (2002) meneliti *corporate governance* di China. Dengan sampel yang berjumlah 909 perusahaan, ditemukan perusahaan yang konsentrasi kepemilikannya tinggi pada pemerintah mempunyai laba akuntansi yang lebih baik, tetapi mempunyai kinerja pasar yang lebih jelek.

Berarti pula bahwa tingkat konsentrasi kepemilikan yang tinggi menyebabkan kemakmuran pemegang saham jauh dari yang diharapkan. Secara umum disimpulkan bahwa saham yang diperdagangkan secara tidak bebas akan dapat merugikan pemegang saham.

Firth, Fung, dan Rui (2002) menguji hubungan simultan antara struktur kepemilikan, *corporate governance*, dan kinerja perusahaan. Mekanisme *corporate governance* dalam hal ini meliputi : struktur kepemilikan, dewan komisaris, kompensasi manajerial, utang, dan pasar untuk kontrol perusahaan. Hasilnya menunjukkan *corporate governance* mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan, dan antar mekanisme tersebut saling berhubungan kuat (*interdependence*). Hasil tersebut menunjukkan bukti bahwa mekanisme *corporate governance* bersifat independen dan saling substitusi satu dengan yang lain.

Ang, Cole, dan Lin (2000) menemukan bahwa kepemilikan manajerial ternyata bisa digunakan sebagai *corporate governance* yang dapat mengurangi masalah keagenan. Dengan menggunakan 1708 sampel perusahaan, hasilnya menunjukkan bahwa masalah keagenan meningkat, ketika : a). Perusahaan dimiliki oleh *outsider manager* bukan *insider manager* . b). Jumlah pemegang saham non manajer naik, dan c). Monitoring dari bank berkurang.

Agrawal dan Knoeber (1996) menguji 7 (tujuh) mekanisme kontrol untuk mengurangi masalah keagenan antara manajer dan pemegang saham. Ketujuh mekanisme tersebut adalah : *shareholdings of insiders*, institusi,

large blockholders, direktur luar, kebijakan hutang, pasar tenaga kerja, dan pasar untuk kontrol perusahaan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa terdapat hubungan simultan antara kinerja perusahaan dengan *insider shareholdings*, *outside directors*, utang, dan aktivitas kontrol korporat. Lebih lanjut penelitian mereka juga menunjukkan bahwa semakin tinggi *insider shareholdings*, semakin sedikit *outside directors*, sedikit utang, dan sedikit kontrol pasar korporat maka semakin tinggi kinerja perusahaan. Sementara Keasey, Thompson, dan Wright (1997) menyatakan bahwa ada 7 (tujuh) mekanisme *corporate governance*, yaitu : kepemilikan institusional, kepemilikan manajer, direktur, dewan komisaris, remunerasi, auditing dan informasi, serta pasar. Namun dalam penelitian ini yang akan diuji sebagai mekanisme *corporate governance* adalah kebijakan dividen, utang, dan investasi

Penelitian yang dilakukan oleh Bruns dan Merchant (1990) dan Graham et al. (2005) yang mengindikasikan bahwa pihak manajemen lebih sering melakukan *real earning management* dari pada *accrual management* adalah dengan pertimbangan yakni *accrual manipulation* lebih mengandung risiko yang tinggi. Peneliti lain yaitu Jiraporn et al. (2006) mengelompokkan *earning management* ke dalam dua kelompok yakni *beneficial earning management* dan *opportunistic earning management*. *Earning management* dikatakan bermanfaat bila menggunakan kebijakannya untuk mengkomunikasikan informasi privat yang dimilikinya mengenai prospek perusahaan, dimana hal ini masih belum dicerminkan dalam laporan

keuangan historis perusahaan (Arya, Glover, & Sunder, 2003; Demski, 1998; Subramanyam, 1996; Watts & Zimmerman, 1986). Sedangkan *Earning management* dikatakan oportunistis bila manajer menggunakan kebijakannya untuk memaksimalkan kepentingannya dengan memanipulasi fakta mengenai pendapatannya (Healy & Palepu, 1993).

Klein (2002) juga menemukan bahwa keberadaan komite audit akan mengurangi terjadinya praktik *earning management*. Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Parulian (2004) dalam Siregar dan Utama (2008) mengemukakan terdapatnya hubungan negatif antara discretionary accrual dengan adanya komite audit. Klein (2002) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan menghambat perilaku earnings management oleh pihak manajemen. Hal ini didukung pula oleh penelitian lain yang dilakukan Jaggi dan Leung (2007) menunjukkan bahwa komite audit sangat berperan dalam mengurangi earnings management pada perusahaan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi. Lin (2006) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh keberadaan komite audit dengan earnings management yang menunjukkan terdapatnya hubungan negatif, dimana komite audit dapat mengurangi perilaku earnings management yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Liu dan Zu (2007) melakukan penelitian pengaruh GCG terhadap earnings management, dimana salah satu pengukuran GCG diwakili oleh Top Share yakni pemegang saham mayoritas yang menjadi pemegang saham pengendali (*Controlling shareholder*). Terdapatnya pemegang saham

mayoritas yang menjadi pemegang saham pengendali akan mendorong terjadinya *expropriate* terhadap pemegang saham minoritas. Beberapa Laporan *Corporate Governance* seperti dari McKensey, S&P maupun CLSA menunjukkan bahwa semakin terdispersi kepemilikan saham suatu perusahaan akan mendorong semakin baiknya penerapan GCG dalam perusahaan. Claessen et al. (2000) dan Fan dan Wong (2001) membuktikan bahwa kepemilikan yang terkonsentrasi khususnya pada satu pemilik akan menyebabkan praktik GCG dalam perusahaan menjadi buruk, sehingga akan meningkatkan praktik *earnings management*.

Werner R (2009) Studi Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Praktik *Earnings Management* pada Perusahaan Terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia. Hasil ditemukan bahwa praktik GCG berpengaruh signifikan terhadap praktik *Earning Manajemen* yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Namun dari lima indikator GCG yakni komite audit, komisaris independen, *CEO duality*, *Top Share* dan koalisi pemegang saham, yang berpengaruh signifikan hanya dua yakni *CEO duality* dan *Top Share*. Dualisme antara pemilik yang sekaligus menjadi CEO mendorong peningkatan terjadinya praktik EM. Sementara itu, adanya pemegang saham pengendali yang berbentuk institusi mendorong pengawasan menjadi lebih profesional sehingga berdampak pada penurunan praktik EM. Penelitian ini juga menemukan bahwa *coverage analyst* dan penggunaan utang ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik EM. Keberadaan analis dan penggunaan utang tidak mampu mengurangi praktik EM yang dilakukan

perusahaan. Hasil penelitian juga menemukan bahwa perusahaan di Indonesia banyak yang melakukan EM dengan kecenderungan negatif. Hal ini berarti perusahaan berupaya untuk memperkecil pendapatan yang diterimanya karena adanya faktor pajak.

Peasnell, Pope, dan Young (1998) meneliti efektifitas dewan komisaris dan komisaris independen terhadap manajemen laba yang terjadi di Inggris. Dengan menggunakan sampel penelitian yang terdiri dari 1178 perusahaan tahun sela ma periode 1993-1996, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen membatasi pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba.

Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) meneliti peran dewan komisaris dengan latar belakang bidang keuangan dalam mencegah manajemen laba. Dari penelitian ini diketahui makin sering dewan komisaris bertemu maka akrual kelolaan perusahaan makin kecil. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien negatif yang signifikan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa persentase dewan komisaris dari luar perusahaan yang independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap akrual kelolaan.

Beasley (1996) menyarankan bahwa masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitiannya juga melaporkan bahwa komposisi dewan komisaris lebih penting untuk mengurangi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan, daripada kehadiran komite audit. Analisis lain dalam penelitian ini

menunjukkan bahwa karakteristik komisaris yang berasal dari luar perusahaan (*outsider director*) juga berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.

Veronica dan Utama (2005) meneliti pengaruh praktik *corporate governance* terhadap manajemen laba. Praktik *corporate governance* yang diteliti yaitu proporsi dewan komisaris independen. Hasil dari penelitian ini adalah kesimpulan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.

Boediono (2005) meneliti apakah komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa secara parsial pengaruh *corporate governance* dalam hal ini komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Veronica dan Bachtiar (2004) menemukan bahwa variabel persentase dewan komisaris independen tidak berkorelasi secara signifikan terhadap akrual kelolaan, walau begitu interaksi antar variabel akrual kelolaan dan dewan komisaris independen menunjukkan koefisien positif yang signifikan terhadap return perusahaan. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan makin tingginya persentase dewan komisaris independen maka akrual kelolaan makin berpengaruh terhadap return.

Rudi Isnata (2008) Pengaruh *Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan . Dengan mengambil data berupa laporan keuangan dari perusahaan go public di

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2006. Hasil yang didapatkan adalah Variabel *Corporate Governance*, tidak terbukti berpengaruh secara signifikan positif terhadap terhadap manajemen laba. Variabel *Corporate Governance*, terbukti berpengaruh secara signifikan positif terhadap terhadap kinerja keuangan. Variabel struktur kepemilikan, tidak terbukti berpengaruh secara signifikan positif terhadap terhadap manajemen laba. Variabel struktur kepemilikan, terbukti berpengaruh secara signifikan positif terhadap terhadap kinerja keuangan. Variabel manajemen laba, tidak terbukti berpengaruh secara signifikan positif terhadap terhadap kinerja keuangan.

Morck, Shleifer&Vishny (1988) dalam Bernhart&Rosenstein (1998) yang menguji hubungan antara kepemilikan manajerial dan komposisi dewan komisaris terhadap nilai perusahaan menemukan bahwa nilai perusahaan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan manajerial sampai dengan 5%, kemudian menurun pada saat kepemilikan manajerial 5%-25%, dan kemudian meningkat kembali seiring dengan adanya peningkatan kepemilikan manajerial secara berkelanjutan.

Black et al. (2003) berargumen bahwa pertama, perusahaan yang dikelola dengan lebih baik akan dapat lebih menguntungkan sehingga dapat dividen yang lebih tinggi. Kedua, disebabkan oleh karena investor luar dapat menilai earnings atau dividen yang sama dengan lebih tinggi untuk perusahaan yang menerapkan *corporate governance* yang lebih baik. Hasil menunjukkan bahwa tidak ditemukan bukti bahwa perusahaan dengan

corporate governance yang baik lebih menguntungkan atau membayar dividen yang lebih tinggi, tetapi ditemukan bukti bahwa investor menilai earnings atau arus dividen yang sama dengan lebih tinggi untuk perusahaan yang menerapkan *corporate governance* yang lebih baik.

Supriyatno (2006) Pengaruh *Corporate Governance* dan bentuk kepemilikan terhadap kinerja keuangan Bank di Indonesia. Penelitian yang dilakukan untuk menguji pengaruh *Corporate Governance* dan Bentuk Kepemilikan terhadap Kinerja Keuangan Bank dengan menggunakan pendekatan Teori Keagenan. Penelitian dilakukan melalui pengembangan tiga konstruk yakni (i) *External corporate governance* (ECG) yang mencerminkan kepatuhan bank terhadap regulasi dan supervisi (ii) *Internal Corporate Governance* (ICG) dengan membedakan ICG-pemilik yang mencerminkan kepentingan pemilik (*owner's interest*), dan ICG-manajer yang mencerminkan pengendalian manajer melalui perhatian pemilik terhadap kepentingan manajer (*manager's interest*), dan (iii) Bentuk Kepemilikan dengan pendekatan dispersi kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan sangat menyebar (*dispersed ownership*), kepemilikan terkonsentrasi (*closely held ownership*), dan (c) kepemilikan oleh Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan bank-bank di Indonesia yang masih beroperasi selama periode penelitian dari 1999 hingga 2004. Populasi penelitian adalah seluruh bank berskala nasional di Indonesia. Pertimbangan kisar periode tersebut dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan analisis data. Selain itu, data laporan

keuangan perbankan sebelum 1999 masih dipengaruhi oleh krisis keuangan yang terjadi sejak 1997. Jumlah bank di Indonesia pada tahun 2004 sebanyak 174 bank. Dari jumlah tersebut, 106 bank adalah bank milik swasta belum publik, 24 bank adalah bank milik swasta sudah publik, 5 bank adalah bank milik pemerintah, dan 10 bank adalah bank milik swasta asing dan 29 bank campuran. Pembedaan kelompok bentuk kepemilikan bank dimaksudkan untuk mendukung analisis dalam pengujian hipotesis penelitian. Dari jumlah tersebut diatas, data yang dapat diolah sebanyak 76 bank terdiri dari bank swasta asing (9), bank campuran (13), pemerintah (4), bank swasta terbuka (17), bank swasta tertutup (33). Analisis *External corporate governance* dilakukan dengan menggunakan Model Logit dengan proksi variabel komposit kepatuhan regulasi, sedangkan *ICG*-manajer diproksi dari kepekaan kompensasi terhadap kinerja dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Jensen dan Murphy (1990) dan *ICG*-pemilik menggunakan koefisien variasi Net Interest Margin sebagai proksi *internal corporate governance* yang mencerminkan kepentingan pemilik. Secara umum, hasil penelitian empiris mengenai pengaruh corporate governance dan bentuk kepemilikan terhadap kinerja bank dapat dijelaskan oleh teori keagenan. Namun demikian, terdapat dimensi masalah prinsipal-agen yang lebih kompleks pada industri perbankan yang tidak terdapat pada industri non-keuangan perbankan. Pendekatan masalah keagenan pada industri perbankan dalam konteks corporate governance melalui pendekatan dispersi kepemilikan menunjukkan derajat persoalan keagenan. Analisis *internal*

corporate governance-manajer (ICG-M) memberikan hasil yang tidak signifikan, sedangkan *internal corporate governance*-pemilik (ICG-P) terbatas memberikan hasil signifikan untuk Bank Swasta Tertutup.

Penelitian Theresia (2005) menunjukkan bahwa tindakan manajemen laba merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Manajemen akan memilih metode akuntansi tertentu untuk mendapatkan laba yang sesuai dengan motivasinya. Sedangkan Boediono Gideon (2005) menyatakan bahwa manajemen laba akan sangat mempengaruhi tingkat kualitas kinerja yang dilaporkan oleh manajemen.

Penelitian Cornett et al. (2006) dengan objek penelitian pada perusahaan go public di Indonesia dan menggunakan indikator *corporate governance* yaitu; kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen dan ukuran dewan komisaris. Namun hasil penelitian Warfield, Terry, Wild, dan Wild (1995) berkontradiksi dengan penelitian Gabrielsen, Gorm, Jeffrey dan Thomas (1997) sedangkan Chtourou, Jean, dan Lucie (2001) berkontradiksi dengan penelitian Beasley (1996), Yermarck (1996), dan Jensen (1992).

Warfield et al., (1995) menemukan hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dan *discretionary accruals* sebagai ukuran manajemen laba dan berhubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan kandungan informasi laba. Sedangkan Gabrielsen, et al. (1997) menemukan hasil yang positif tidak signifikan antara kepemilikan manajerial

dengan manajemen laba serta menemukan hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dengan kualitas laba.

Chtourou et al. (2001) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berhubungan negatif dengan manajemen laba. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Beasley (1996), Yermarck (1996), dan Jensen (1993) dimana semakin besar ukuran dewan komisaris maka semakin besar kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Husnan (2000) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain, menemukan bahwa perusahaan yang kepemilikannya lebih menyebar memberikan imbalan yang lebih besar kepada manajemen dibanding dengan perusahaan yang kepemilikannya lebih terkonsentrasi. Xu and Wang (1999) menemukan bahwa kepemilikan saham perusahaan oleh *legal person shareholder* dapat memonitor manajemen secara lebih efektif melalui pengendalian oleh *board of directors*, pemilihan karyawan perusahaan dan pemberian kompensasi terhadap *chief corporate officer*.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Demzet dan Lehn (1985) yang dikutip oleh Xu dan Wang (1999) menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara konsentrasi kepemilikan dan tingkat laba akuntansi untuk 511 perusahaan terbesar di US. Holderness dan Sheehan (1988) menemukan bahwa *Qtohin* lebih tinggi jika perusahaan dimiliki oleh pemegang saham mayoritas, *Qtohin* lebih rendah secara signifikan untuk perusahaan dengan kepemilikan saham mayoritas individual. Mc Connel dan

Servaes (1990) menemukan bahwa Q-tobin berhubungan positif dengan proksi kepemilikan saham oleh investor institusional.

Penelitian mengenai keberadaan dewan komisaris telah dilakukan diantaranya Peasnell, Pope, dan Young (1998) meneliti efektifitas dewan komisaris dan komisaris independen terhadap manajemen laba yang terjadi di Inggris. Dengan menggunakan sampel penelitian yang terdiri dari 1178 perusahaan tahun selam periode 1993-1996, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen membatasi pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba.

Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) meneliti peran dewan komisaris dengan latar belakang bidang keuangan dalam mencegah manajemen laba. Dari penelitian ini diketahui makin sering dewan komisaris bertemu maka akrual kelolaan perusahaan makin kecil. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien negatif yang signifikan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa persentase dewan komisaris dari luar perusahaan yang independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap akrual kelolaan.

Wedari (2004) menguji pengaruh interaksi antara dewan komisaris dan komite audit terhadap praktik manajemen laba. Dengan menggunakan sampel perusahaan non finansial yang listing di BEJ untuk tahun 1994 hingga 2002, Wedari (2004) menunjukkan interaksi dewan komisaris dengan komite audit justru berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian lain yang serupa, artinya dengan adanya dewan komisaris dan komite audit belum berhasil

mengurangi manajemen laba karena keberadaan mereka manajer dapat melakukan manajemen laba dengan lebih leluasa. Setiawan (2006) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan secara positif terhadap kualitas laba (*earnings response coefficient*), artinya dengan adanya komite audit maka perusahaan dapat meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan.

Wilopo (2004) menganalisis hubungan dewan komisaris independen, komite audit, kinerja perusahaan dan akrual diskresioner. Dari penelitian tersebut dilaporkan bahwa kehadiran komite audit dan dewan komisaris independen mampu mempengaruhi secara negatif praktik manajemen laba di perusahaan. Hal ini menandakan bahwa mekanisme *corporate governance* diatas penting untuk menjamin terlaksananya praktik perusahaan yang adil (*fair*) dan transparan.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kerangka Teoritis Hubungan Antar Variabel

Masalah keagenan menyebabkan upaya meningkatkan kinerja perusahaan tidak dapat berjalan secara optimal. Suatu perusahaan mungkin memiliki kinerja lebih baik dari perusahaan lain, namun hal ini bukan berarti bahwa perusahaan dengan kinerja lebih baik menghadapi masalah keagenan lebih rendah daripada perusahaan berkinerja buruk. Hal ini bisa saja disebabkan karena tingkat pencapaian optimal yang berbeda antar kedua perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan yang berkinerja lebih baik mungkin belum mencapai level optimal, sedangkan perusahaan lain telah mencapai derajat optimal. Cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi masalah keagenan tersebut adalah dengan mempelajari upaya-upaya manajemen yang terkait dengan *external corporate governance* dan *internal corporate governance* untuk meningkatkan kinerja bank.

Perbedaan kepekaan kinerja bank terhadap mekanisme *external corporate governance* dan *internal corporate governance* inilah yang dapat digunakan untuk mendeteksi derajat masalah keagenan pada bank dengan bentuk kepemilikan yang berbeda .

Secara lengkap hubungan antar variabel dijelaskan pada Tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1 : Hubungan antar Variabel dan Teori/Penelitian pendukung sebelumnya

Variabel Mempengaruhi		Variabel terikat	Hubungan	Teori/penelitian pendukung sebelumnya
Internal GCG (X1)	1	Manajemen Laba (Y1)	Negatif	Dewatriport dan Tirole (1994), Dechow et al. (1996) dan Beasley (1996), Warfield, Terry, Wild, dan Wild (1995), Chtourou et al. (2001)
	2	Kinerja Perusahaan (Y2)	Positif	John dan Senbet (2000), Houston dan James (1993) dan Saunders, Strock dan Travlos (SST) (1990), Evans, Noe, dan Thorton (1997), dan Knopf dan Teall (1996), Jensen dan Murphy (1990), Melmill dalam Sunarto (2003), Mehran (2003), Berger et.al. (2004) dan Supriyatno (2008)
Eksternal GCG (X2)	1	Manajemen Laba (Y1)	Negatif	Dewatriport dan Tirole (1994), Jensen and Meckling, 1976, Dechow et al. (1996) dan Beasley (1996), Warfield, Terry, Wild, dan Wild (1995), Chtourou et al. (2001)
	2	Kinerja Perusahaan (Y2)	Positif	John dan Senbet (2000), Houston dan James (1993) dan Saunders, Strock dan Travlos (SST) (1990), Evans, Noe, dan Thorton (1997), dan Knopf dan Teall (1996), Delfgaauw dan Dur (2002), Comeo dan Rob (2001), Holmstrom dan Milgrom, 1991; Itoh, 1991, Deni, Khomsiyah dan Rika, 2004
Manajemen Laba (Y1)	1	Kinerja Perusahaan (Y2)	Positif	Dechow et al. (1996) dan Beasley (1996), Theresis (2005), Comett et al. (2006), Warfield, Terry, Wild, dan Wild (1995), Chtourou et al. (2001)

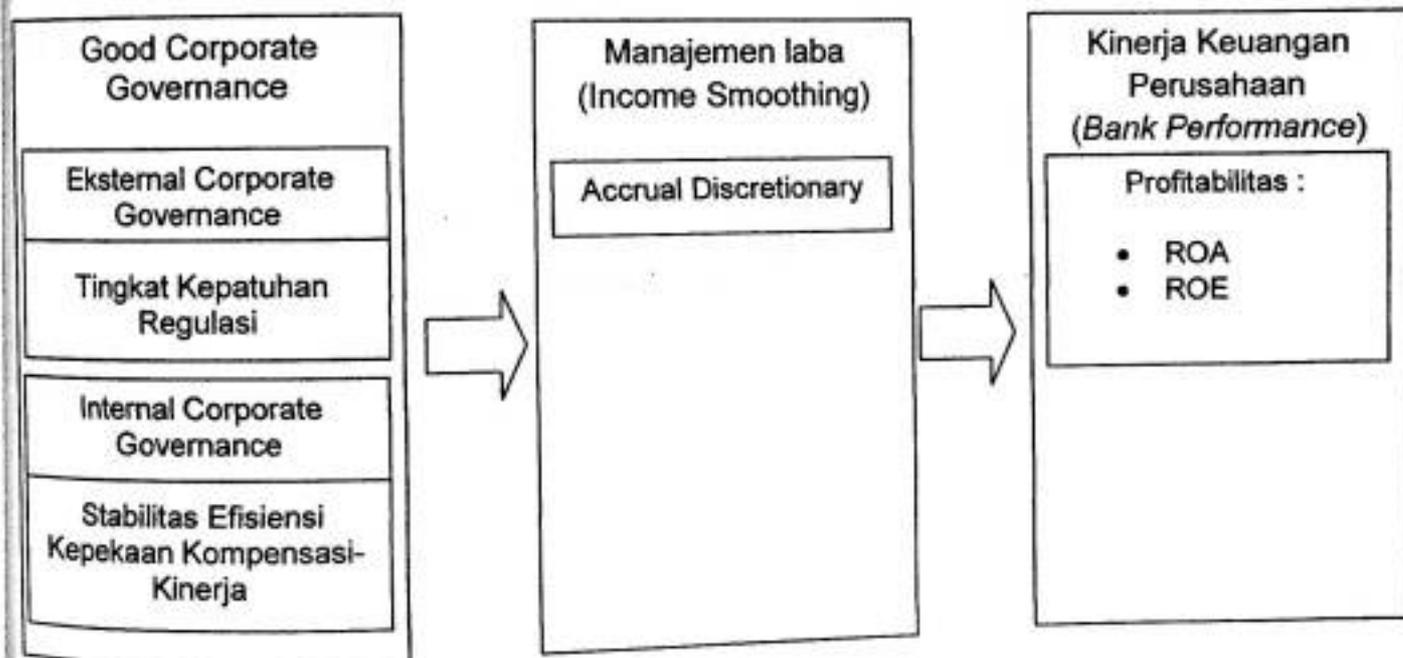
Berhubung banyaknya cabang Bank Sulsel (27 cabang) maka dilakukan analisis indikator indeks yang unsur-unsur terdiri dari 11 indikator yang diadopsi dari prinsip GCG dari yaitu :

- a. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Pemimpin Cabang
- b. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Kepala Seksi
- c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
- d. Penanganan Benturan Kepentingan
- e. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
- f. Penerapan Fungsi Audit Intern
- g. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- h. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
- i. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Debitur Besar (Large Exposures)
- j. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan Internal
- k. Rencana Strategis Bank

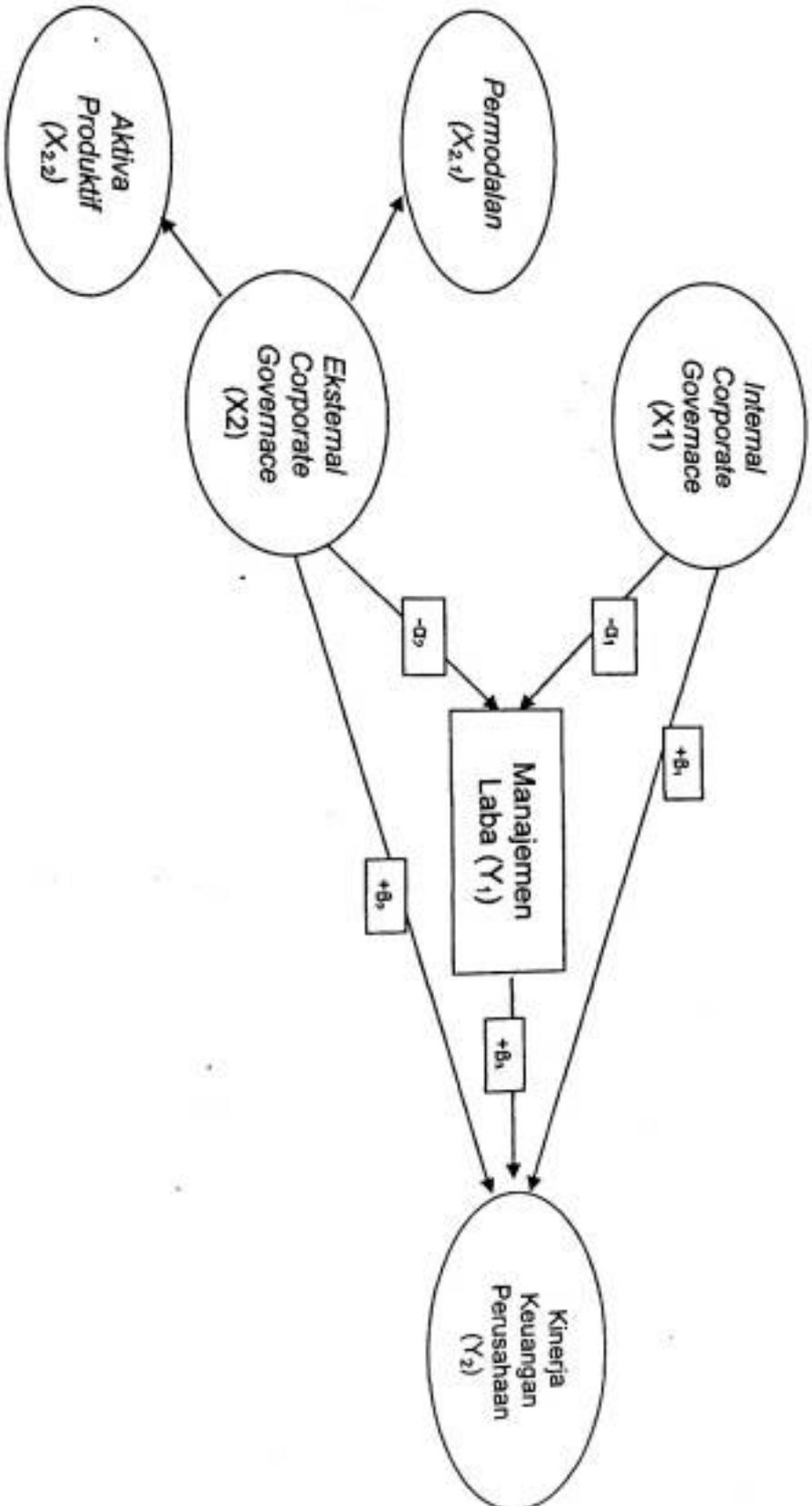
B. Konseptual Penelitian

Pada penelitian ini akan dibangun sebuah model struktural yang didasari oleh kajian teoritik dan empirik dari Jensen dan Murphy (1990), Melvill dalam Sunarto (2003), Mehran (2003), Berger et.al., (2004) dan John dan Senbet (2000), Supriyatno (2006) yang membagi *good corporate governance* menjadi *internal good corporate* dan *eksternal good corporate* pengaruhnya terhadap manajemen laba (*Income smoothing*) dan kinerja keuangan perusahaan oleh Jensen dan Meckling (1976), Fisher dan Rosenzweigh (1995), Healy dan Wahlen (1999), Alijoyo dan Zaini (2004).

Gambar 3.1 Konseptual Penelitian



Pengaruh langsung, tidak langsung dan total variabel digambarkan pada diagram alur sebagai model operasional dalam penelitian ini sebagaimana pada Gambar 3.2 berikut :



Gambar 3.2 : Skema Kerangka Konseptual Penelitian

Sesuai dengan kerangka konseptual pada Gambar 3.2 di atas, maka model yang dibangun adalah :

$$Y_1 = f(X_1, X_2) \quad (1)$$

$$Y_2 = f(X_1, X_2, Y_1) \quad (2)$$

Dimana :

X_1 = *Internal Corporate Governance(ICG)*

$X_{1.1}$ = *ICG - pemilik*

$X_{1.2}$ = *ICG-manajer*

X_2 = *External Corporate Governance*

$X_{2.1}$ = *Permodalan*

$X_{2.2}$ = *Aktiva Produktif*

Y_1 = *Manajemen Laba*

Y_2 = *Kinerja Keuangan Perusahaan*

$Y_{2.1}$ = *Return On Assets*

$Y_{2.2}$ = *Return On Equity*

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan kerangka konseptual penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Cabang-cabang yang mempunyai angka indeks 5 – 1 akan memberikan indikasi bahwa cabang itu berkualifikasi dari tidak baik sampai sangat baik, dan dari kualifikasi yang diperoleh maka manajemen dapat menyusun perencanaan yang akan tergambar dari besarnya laba dari masing masing cabang.
2. Terdapat pengaruh *good corporate governance* yang terdiri atas eksternal corporate governance dan *internal corporate governance* terhadap manajemen laba.
3. Terdapat pengaruh *good corporate governance* yang terdiri atas *internal corporate governance* dan *eksternal corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan.
4. Terdapat pengaruh manajemen laba terhadap kinerja keuangan perusahaan

BAB IV METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan berbagai hal yang berhubungan dengan metode penelitian yang digunakan dalam pengujian hipotesis, antara lain rancangan penelitian, instrumen penelitian, metode pengumpulan data, cara pengolahan data, analisis data dan pengujian hipotesis.

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian, maka penelitian ini merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel atau yang disebut penelitian eksplanatori (*explanatory research*) yaitu penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh antar variabel yang ada dan dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Selain itu, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, karena memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai variabel-variabel yang hendak diteliti.

Dalam penelitian ini akan dianalisis pengaruh *good corporate governance* yang terdiri atas *internal good corporate governance* dan *eksternal good corporate* terhadap manajemen laba dan kinerja perusahaan pada Bank Sulsel di Makassar.

Penelitian ini menggunakan data sekunder secara *pooling data*, yaitu penggabungan dari *times series* dan *cross section*.

B. Populasi, Sampel, Besar Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh kantor cabang maupun cabang utama Bank Sulsel yang berjumlah 27 kantor cabang di 27 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Cooper dan Emory, 1997: 245) dengan menggunakan teknik penggabungan data (*pooling data*) antara *cross section* dengan *time series*.

Untuk pengujian model, maka kriteria sampel yang diambil adalah kantor cabang yang memiliki laporan keuangan 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2006 – 2010. Sehingga jumlah pengamatan adalah 135 unit.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah :

- a. Kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil jawaban kuisisioner *self assesment good corporate governance*
- b. Kuantitatif yaitu data dalam bentuk angka – angka (numeric) yang didapatkan dari 27 laporan keuangan cabang Bank Sulsel selama 5 tahun

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Bank Sulsel dengan menggunakan instrumen kuisisioner
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Bank Sulsel baik dalam bentuk tertulis yaitu berupa dokumen – dokumen laporan keuangan dan informasi tertulis lainnya yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah yang diteliti serta dari akses internet.

D. Metode dan Alat Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menghitung indeks digunakan indikator sekaligus merupakan unsur-unsur yang dapat diukur sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Pemimpin Cabang
 - b. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Kepala Seksi
 - c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
 - d. Penanganan Benturan Kepentingan
 - e. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
 - f. Penerapan Fungsi Audit Intern
 - g. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
 - h. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
 - i. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) Dan Debitur Besar (*Large Exposures*)

j. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan Internal

k. Rencana Strategis Bank

Dengan penilaian

$< 1,5$ = Sangat Baik

$\leq NK < 2,5$ = Baik

$\leq NK < 3,5$ = Cukup Baik

$\leq NK < 4,5$ = Kurang Baik

$\leq NK < 5$ = Tidak Baik

2. Pengukuran Variabel

a. *Internal Corporate Governance-Manajer* adalah representasi kepentingan manajer yang diproksi dari estimasi koefisien parameter. Hasil perhitungan dari *ICG-M* kemudian dicari nilai maksimum dan nilai minimum untuk mendapatkan rentang (*range*). Nilai rentang dibagi menjadi 5 tingkatan.

1. = Sangat Baik

2. = Baik

3. = Cukup Baik

4. = Kurang Baik

5. = Tidak Baik

b. *Internal Corporate Governance-Pemilik* merupakan intervensi langsung pemilik dalam bentuk pengendalian kepada manajer, diantaranya melalui pemilihan dewan direksi yang bertindak atas

nama dan untuk kepentingan pemilik, dan penugasan internal auditor. Proksi ICG-pemilik yang digunakan adalah *net interest margin* (NIM). Hasil perhitungan dari ICG-P kemudian dicari nilai maksimum dan nilai minimum untuk mendapatkan rentang (*range*). Nilai rentang dibagi menjadi 5 tingkatan.

1. = Sangat Baik
2. = Baik
3. = Cukup Baik
4. = Kurang Baik
5. = Tidak Baik

c. *External Corporate Governance*

1) *Permodalan*

- a) Capital adequacy ratio (CAR) :
- b) Aktiva tetap terhadap modal (ATIM):
- c) Rasio Primer (*Primary ratio*, PR):

2) *Aktiva Produktif*

- a) LDR (*loan to deposit ratio* - LDR).
- b) *Quick Ratio* (QR).

Hasil perhitungan dari *External Corporate Governance* kemudian dicari nilai maksimum dan nilai minimum untuk mendapatkan rentang (*range*). Nilai rentang dibagi menjadi 5 tingkatan.

1. = Sangat Baik
2. = Baik
3. = Cukup Baik
4. = Kurang Baik
5. = Tidak Baik

d. Manajemen laba

Pengukuran manajemen laba diproksi dengan rasio akrual modal kerja dengan penjualan

Hasil perhitungan dari manajemen laba kemudian dicari nilai maksimum dan nilai minimum untuk mendapatkan rentang (*range*).

Nilai rentang dibagi menjadi 5 tingkatan.

1. = Sangat Baik
2. = Baik
3. = Cukup Baik
4. = Kurang Baik
5. = Tidak Baik

e. Kinerja perusahaan

Kinerja keuangan diproksi dengan ROA dan ROE. Hasil perhitungan ROA dan ROE kemudian dicari nilai maksimum dan nilai minimum untuk mendapatkan rentang (*range*). Nilai rentang dibagi menjadi 5 tingkatan.

1. = Sangat Baik
2. = Baik
3. = Cukup Baik
4. = Kurang Baik
5. = Tidak Baik

Dari pengukuran interval masing masing variabel di atas memberikan interpretasi semakin besar semakin bagus karena merupakan gambaran kinerja perusahaan.

3. Model persamaan struktural atau *Structural Equation Modeling* (SEM) untuk mengetahui hubungan kausal antar variabel laten yang terdapat dalam persamaan struktural. Alat analisis yang digunakan adalah dengan bantuan *reduced form* dan program aplikasi statistik AMOS ver. 7.0 dan SPSS ver 17.0. Adapun *reduced form* yang digunakan berdasarkan kerangka konseptual sebagai berikut :

a. Pengaruh *internal corporate governance* dan eksternal corporate governance terhadap manajemen laba:

$$Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \epsilon_1 \quad (1)$$

Dimana: α_0 , α_1 , dan α_2 adalah parameter yang akan ditaksir dan ϵ_1 adalah *error term* manajemen laba.

b. Pengaruh *internal corporate governance*, eksternal corporate governance dan manajemen laba terhadap kinerja perusahaan:

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Y_1 + \epsilon_2 \quad (2)$$

Dimana: β_0 , β_1 , β_2 , dan β_3 adalah parameter yang akan ditaksir dan ϵ_2 adalah *error term* kinerja perusahaan. Persamaan (2) dapat disederhanakan menjadi

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 (\alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \epsilon_1) + \epsilon_2$$

$$Y_2 = (\beta_0 + \beta_3 \alpha_0) + (\beta_1 + \beta_3 \alpha_1) X_1 + (\beta_2 + \beta_3 \alpha_2) X_2 + (\beta_3 \epsilon_1 + \epsilon_2)$$

$$Y_2 = \theta_0 + \theta_1 X_1 + \theta_2 X_2 + \mu_2 \quad (2a)$$

Dimana :

$$\theta_0 = (\beta_0 + \beta_3\alpha_0) = \text{konstanta untuk } Y_2$$

$$\theta_1 = (\beta_1 + \beta_3\alpha_1) = \text{total pengaruh } X_1 \text{ terhadap } Y_2$$

$$\theta_2 = (\beta_2 + \beta_3\alpha_2) = \text{total pengaruh } X_2 \text{ terhadap } Y_2$$

$$\mu_2 = (\beta_3\varepsilon_1 + \varepsilon_2) = \text{Error term dari } Y_2$$

Keterangan:

1. Konstanta

$$\alpha_0 = \text{konstanta untuk } Y_1$$

$$\theta_0 = (\beta_0 + \beta_3\alpha_0) = \text{konstanta untuk } Y_2$$

2. Pengaruh langsung (*direct effect*)

$$\alpha_1 = \text{Pengaruh langsung } X_1 \text{ terhadap } Y_1$$

$$\alpha_2 = \text{Pengaruh langsung } X_2 \text{ terhadap } Y_1$$

$$\beta_1 = \text{Pengaruh langsung } X_1 \text{ terhadap } Y_2$$

$$\beta_2 = \text{Pengaruh langsung } X_2 \text{ terhadap } Y_2$$

$$\beta_3 = \text{Pengaruh langsung } Y_1 \text{ terhadap } Y_2$$

3. Pengaruh tak langsung (*indirect effect*)

$$\beta_3\alpha_1 = \text{Pengaruh tak langsung } X_1 \text{ terhadap } Y_2 \text{ melalui } Y_1$$

$$\beta_3\alpha_2 = \text{Pengaruh tak langsung } X_2 \text{ terhadap } Y_2 \text{ melalui } Y_1$$

4. Error term

$$\varepsilon_1 = \text{Error term dari } Y_1$$

$$\mu_2 = (\beta_3\varepsilon_1 + \varepsilon_2) = \text{Error term dari } Y_2$$

E. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Agar variabel yang tercakup dalam penelitian ini dapat memberikan arti yang sama dan dapat diukur, maka dibuat definisi operasional dari masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Indeks *Good Corporate Governance* adalah parameter yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana implementasi *Good Corporate Governance* yang telah diterapkan di Bank Sulsel. Adapun pengukurannya :

Dengan penilaian

< 1,5	= Sangat Baik (Peringkat 1)
≤ NK < 2,5	= Baik (peringkat 2)
≤ NK < 3,5	= Cukup Baik (peringkat 3)
≤ NK < 4,5	= Kurang Baik (peringkat 4)
≤ NK < 5	= Tidak Baik (peringkat 5)

Peringkat ini memberikan interpretasi bahwa semakin sedikit pelanggaran menandakan semakin baik tingkatannya.

2. *Internal Corporate Governance-Manajer* ICG-manajer diproksi dari kepekaan kompensasi terhadap kinerja. Jensen dan Murphy (1990) meneliti tentang kepekaan kompensasi terhadap kinerja. Mereka mendefinisikan kepekaan kompensasi-kinerja, sebagai perubahan uang (kompensasi dan insentif) yang diterima sebagai cerminan kemakmuran manajer yang terkait dengan perubahan kemakmuran pemegang saham.

Kepekaan kompensasi-kinerja (*pay-performance*) tercermin dari koefisien parameter yang diestimasi dengan model regresi kompensasi dan insentif terhadap kemakmuran pemegang saham.

Berdasarkan model Jensen dan Murphy (1990), model untuk mengukur keselarasan kepentingan dalam penelitian ini menggunakan laba operasi sebagai proksi kepentingan pemilik, sedangkan kepentingan manajer tercermin dari pengeluaran untuk personalia. Proksi ini dipilih berdasarkan ketersediaan data laporan keuangan perbankan di BPD Sulsel. Model yang dipakai dalam penelitian ini relatif berbeda dengan model Jensen dan Murphy (1990). Pertama, sistem pemberian bonus dan kompensasi di perbankan Indonesia umumnya mengacu pada kinerja pada masa sebelumnya, sehingga penggunaan dasar kinerja saat ini menjadi kurang relevan. Kedua, terdapat pola yang tidak linear dalam pemberian bonus dan kompensasi di perbankan Indonesia. Artinya, pada level-level tertentu, pergerakan kinerja yang semakin besar tidak selalu diimbangi dengan pergerakan bonus dan kompensasi yang semakin besar pula. Dalam hal ini bonus dan kompensasi akan bergerak lebih lamban setelah kinerja bank melampaui level-level tertentu.

Untuk menekan berkurangnya derajat bebas, model yang dipakai dalam hal ini adalah model linear, menjadi sebagai berikut:

$$ICG_M = \Delta SE_t = \alpha + \beta_i \Delta OP_{t-1} + \varepsilon$$

Dalam hal ini ICG_M adalah *internal corporate governance* sebagai representasi kepentingan manajer yang diproksi dari estimasi koefisien

parameter. ΔSE adalah perubahan biaya personalia (staff expenses), ΔOP adalah perubahan laba operasi (operating profit), sedangkan ΔK adalah konstanta.

3. **Internal Corporate Governance-Pemilik** merupakan intervensi langsung pemilik dalam bentuk pengendalian kepada manajer, diantaranya melalui pemilihan dewan direksi yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan pemilik, dan penugasan internal auditor. Esensi dari *ICG*-pemilik adalah pada faktor efisiensi yakni mencegah manajer melakukan ekspropriasi aktiva. Usaha pemilik untuk senantiasa melakukan pengendalian kepada pihak manajemen agar manajer senantiasa bertindak selaras dengan kepentingannya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa bahwa kesalahan manajemen (mis-management) dan kesempatan untuk melakukan tindak penyelewengan (fraud opportunities) senantiasa dimungkinkan terjadi (Dewatripont dan Tirole, 1994).

Sebagai proksi *ICG*-pemilik digunakan *net interest margin* (NIM) yakni perbedaan antara tingkat bunga pinjaman (lending rate) dengan tingkat bunga simpanan (deposit rate). Dengan kata lain, analisis NIM bertujuan untuk menaksir biaya intermediasi keuangan; yakni perbedaan antara biaya kotor (*gross cost*) yang harus dibayar oleh para debitur kepada bank dan return bersih (*net return*) yang diterima oleh para penyimpan (Brock dan Suarez, 2000). NIM mencerminkan risiko kredit, profitabilitas jangka panjang, biaya administrasi dan biaya pemupukan dana (*cost of loanable funds*) dan nilai valuasi jaminan (*collateral*). Kesemua ini

merupakan cerminan efisiensi manajer dalam mengelola *asset-liabilities management* (ALM) yang selaras dengan kepentingan pemilik. (Andreeva, 2004).

4. *External Corporate Governance*

Variabel-variabel proksi *external corporate governance* yang terkait dengan kepatuhan regulasi dan yang dapat diproksi berdasarkan laporan keuangan meliputi permodalan dan aktiva produktif.

Terdapat dua pandangan mengenai permodalan bank dalam kaitannya dengan aktiva produktif. Pandangan pertama, permodalan yang memperhitungkan bobot risiko masing-masing jenis kategori aktiva-produktif mendorong manajer bank untuk menurunkan portofolio aktiva produktif yang berisiko (lebih) tinggi untuk dialihkan pada jenis aktiva-produktif risiko yang (lebih) rendah. Hasil penelitian Thakor, Passmore dan Sharpe (1994) menegaskan bahwa peningkatan modal akan mendorong bank untuk menurunkan portofolio kredit mereka dan mengalihkan investasi mereka dalam bentuk surat berharga/sekuritas yang mempunyai bobot risiko lebih rendah.

Variabel-variabel proksi *external corporate governance* yang terkait dengan kepatuhan regulasi dan yang dapat diproksi berdasarkan laporan keuangan meliputi permodalan dan aktiva produktif.

Masing-masing indikator kepatuhan regulasi diukur dengan aspek permodalan dan aktiva produktif dengan rumus sebagai berikut:

a. Permodalan:

Salah satu aspek yang paling mendasar dalam pelaksanaan kehati-hatian Bank adalah kecukupan modal. Hal ini menjadi fokus utama dari seluruh otoritas pengawasan Bank di seluruh dunia. Modal yang dimiliki oleh suatu bank pada dasarnya harus cukup untuk menutupi seluruh risiko usaha yang dihadapi bank. Risiko utama yang menjadi perhatian bank antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko likuiditas. Perhitungan modal di Indonesia pada saat ini telah menerapkan Capital Accord 1988 . Adapun indikator yang digunakan adalah :

3) Capital adequacy ratio (CAR) :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}}$$

4) Aktiva tetap terhadap modal (ATIM):

$$\text{ATIM} = \frac{\text{Aktiva Tetap dan Inventaris}}{\text{Modal}}$$

5) Rasio Primer (*Primary ratio*, PR):

$$\text{PR} = \frac{\text{Modal ekuitas}}{\text{Total Aktiva}}$$

b. Aktiva produktif.

Aktiva produktif merupakan penanaman atau penempatan dana bank yang dimaksudkan untuk mendapatkan penghasilan secara langsung. Jenis-jenis penanaman ini antara lain:

1) Penempatan pada bank lain

- 2) Surat-surat berharga
- 3) Kredit yang diberikan
- 4) Penyertaan
- 5) Transaksi rekening Administratif termasuk transaksi derivatif.

Penilaian terhadap aktiva produktif didasarkan pada kriteria atas kualitas dari masing-masing penanaman, yang umumnya diukur dari tingkat kemungkinan diperolehnya kembali penanaman tersebut beserta bunganya (kolektibilitas). Adapun beberapa rasio aktiva produktif antara lain :

- 1) Rasio Aktiva Produktif Terhadap Utang, (*loan to deposit ratio* - LDR). Rasio ini menunjukkan peran dana simpanan masyarakat dalam pembiayaan pinjaman/kredit. LDR yang semakin tinggi menunjukkan semakin kecil porsi *liquid assets* yang dibiayai dengan giro/tabungan/deposito masyarakat.

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Pinjaman Yang Diberikan}}{\text{Total Dana Giro/Tabungan/deposito}}$$

- 2) *Quick Ratio* (QR). Rasio ini menunjukkan kemampuan bank untuk membayar kembali simpanan para penyimpannya dengan alat-alat paling likuid yang dikuasai oleh bank (*cash assets*).

$$\text{QR} = \frac{\text{Aktiva Lancar (Cash Assets)}}{\text{Total Dana Tabungan/deposito}}$$

5. **Manajemen laba** didefinisikan Schipper (1989) sebagai *"the purposeful intervention in the Eksternal financial reporting process with intent obtain*

some private gain." Jadi Schipper (1989) mendefinisikan manajemen laba sebagai intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Defenisi tersebut mengartikan bahwa manajemen laba merupakan perilaku oportunistik manajer untuk memaksimumkan utilitas mereka.

Deteksi manajemen laba dengan menggunakan model Jones yang dimodifikasi (1991) karena Dechow et.al (1995) menyatakan bahwa diantara beberapa model tampaknya yang paling tepat adalah Jones yang telah dimodifikasi karena memberikan kekuatan statistis yang tinggi untuk mendeteksi adanya manipulasi earnings.

Berdasarkan pada kajian McNichols (2000) serta Dechow dan Skinner (2000) maka proksi manajemen laba yang digunakan penulis adalah model spesifik akrual yaitu akrual modal kerja. Penggunaan akrual modal kerja lebih tepat sebagaimana yang telah dikaji oleh Peasnell et al. (2000). Akrual diskresioner tidak diestimasi berdasarkan kesalahan residual karena teknik tersebut dianggap relatif rumit, oleh karena itu digunakan proksi rasio akrual modal kerja dengan penjualan. Alasan pemakaian penjualan sebagai deflator akrual modal kerja adalah karena manajemen laba banyak terjadi pada akun penjualan sebagaimana yang diungkapkan oleh Nelson et al. (2000). Penggunaan penjualan sebagai deflator juga dilakukan oleh Friedlan (1994) yang memodifikasi model DeAngelo (1986) menjadi rasio antara perubahan total akrual dengan

penjualan. Pada penelitian ini manajemen laba diartikan sebagai manajemen penyelarasan laba.

Manajemen laba (ML) = Akruai Modal kerja (t) / Penjualan periode (t)

Akruai modal kerja = $\Delta AL - \Delta HL - \Delta Kas$

Keterangan:

ΔAL = Perubahan aktiva lancar pada periode t

ΔHL = Perubahan hutang lancar pada periode t

ΔKas = Perubahan kas dan ekuivalen kas pada periode t

Data akruai modal kerja dapat diperoleh langsung dari laporan arus kas aktivitas operasi, sehingga investor dapat langsung memperoleh data tersebut tanpa melakukan perhitungan yang rumit.

6. **Kinerja perusahaan** atau bank dapat diproksi dengan beberapa cara. Salah satu ukuran yang paling umum digunakan adalah *return on asset* (ROA). Rasio ini mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan laba berdasarkan sumberdaya total organisasi. ROA diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Aktiva Total}}$$

Proksi lain yang umumnya juga dipakai dalam mengukur kinerja bank dan yang mencerminkan kepentingan pemilik didasarkan pada kemampuan manajer untuk menghasilkan return dari investasi yang dilakukan oleh pemilik (Shleifer dan Vishny, 1997). Penelitian ini menggunakan proksi

return on equity (ROE) untuk mencerminkan kepentingan pemilik yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$



BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Sulsel

1. Sejarah Singkat Bank Sulsel

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (PT. Bank Sulsel) didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dan pada awalnya berbentuk NV (Naamloze Vennootschap) atau Perseroan Terbatas dengan nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara sesuai Akte Notaris Râden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961. Pada tanggal 13 Juli 1961 nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah statusnya menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara pada awal beroperasi pada tahun 1961 menempati Gedung Bank Indonesia, Jalan Nusantara No. 53 kemudian berpindah ke Gedung Bank Summa Jalan Sulawesi No. 91 Makassar. Tujuan pendirian bank adalah untuk mengelola keuangan daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah. Persiapan pendirian bank dilakukan oleh Bapak Syamsuddin Dg. Mangawing yang kemudian menjadi Direktur Utama Pertama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Daerah tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar sebesar Rp. 250.000.000. Adanya pemisahan antara Propinsi Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Proinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara dan adanya penambahan modal dasar maka Perda No. 002 tahun 1964 telah beberapa kali mengalami perubahan dan pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 01 tahun 1993, modal dasar dari Rp.250 juta menjadi Rp. 25 Milyar dengan sebutan Bank BPD Sulsel dengan status sebagai Perusahaan Daerah (PD). Berdasarkan Peraturan Daerah No. 08 tahun 1999 modal dasar ditingkatkan dari Rp. 25 Milyar menjadi Rp. 150 Milyar. Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT), maka lahirlah Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dimana modal dasar ditingkatkan dari Rp. 150 milyar menjadi Rp. 650 Milyar yang Akta Pendiannya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan No. C-31541 HT. 01.01. tanggal 29 Desember 2004 tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan

Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tertanggal 15 Februari 2005, Tambahan Nomor 1655/2005.

2. Visi dan Misi

Visi Perusahaan adalah Menjadi bank yang terbaik di kawasan Indonesia Timur dengan dukungan manajemen dan sumber daya manusia yang professional serta memberikan nilai tambah kepada Pemda dan Masyarakat.

Misi Perusahaan yaitu :

- a. Penggerak dan pendorong laju pembangunan ekonomi daerah.
- b. Pemegang Kas Daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah.
- c. Salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Dalam menjalankan visi dan misinya, PT. Bank Sulsel melakukan aktifitas penghimpunan dan penggunaan dana sebagai berikut :

- a. Penghimpunan dana yang berasal dari simpanan masyarakat dan Pemda berupa:
 - 1) Giro
 - 2) Deposito
 - 3) Tabungan Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah), Tapemda (Tabungan Pembangunan Daerah), dan Tabungan Haji Bank Sulsel.

b. Penggunaan Dana disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat dengan berbagai jenis dan sektor ekonomi yang terdiri atas:

- 1) Kredit Umum; Kredit Investasi Biasa, Kredit Modal Kerja, Kredit Umum Lainnya.
- 2) Kredit Program;

c. Jasa-jasa Bank

Disamping aktifitas penghimpunan dan penggunaan/penyaluran dana, PT. Bank Sulsel juga memberikan jasa-jasa perbankan lainnya antara lain:

- 1) Kiriman Uang
- 2) Inkasso
- 3) Referensi Bank
- 4) Jaminan Bank (garansi bank)
- 5) Penerimaan pembayaran Rekening Telepon, PDAM, Listrik, Pajak.
- 6) Pembayaran Gaji dan Pensiunan.
- 7) Anjungan Tunai Mandiri
- 8) BPS-BPIH
- 9) Perdagangan Valuta Asing

3. Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2010
1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

a) Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. Bank Sulsel terdiri atas 4 (empat) orang yaitu 2 (dua) Anggota Komisaris merupakan perwakilan dari pemegang saham yaitu H. Andi Muallim dan H. Andi Tjoneng Mallobasang dan 2 (dua) Anggota Komisaris lain berasal dari pihak independen yaitu H. Ibrahim Bazergan dan N. Ikawidjaja. Dewan Komisaris ini dipimpin oleh H. Andi Muallim sebagai Komisaris Utama PT. Bank Sulsel.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 30/4/2010 dengan agenda tunggal yaitu "pemilihan Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Sulsel yang telah berakhir masa baktinya" dimana dalam keputusan RUPSLB memutuskan untuk mengangkat kembali H. Andi Muallim sebagai Komisaris Utama dan H. Andi Tjoneng Mallombasang sebagai Komisaris. Dalam RUPSLB tersebut, juga memutuskan untuk menerima seluruh penyelesaian dan pertanggungjawaban (*Acquiet de charge*) dalam masa/periode jabatan sebelumnya.

Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut telah dinyatakan dalam Akta notaris sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dengan nomor Akta Berita Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sulsel

Nomor 61 Tanggal 30 bulan April tahun 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Rakhmawati Laica Marzuki., S.H., Notaris di Makassar.

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. Bank Sulsel tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Disamping itu, semua anggota Komisaris merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Kesemua anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Indonesia khususnya Kota Makassar, sehingga hal ini mempermudah tugas utama dari Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Direksi dalam menjalankan operasional bank.

Secara garis besar Dewan Komisaris Perseroan bertugas melakukan pengawasan pengurusan perseroan oleh Direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Adapun rincian tugas Dewan Komisaris yang telah dilakukan adalah:

- a. Dewan Komisaris memastikan terselenggarakannya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi;
- b. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawan Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- c. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank;
- d. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali terhadap keputusan-keputusan yang mewajibkan dimintakan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan;
- e. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi Perseroan telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Group Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia;
- f. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independent;
- g. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pengangkatan anggota untuk 3 (tiga) Komite tersebut telah dilakukan oleh Direksi dengan Surat Keputusan yaitu :

- 1) Komite Audit, SK Direksi No. SK/072/DIR Tanggal 7 Juli 2010;
- 2) Komite Pemantau Risiko (KOMENKO), SK Direksi No. SK/070/DIR Tanggal 7 Juli 2010;
- 3) Komite Remunerasi dan Nominasi, SK Direksi No. SK/071/DIR Tanggal 7 Juli 2010.

Direksi membuat Surat Keputusan Pengangkatan tersebut berdasarkan kepada Keputusan rapat Dewan Komisaris.

- h. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif;
- i. Dewan Komisaris Perseroan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja, waktu kerja dan rapat;
- j. Dan Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal.

Jumlah rapat intern Dewan Komisaris yang dilaksanakan selama tahun 2010 adalah sebanyak 7 (tujuh) kali dengan kehadiran untuk H. Andi Muallim sebanyak 4 (empat) kali, H. Andi Tjoneng Mallombasang, H. Ibrahim Bazergan dan N. Ikawidjaja masing-masing sebanyak 7 (tujuh) kali. Untuk rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi selama tahun 2010

adalah 5 (lima) kali dengan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris, yaitu H. Andi Muallim sebanyak 1 (satu) kali, H. Andi Tjoneng Mallobasang dan H. Ibrahim Bazergan sebanyak 5 (lima) kali sedangkan N. Ikawidjaja sebanyak 4 (empat) kali.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan secara musyawarah mufakat atau berdasarkan kepada suara terbanyak apabila secara musyawarah mufakat tidak tercapai. Kesemua rapat Dewan Komisaris Perseroan telah dibuatkan risalah rapatnya, didokumentasikan dengan baik termasuk apabila ada *dissenting opinions*. Seluruh hasil atau notulen rapat tersebut telah dibagikan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. Notulen rapat Dewan Komisaris yang merupakan rekomendasi atau nasihat telah disampaikan kepada Direksi dalam bentuk surat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada PT. Bank Sulsel dan Bank lainnya. Selain itu, seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali PT. Bank Sulsel yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

Terkait dengan remunerasi dan fasilitas lainnya, semua fasilitas dan remunerasi Anggota Dewan Komisaris telah memperoleh persetujuan dari RUPS dan telah sesuai dengan aturan intern perseroan serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari perseroan selain remunerasi yang telah disetujui RUPS dan fasilitas yang disediakan oleh Perseroan.

Tidak pernah terjadi benturan kepentingan terkait dengan pemanfaatan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan/Bank.

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sebagaimana diungkapkan dalam CV (*Curriculum Vitae*) masing-masing anggota Dewan Komisaris dan telah lulus *fit and Proper Test* oleh Bank Indonesia.

b) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pada tahun 2010 jumlah anggota Direksi adalah 4 (empat) orang, yang terdiri atas :

- Direktur Utama : Ellong Tjandra
- Direktur Kepatuhan : H. Harris Saleng
- Direktur Pemasaran : H. A. Muhammad Rahmat
- Direktur Umum : H. Yannuarfachrudin

Keseluruhan anggota Direksi berdomisili di Indonesia khususnya di Kota Makassar dan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi tersebut telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah lulus *Fit and Proper Test* oleh Bank Indonesia serta masing-masing anggota Direksi tersebut memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif.

Direksi Perseroan tidak sedang merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, Perusahaan dan atau lembaga lainnya serta tidak memiliki saham melebihi 25 % (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain, baik itu secara sendiri atau bersama.

Mayoritas anggota Direksi merupakan pihak independent dalam artian bahwa tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan Anggota Dewan Komisaris.

Direksi Perseroan sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya telah mengangkat anggota Komite, dimana Komite tersebut terdiri atas 3 (tiga) yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang didasari atas keputusan rapat Dewan Komisaris.

Dalam pelaksanaan tugasnya Direksi Perseroan tidak pernah membuat surat kuasa umum kepada pihak lainnya untuk menjalankan tugas dan fungsi dari Direksi tersebut sehingga dapat dinyatakan bahwa Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan Kepengurusan Bank. Adapun rincian tugas dan tanggungjawab Direksi yang telah dilakukan adalah :

- a. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurus bank;
- b. Direksi mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Direksi melaksanakan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (CGC)* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau Jenjang organisasi;
- d. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern bank, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia;
- e. Telah dibentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Resiko serta Satuan Kerja Kepatuhan oleh Direksi;

- f. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi telah dibentuk beberapa komite, yaitu Komite Kredit, Komite Manajemen Risiko, *Asset and Liability Committee (ALCO)*, Komite Manajemen Kepegawaian;
- g. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi telah mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemegang saham dan pertanggungjawabannya telah diterima;
- h. Setiap kebijakan-kebijakan strategis yang dibuat oleh Direksi baik itu dalam Surat Keputusan dan atau Surat Edaran, Direksi telah disampaikan kepada para Karyawan/ti Perseroan melalui media yang mudah diketahui oleh Karyaan/ti Perseroan.
- i. Penggunaan Konsultan baik secara perorangan atau berkelompok tidak pernah dilakukan kecuali untuk permasalahan-permasalahan tertentu seperti, Penggunaan Konsultan untuk Penanganan perubahan nama perseroan, Konsultan dalam pembangunan ruangan data centre, penggunaan penasehat hukum untuk menangani kasus penggelapan kredit pada cabang Pasangkayu di Pengadilan;

- j. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
- k. Direksi Perseroan telah memiliki buku pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.

Dalam menetapkan suatu kebijakan dan keputusan strategis Direksi selalu melalui mekanisme rapat. Dimana pengambilan keputusan rapat Direksi tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat dan apabila jumlah suara sama maka Direktur Utama yang menentukan sebagai pemimpin rapat.

Selama tahun 2010, Direksi PT. Bank Sulsel telah melakukan rapat sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali, dengan rincian sebagai berikut : Ellong Tjandra/Direktur Utama dengan kehadiran 39 kali, H. Yanuar Fachruddin/Direktur Umum 38 kali, H. A.M. Rahmat Alimuddin/Direktur Pemasaran 39 kali, H. Harris Saleng/Direktur Kepatuhan 36 kali.

Setiap hasil rapat Direksi terkait dengan kebijakan telah di buat Surat Keputusan Direksi dan pelaksanaan dari Surat Keputusan tersebut telah dibuat dalam bentuk Surat

Edaran yang juga ditandatangani oleh Direksi. Surat Edaran tersebut berisikan tata cara pelaksanaan dari Surat Keputusan Direksi.

Direksi Perseroan tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian atau mengurangi keuntungan bank dan semua fasilitas dan remunerasi Direksi tersebut merupakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Secara keseluruhan Direksi PT. Bank Sulsel memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Untuk Posisi Jabatan Direktur Utama Perseroan diisi oleh Pihak Independent dalam artian bahwa Direktur Utama yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan maupun kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali yaitu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

2) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Perseroan memiliki 3 (tiga) Komite yang bekerja pada hari senin dan kamis dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Komite tersebut terdiri atas:

- Komite Pemantau Risiko;
- Komite Remunerasi dan Nominasi;
- Komite Audit.

Keanggotaan ketiga komite diatas tersebut diangkat dan diberhentikan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan seluruh anggota komite merupakan pihak independen, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Ketua dari Komite tersebut merupakan anggota-anggota Dewan Komisaris, sementara anggota-anggota Komite lainnya berasal dari Pihak luar yang memiliki kreditibilitas yang baik dan independent serta berstatus honor. Kepada anggota-anggota Komite tersebut diberikan honorium setiap bulannya yang ditentukan oleh perseroan.

1. Komite Audit

a. Struktur Komite Audit

Komite Audit Perseroan terdiri dari 3 (tiga) orang, dimana 1 (satu) orang berasal dari Komisaris Independent, 2 (dua) orang berasal dari luar yang ahli pada bidang akuntansi dan keuangan dan perbankan serta kedua anggota komite audit tersebut berasal dari pihak independen.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/072/DIR/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010 yang kemudian diperbaiki dengan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/077/DIR/VII/2010 Tanggal 13 Juli 2010 yang susunannya adalah sebagai berikut:

1. Drs. H. Ibrahim Bazergan, Msi, sebagai Ketua (Komisaris Independen);
2. Drs. As'ad Makarau sebagai Anggota;
3. Dra. Hj. Sulaeha Achmad, sebagai Anggota.

Anggota Komite Audit diangkat untuk masa kerja 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode selanjutnya.

Ketua Komite Audit merangkap sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi, hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan PBI Tentang *Good Corporate Governance (GCG)* Pasal 42. Anggota Komite Audit atas nama **As'ad Makarau** diangkat juga sebagai anggota Komite Pemantau Risiko. Perangkapan jabatan tersebut tidak dilarang oleh PBI GCG, bahkan diperbolehkan sesuai dengan SE BI No. 9/12 Perihal pelaksanaan GCG halaman 17.

Adapun status kepegawaian anggota Komite Audit (kecuali Ketua Komite) ditetapkan dengan status honor dan

kepadanya diberikan honorarium setiap bulannya serta memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

Anggota Komite Audit ini tidak ada yang berasal dari Direksi dari Bank Sulsel maupun Bank lainnya dan seluruh Pihak Independen pada Komite Audit tidak memiliki hubungan Keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

**b. Tugas dan Tanggung Jawab serta Pelaksanaannya
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**

Selama tahun 2010, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam PBI tentang GCG, dan yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 002/DK-BPDSS/XI/2007 Tanggal 26 November 2007 tentang Pedoman dengan rincian pekerjaan, sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi kesesuaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) GAI (Umum dan Khusus), dengan standar penyusunan laporan audit menurut SPFAIB dan Audit Charter;
2. Melakukan evaluasi dan membandingkan realisasi pelaksanaan audit GAI pada cabang-cabang dan

Kantor Pusat dengan Perencanaan Audit GAI sebagaimana yang tercantum dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang telah disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris;

3. Merekomendasikan penunjukan Akuntan Independen untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan tahun buku 2010;
4. Melakukan evaluasi atas temuan-temuan audit GAI tahun sebelumnya (audit intern dan ekstern) yang belum ditindaklanjuti;
5. Melakukan evaluasi terhadap temuan hasil pemeriksaan tahun ini (tahun berjalan).

Penerapan tugas dan tanggungjawab Komite Audit dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 002/DK-BPDSS/XI/2007 Tanggal 26 November 2007 tentang Pedoman dan Tata Tertib Komite-Komite pada Dewan Komisaris PT. Bank Sulsel.

Rapat-rapat intern maupun rapat dengan unit kerja lainnya antara lain GAI yang dilakukan Komite Audit terkait dengan pelaksanaan tugasnya untuk tahun 2010 berjumlah 13 (tiga belas) kali yang terdiri atas Rapat Intern sebanyak 11 (sebelas) kali dan rapat dengan GAI sebanyak 2 (dua) kali.

Kesemua rapat tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Bank dimana keseluruhan dari rapat tersebut dihadiri oleh anggotanya yang juga merupakan Komisaris Independent dan Pihak Independent dengan tingkat kehadiran lebih dari 51 % (lima puluh satu persen). Keputusan yang diambil dari rapat tersebut dilakukan secara musyawarah dan mufakat dan telah dibuatkan risalah rapat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat serta keputusan rapat tersebut merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris. Risalah rapat tersebut disimpan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

c. Rekomendasi Komite Audit Kepada Dewan Komisaris

Selama Tahun 2010, laporan hasil Audit GAI yang dievaluasi oleh Komite audit yang juga merupakan laporan hasil audit yang diterima dalam Tahun 2010, adalah sebanyak:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) GAI PKAT 2009

(Carry Over):

- LHP Khusus GAI Cabang : 5 Laporan
- LHP umum GAI Kantor Pusat : 1 Laporan

2. LHP GAI Progam Kerja Audit Tahunan 2010

- LHP Umum GAI Cabang : 24 Laporan

3. LHP Khusus GAI : 10 Laporan
4. LHP BI-RTGS : 1 Laporan

Berdasarkan LHP tersebut diatas Komite Audit telah melakukan evaluasi untuk menilai kinerja dari Group Audit Intern (GAI) dan kesimpulan Komite Audit atas kinerja GAI adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan laporan hasil audit belum sepenuhnya disusun sesuai dengan standar penyusunan laporan sebagaimana yang diatur/ditetapkan dalam SPFAIB dan *Audit Charter*;
- b. Jadwal pelaksanaan audit tidak konsisten dengan jadwal rencana audit yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT);
- c. Masih terdapat temuan-temuan hasil pemeriksaan yang lalu yang belum ditindaklanjuti pada cabang-cabang;
- d. Sebagian besar temuan-temuan GAI didominasi oleh pelanggaran ketentuan yang berlaku dan kelemahan administrasi. Terhadap temuan-temuan tersebut, GAI hanya merekomendasi untuk melakukan pembenahan tindak lanjut. GAI tidak memberikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran ketentuan/SOP yang berlaku, akibatnya temuan-temuan tersebut (temuan yang sama) berulang setiap tahun;

- e. *Risk Based Audit* yang diungkapkan dalam laporan GAI belum sesuai dengan buku pedoman;
- f. Laporan audit khusus belum mengungkapkan secara lengkap mengenai Dasar Audit dan tujuan Audit. Kesimpulan GAI tidak mengungkapkan secara lengkap modus operandi dan kriterianya.

Terhadap laporan yang diterima Komite Audit atas laporan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik terhadap laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini yaitu PSAK 50 dan 55.

Untuk pelaksanaan tindak lanjut atas hasil temuan tahun 2009 dari Group Audit Intern, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia, Komite Audit menyimpulkan bahwa terdapat temuan-temuan tersebut yang tidak dilaksanakan oleh Direksi.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas maka Komite Audit memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Adapun jumlah rekomendasi yang telah disampaikan oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris adalah sebanyak 6 (enam) rekomendasi.

2. Komite Pemantau Risiko

a. Struktur Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulsel Nomor SK/070/DIR/VII/2010 Tanggal 7 Juli 2010

mengangkat 3 (tiga) orang sebagai anggota dari Komite Pemantau Risiko, yang terdiri atas:

1. Drs. Natali Ikawidjaja, MM sebagai Ketua
2. Drs. H. Muslimin Abbas, Msi sebagai anggota dan
3. Drs. Asad Makarau, sebagai anggota.

Ketua Komite Pemantau Risiko merupakan Komisaris Independen PT. Bank Sulsel dan Drs. H. Muslimin Abbas, Msi merupakan ahli dibidang Manajemen Risiko dan Drs. Asaad Makarau adalah ahli dibidang akuntansi dan keuangan. Keseluruhan anggota Komite Pemantau Risiko merupakan pihak independen serta memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik sebagai disebutkan dalam CV masing-masing anggota.

Anggota Komite Pemantau Risiko ini tidak ada yang berasal dari Direksi dari Bank Sulsel maupun Bank lainnya dan seluruh Pihak Independen pada Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan Keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

b. Tugas dan Tanggungjawab serta Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Komite Pemantau Risiko

Adapun tugas dan tanggungjawab dari Komite Risiko sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Sulsel Nomor 002/DK-BPDSS/XI/2007 Tanggal 26 November 2007 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
3. Memberikan rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi pada point 1 dan 2 diatas, kepada Dewan Komisaris.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2010, Komite Pemantau Risiko telah melakukan rapat yang juga merupakan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko baik secara intern maupun dengan Group Manajemen Risiko, Group Treasury dan Group Informasi Teknologi, Komite

Manajemen Risiko. Adapun frekuensi rapat-rapat tersebut selama tahun 2010 adalah 21 (dua puluh satu) kali rapat/pertemuan dengan tingkat kehadiran dari pihak independent lebih dari 51 % (lima puluh satu persen) sesuai dengan kebutuhan bank.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan Komite Pemantau Risiko telah mengikuti beberapa workshop, adapun workshop tersebut adalah :

- (a) Workshop Audit Berbasis Risiko, Implementasi PSAK 50/55;
- (b) Workshop Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi "Tinjauan Pelaksanaan Tugas";
- (c) Workshop/Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko.

c. Rekomendasi Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris

Selama tahun 2010 Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris sebanyak 47 (empat puluh tujuh) rekomendasi.

Adapun garis besar dari rekomendasi tersebut adalah :

1. Pembelian dana yang mahal yang bunganya berkisar antara 9 – 10.5 % dan kemudian ditempatkan dengan bunga rendah;
2. Terdapat kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2010 yang tidak didukung dengan dana dalam rencana bisnis sehingga berpotensi menimbulkan risiko operasional;
3. Denda yang mengalami peningkatan tajam daripada tahun sebelumnya;
4. Perlunya dilakukan inventarisasi terhadap nasabah dan status agunan ekstra countable dan melakukan evaluasi terhadap ekstra countable yang tidak bisa lagi ditagih, dan juga agar melakukan penagihan secara efektif terhadap kredit yang bermasalah;
5. Agar penetapan suku bunga hendaknya berpedoman pada Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan;
6. Kebijakan dibidang Manajemen Risiko perlu disempurnakan;
7. Laporan profil risiko yang disampaikan ke Bank Indonesia cenderung bersifat pemenuhan peraturan perundang-undangan semata tanpa memperhatikan keadaan yang sebenarnya;

8. Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap rekomendasi (tindak lanjut hasil pemeriksaan) tidak merespons dan memperbaiki kinerjanya sehingga temuan-temuan/kekurangan yang terjadi tidak dapat teratasi/dieleminir.
9. Kurangnya pengendalian dan perhatian Direksi terhadap hasil evaluasi unit kerja kepatuhan.
10. Mengurangi konsentrasi Dana Pihak Kedua pada satu nasabah, menghilangkan praktek mismatch pembelian dana dan pemantauan arus kas likuiditas secara cermat dan terukur.
11. Segera dilakukan penataan dan penyempurnaan kebijakan manajemen risiko dan standard and operating proseduce (SOP) untuk setiap group.
12. Mengevaluasi dan mengefektifkan upaya-upaya peningkatan penerimaan Dana Pihak Ketiga, terutama yang bersumber dari tabungan (dana murah) yang telah berjalan diantaranya terhadap team pendanaan (funding) yang merupakan tenaga outsourcing, target cabang, target untuk setiap pegawai bank.

13. Limit risiko suku bunga pembelian dana ditetapkan maksimal sesuai dengan penetapan suku bunga LPS.
14. Keputusan Direksi tentang limit suku bunga hendaknya mencantumkan Keputusan dan/atau Surat Edaran LPS sebagai konsideran.
15. Sanksi yang tegas dan jelas yang bisa menimbulkan efek jera terhadap pegawai yang melakukan *fraud* atau tindak kejahatan dibidang perbankan.
16. Tetap berpedoman pada rencana bisnis untuk menjalankan kegiatan operasional bank.
17. Meningkatkan intensitas operasional, sesuai yang diamanahkan dalam rencana Bisnis, sehingga target dapat direalisir, yang pada gilirannya target tahun 2010 dapat diwujudkan.
18. Inventarisasi nasabah dan status agunan dan estimasi Kredit yang tidak bisa ditagih kembali.
19. Langkah-langkah kongkrit penagihan kredit macet.
20. Mengefektifkan tugas-tugas satuan khusus yang menangani kredit bermasalah, dan kredit macet melalui pembentukan kelembagaan yang bersifat

ad hoc, yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi terkait.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris PT. Bank Sulsel pada bulan Juni 2008 telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi, dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulsel Nomor SK/94/DIR/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 Tentang pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulsel. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/071/DIR/VII/2010 Tanggal 7 Juli 2010, maka susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah :

- Drs. H. Ibrahim Bazergan Msi sebagai Ketua
- Drs. H. A. Tjoneng Mallombasang sebagai anggota
- Dan Pimpinan Group Sumber Daya Manusia juga sebagai anggota

Rapat yang dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Bank dimana keseluruhan dari rapat tersebut dihadiri oleh anggotanya yang juga merupakan Komisaris Independent dan Pihak Independent dengan tingkat kehadiran lebih dari 51 % (lima puluh satu persen) termasuk Pemimpin Group Sumber Daya Manusia. Selama tahun 2010 Komite

Remunerasi dan Nominasi telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

Keputusan yang diambil dari rapat tersebut dilakukan secara musyawarah dan mufakat dan telah dibuatkan risalah rapat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat apabila ada serta keputusan rapat tersebut merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris. Risalah rapat tersebut disimpan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

b. Tugas dan Tanggungjawab serta Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Komite Remunerasi dan Nominasi
Adapun tugas dan tanggungjawab dari Komite Remunerasi

dan Nominasi adalah :

a. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi

01. Melakukan Evaluasi terhadap kebijakan remunerasi

02. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai

- Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS.
- Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

b. Terkait dengan Kebijakan Nominasi

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.
- c. Wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan :
1. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Prestasi kerja Individual;
 3. Kewajaran dengan peer group;
 4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank.

Adapun pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi dalam tahun 2010 adalah :

- a. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi



1. Melakukan kajian terhadap usulan Direksi perihal penyesuaian lumpsum Perjalanan Dinas;
 2. Melakukan kajian atas surat Direksi perihal fasilitas pembayaran tagihan biaya listrik, telepon, handphone kepada Direksi dan biaya handphone Dewan Komisaris;
 3. Melakukan kajian atas Surat Direksi perihal fasilitas pembayaran biaya tagihan listrik, air, phone and handphone untuk pemimpin cabang, biaya handphone untuk pemimpin Group, pejabat setara Job Group range JG 09 s/d Job Group 12, serta Sekretariat Dekom;
 4. Melakukan kajian atas surat Direksi perihal permohonan sewa Kendaraan;
 5. Melakukan pembahasan tentang uang cuti pegawai;
 6. Pembahasan mengenai perabot rumah Direksi
 7. Pembahasan/kajian rencana pembayaran THT
- b. Terkait dengan kebijakan nominasi
- Mengusulkan kepada Dewan Komisaris tentang penyelenggaraan RUPS Tahun 2010 kiranya dikaitkan dengan penyelenggaraan RUPS LB, sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan 2

(dua) orang Komisaris non Independen dan yang masing-masing mewakili pemegang saham provinsi dan pemegang saham Kabupaten/Kota.

c. Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas khususnya Point 2.3.2. maka Komite Pemantau dan Nominasi telah memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Adapun jumlah rekomendasi yang telah disampaikan oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris adalah sebanyak 8 (delapan) rekomendasi.

3) Penanganan Benturan Kepentingan

Selama tahun 2010, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai PT. Bank Sulsel berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari adanya benturan kepentingan di segala aspek sehingga dapatlah dikatakan bahwa selama tahun 2010 tidak ditemukan adanya benturan kepentingan diantara *stake holders*.

4) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Bank Sulsel telah mempunyai Direktur Kepatuhan, dengan tanggungjawab utama untuk memastikan kepatuhan perseroan terhadap Peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam aktifitas bisnis dari PT. Bank Sulsel.

Tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan selama Tahun 2010 adalah :

1. Menerapkan uji kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan produk program yang akan diterbitkan dan pemberian kredit yang memerlukan persetujuan dari Direksi;
2. Memantau rasio regulatory parameter dan penyampaian laporan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
3. Melakukan pemantauan dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen terhadap Bank Indonesia termasuk mengawasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Bank Indonesia.
4. Memantau dan meminimalisasi terjadinya penyimpangan.
5. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan bahwa Bank Sulsel telah memenuhi seluruh peraturan dan perundang yang berlaku sejalan dengan prinsip kehati-hatian Bank Sulsel.
6. Menyusun dan penyempurnaan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
7. Menyampaikan laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus lainnya kepada Bank Indonesia dan Pihak eksetern lainnya.

Pelaksanaan tugas dari Direktur Kepatuhan merupakan pengawasan secara *ex ante* dengan cara mencegah manajemen bank untuk tidak menempuh kebijakan dan/atau keputusan terhadap suatu peristiwa yang mengandung unsur ketidakpatuhan.

Dalam pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dibantu oleh Group Kepatuhan yang bersifat independen terhadap group kerja operasional lainnya dengan tugas sebagai berikut :

- (a) Mendistribusikan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan atau otoritas lainnya sekaligus melakukan sosialisasi kepada group terkait;
- (b) Melaksanakan kajian terhadap kebijakan dan atau peraturan-peraturan internal;
- (c) Mengumpulkan dan menyediakan peraturan-peraturan internal Bank Sulsel;
- (d) Melakukan kajian terhadap setiap perjanjian-perjanjian yang dilakukan Bank Sulsel dengan pihak ketiga;
- (e) Membuat laporan atas hasil uji kepatuhan dan melakukan analisis atas pengimplementasian kepatuhan.
- (f) Pengenalan nasabah dalam rangka mengamankan kegiatan operasional khususnya terkait program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

- (g) Membuat laporan setiap bulannya kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan tugas-tugas group Kepatuhan.

Dalam pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Group Kepatuhan adalah :

- Mengubah/menyempurnakan Sistem dan Operasional (SOP) terkait dengan pengenalan nasabah dengan SOP Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme (APU&PPT) yang disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
- Pemantauan atas kelengkapan data Nasabah, dimana pemantauan terhadap kelengkapan data nasabah tersebut dilakukan setiap bulannya (Pengkajian data). Adapun tingkan pengkajian data posisi Desember 2010 adalah sebanyak 84,64 % dari total CIF bank telah memenuhi kelengkapan field-field yang diwajibkan.
- Pelaporan, sebagai bentuk pelaksanaan dari UU TPPU dan ketentuan bank Indonesia terkait, selama tahun 2010 Bank Sulsel telah 210 laporan transaksi keuangan Mencurigakan/*Suspicious Transaction Report*/STR) kepada

PPATK. Dalam periode yang sama, Bank Sulsel juga mengirimkan 171 Laporan transaksi keuangan tunai/*Cash Transaction Report/CRT*. Selain itu, sebagai tanggapan atas permintaan data dan informasi dari Pihak Ekstern, perseroan telah menyampaikan 15 surat kepada PPATK, KPK, BI, Kepolisian dan Pihak Ketiga.

- Pelatihan dan sosialisasi, selama tahun 2010 sebanyak 50 (lima puluh) karyawan telah mendapatkan pelatihan dibidang APU dan PPT.

Kepatuhan PT. Bank Sulsel terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat pelanggaran yang dilakukan karena masih kurangnya pemahaman/sosialisasi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Group Kepatuhan Bank Sulsel senantiasa berusaha untuk selalu meningkatkan kemampuannya dan lebih intensif dalam hal pemantauan serta sosialisasi kepada seluruh karyawan/ti Bank Sulsel.

5) Fungsi Audit Intern

Group Audit Intern merupakan unit kerja yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan Komite Audit melalui Dewan Komisaris serta bersifat independen. Direksi Bank Sulsel bertanggungjawab atas terciptanya struktur

pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen.

GAI dalam melaksanakan tugasnya haruslah berdasarkan pada rencana audit yang telah ditetapkan sendiri oleh GAI. Disamping itu, GAI juga melakukan audit atas arahan dan kebijakan dari Dewan Komisaris terhadap temuan audit intern Bank sebelumnya.

Bank Sulsel melalui GAI telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan bank dan masyarakat. Dalam pelaksanaan audit tersebut, GAI Bank Sulsel berpedoman pada aturan internal yang disebut Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dan Internal Audit Charter. Setiap 3 (tiga) tahun sekali GAI Bank Sulsel melakukan kaji ulang terhadap Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank.

Bank Sulsel selalu berusaha untuk menyediakan SDM yang berkualitas untuk meningkatkan hasil pemeriksaannya/audit bagi GAI, dimana pelaksanaannya adalah melakukan perencanaan dan realiasi peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan dengan mengirim anggota-anggota GAI untuk mengikuti pelatihan-pelatihan.

Selama tahun 2010, GAI Bank Sulsel telah melakukan pemeriksaan baik yang bersifat khusus maupun umum dengan

total sebanyak 40 (empat puluh) baik pada Kantor Pusat maupun pada Kantor Cabang. Dengan uraian : Pemeriksaan Umum 25 (dua Puluh lima) pemeriksaan sedangkan Pemeriksaan Khusus 15 (lima belas) pemeriksaan

Dalam tahun 2010, Group Audit Intern berdasar hasil auditnya terdapat 410 (empat ratus sepuluh) temuan dan temuan tahun 2009 yang belum ditindak lanjuti adalah sebanyak 71 temuan. Kesemua temuan tersebut telah dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.

6) Fungsi Audit Ekstern

Bank Sulsel pada tahun 2010 telah menunjuk Kantor Akuntan Doli, Bambang, Sudarnadji & Dadang sebagai Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan tahun 2010 yang merupakan amanat dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2010 dengan Akta Nomor 60 Tanggal 30 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor AHU-AH.01.10-17138 Tanggal 8 Juli 2010, dimana pada RUPS tersebut memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan.

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek di bawah ini :

- Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
- Ruang lingkup audit;
- Legalitas perjanjian kerja;
- Standar profesional akuntan publik dan
- Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud;
- Penunjukan tidak lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut

7) Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris Bank Sulsel telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap setiap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko Bank.

Adapun peran aktif dari Dewan Komisaris adalah :

- Menyetujui dan evaluasi kebijakan manajemen risiko melalui pengesahan buku-buku pedoman;
- Mengevaluasi tugas dan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui evaluasi terhadap laporan Group Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko;

- Mengevaluasi dan memberikan keputusan terhadap proposal Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Sementara, Direksi wajib untuk :

- Melakukan pengawasan terhadap target pemenuhan Rencana Bisnis / Rencana Kerja Bank.
- Mengkaji ulang terhadap penilaian risiko, ketepatan kebijakan manajemen risiko kecukupan implementasi MIS.
- Menyediakan sumber daya yang berkualitas.
- Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia melalui pelatihan dan berbagai kegiatan training termasuk proses sertifikasi manajemen risiko.

Pengawasan aktif Direksi tersebut dilakukan melalui unit kerja masing-masing Direktur bidang.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank Sulsel telah mempunyai kebijakan manajemen risiko yang telah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas serta risiko usaha. Prosedur berbasis risiko tersebut telah mencakup segala produk dan aktivitas yang mengandung risiko. Direktur masing-masing bidang telah menetapkan limit risiko dan dievaluasi sesuai kebutuhan.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank melakukan identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank terhadap aktivitas dan produk baru yang akan diluncurkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan regulator lainnya.

d. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian intern yang telah dilakukan oleh Bank adalah :

- Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank;
- Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit;
- Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
- Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank;
- Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;

- Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Review yang efektif, independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Bank;
- Pengujian dan review yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
- Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur-prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit;
- Verifikasi dan review secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan Bank yang bersifat material dan tindakan pengurus Bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

8) Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait

Selama tahun 2010 Bank Sulsel tidak pernah menyediakan dana kepada pihak terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*).

9) Rencana Strategis Bank

Rencana bisnis Bank Sulsel baik itu Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) disesuaikan dengan visi dan misi bank, yaitu :

1. Visi dari Bank Sulsel adalah Menjadi Bank yang terbaik di Kawasan Indonesia Timur dengan dukungan Sumber daya Manusia yang profesional serta memberikan nilai tambah kepada Pemda dan Masyarakat.
2. Sedangkan Misi Bank Sulsel adalah :
 - Penggerak dan Pendorong laju pembangunan Ekonomi Daerah;
 - Pemegang Kas Daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah;
 - Salah satu sumber pendapatan asli daerah

Semua rencana Strategis baik itu Rencana Korporasi untuk 5 (lima) tahunan dan rencana jangka menengah untuk 3 (tiga) tahunan serta rencana jangka pendek yaitu 1 (satu) tahunan disusun oleh Direksi dengan dibantu Group Perencanaan dan Pengembangan. Kesemua rencana strategis tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Direksi juga telah melakukan komunikasi kepada seluruh pemegang saham mengenai rencana strategis tersebut melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Disamping itu, Direksi juga telah melakukan sosialisasi terhadap rencana strategis tersebut kepada setiap group dan cabang Bank Sulsel.

Adapun rencana strategis yang tercantum dalam rencana strategis Tahun 2010 yang telah dilaksanakan antara lain, yaitu :

1. Service Quality (Peningkatan Kualitas Layanan);
2. Tabungan Masa Depan (Tampan);
3. Obligasi (sementara berjalan);
4. Pembukaan kantor baik itu Cabang, Cabang Pembantu dan Kas;
5. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*).

Pelaksanaan dari rencana bisnis strategis tahun 2010 oleh Bank Sulsel tersebut telah diawasi oleh Dewan Komisaris.

10) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

1. Laporan keuangan dipublikasi melalui media surat kabar dan web side Bank Sulsel secara triwulanan;
2. Laporan keuangan dan non keuangan diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia;
3. Laporan keuangan yang sudah diaudit dilaporkan secara transparan kepada publik dalam bentuk laporan tahunan.

11) Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Hingga saat ini, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sulsel tidak memiliki saham baik itu pada Bank Sulsel sendiri, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

12) Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali.

13) Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain

Jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2010 sebagai berikut :

Tabel 5.1. Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2010

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN			
	DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
	ORANG	RUPIAH	ORANG	RUPIAH
1. Remunerasi gaji, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	4	4.041.444.218	4	4.394.861.568
2. Fasilitas lainnya dalam bentuk natura (Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb yang:				
• Dapat dimiliki	-	-	-	-
• Tidak dimiliki	4	60.517.050	4	77.755.240

Sumber : Bank BPD Sulsel 2011

14) Shares Option

Selama tahun 2010 tidak terdapat pembelian saham yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham.

15) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai dalam Skala perbandingan selama tahun 2010 sebagai berikut :

1. Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah dengan ratio 8,76
2. Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah dengan ratio 1.11
3. Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah dengan ratio 1.05
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi dengan ratio 1.82

16) Jumlah Penyimpangan Internal

Selama tahun 2010 terjadi 11 (sebelas) kasus fraud yang dilakukan oleh Karyawan tetap Bank Sulsel, namun hal tersebut tidak mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Adapun rincian tindak fraud tersebut adalah :

Tabel 5.2. Kasus Fraud yang Dilakukan Oleh Karyawan Tetap Bank Sulsel

Internal Fraud dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2009	Tahun 2010
Total Fraud telah diselesaikan	0	0	2	8	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	2	1	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	0	0	0	2	0	0
Total	0	0	4	11	0	0

Sumber : Bank BPD Sulsel 2011

Fraud dengan jumlah kerugian diatas Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) telah dilaporkan kepada Bank Indonesia oleh Direktur Kepatuhan.

17) Permasalahan Hukum

Selama tahun 2010 jumlah permasalahan terkait hukum perdata dan pidana yang melibatkan Bank Sulsel adalah sebanyak 5 (lima) kasus dengan rincian sebagai berikut: a. Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) perdata 0 dan pidana 0, Dalam Proses Penyelesaian dengan jumlah perdata 3 dan pidana 2

18) *Buy Back Shares* dan *Buy Back Obligasi Bank*

Bank Sulsel pada tahun 2010 tidak pernah menerbitkan obligasi dan melakukan IPO/*Initial Public Offering*, sehingga *Buy Back Shares and Buy Back Obligasi* tidak ada.

19) Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Untuk pemberian dana untuk politik berdasarkan aturan intern Bank Sulsel adalah tidak dibenarkan sehingga selama tahun 2010 Bank Sulsel tidak pernah memberikan dana untuk politik terutama kepada partai-partai dan hal-hal lainnya terkait dengan politik.

Bank Sulsel memiliki dana CSR atau dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* sebesar 2.5 % (dua koma lima persen) dari keuntungan dan dana yang digunakan untuk kegiatan sosial tersebut selama tahun 2010 adalah sebanyak Rp. 962.427.500,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

B. Self Assesment GCG

Pelaksanaan penilaian *Good Corporate Governance* ditujukan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diwujudkan dan difokuskan dalam 11 (sebelas) aspek penilaian dengan ringkasan perhitungan nilai komposit sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Pemimpin Cabang
2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Kepala Seksi
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Debitur Besar (Large Exposures)
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan Internal
11. Rencana Strategis Bank

Klasifikasi peringkat komposit:

- a. Nilai komposit $< 1,5$ Sangat baik
- b. $1,5 \leq$ nilai komposit $< 2,5$ Baik
- c. $2,5 \leq$ nilai komposit $< 3,5$ Cukup baik
- d. $3,5 \leq$ nilai komposit $< 4,5$ Kurang baik
- e. $4,5 \leq$ nilai komposit < 5 Tidak baik

Nilai komposit yang diperoleh berdasarkan hasil *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* selama 4 tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3. Hasil Self Assesment Pelaksanaan GCG Bank BPD Sulsel periode 2007 – 2010

No	Indikator	Tahun				Rata-rata	Interpretasi
		2007	2008	2009	2010		
1	MAROS	2.73	2.525	2.4	2.4	2.51	Cukup Baik
2	PANGKEP	2.75	2.675	2.55	2.525	2.63	Cukup Baik
3	JENEPONTO	2.75	2.7	2.5	2.35	2.58	Cukup Baik
4	TAKALAR	2.60	2.6	2.55	2.5	2.56	Cukup Baik
5	PAREPARE	2.65	2.5	2.4	2.3	2.46	Baik
6	BARRU	2.70	2.6	2.55	2.375	2.56	Cukup Baik
7	BULUKUMBA	2.55	2.65	2.5	2.35	2.51	Cukup Baik
8	BANTAENG	2.50	2.65	2.5	2.35	2.50	Cukup Baik
9	SELAYAR	2.60	2.525	2.4	2.25	2.44	Baik
10	PINRANG	2.70	2.55	2.4	2.325	2.49	Baik
11	SINJAI	2.63	2.55	2.475	2.35	2.50	Cukup Baik
12	POLMAS	2.63	2.7	2.6	2.55	2.62	Cukup Baik
13	MAMUJU	2.70	2.625	2.575	2.525	2.61	Cukup Baik
14	MAJENE	2.45	2.6	2.525	2.325	2.48	Baik
15	PASANGKAYU	2.45	2.525	2.375	2.325	2.42	Baik
16	BONE	2.40	2.55	2.5	2.5	2.49	Baik
17	PALOPO	2.53	2.6	2.6	2.45	2.54	Cukup Baik
18	MASAMBA	2.45	2.6	2.525	2.375	2.49	Baik
19	BELOPA	2.60	2.6	2.45	2.3	2.49	Baik
20	MALILI	2.55	2.5	2.425	2.2	2.42	Baik
21	SENGKANG	2.53	2.6	2.55	2.425	2.53	Cukup Baik
22	SOPPENG	2.45	2.6	2.5	2.425	2.49	Baik
23	MAKALE	2.63	2.7	2.6	2.475	2.60	Cukup Baik
24	SIDRAP	2.83	2.75	2.7	2.575	2.71	Cukup Baik
25	ENREKANG	2.60	2.525	2.475	2.4	2.50	Cukup Baik
26	KCU	2.25	2.1	2.025	1.875	2.06	Baik
27	GOWA	2.50	2.35	2.3	2.2	2.34	Baik

Sumber : Bank BPD Sulsel, diolah 2011

Berdasarkan Tabel 5.3. di atas tampak bahwa dari 27 cabang Bank Sulsel ada 15 cabang yang berada pada kategori cukup baik dan 12 cabang yang berada pada kategori baik. Selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Cabang Maros selama empat tahun mengalami penurunan yaitu 2.73 di tahun 2007 menjadi 2.4 di tahun 2010. Secara rata-rata indeks GCG untuk cabang maros adalah 2.51 indeks ini memberikan indikasi cukup baik.

2. Cabang Pangkep selama empat tahun mengalami penurunan yaitu 2.75 di tahun 2007 menjadi 2.525 di tahun 2010. Secara rata-rata indeks GCG untuk cabang Pangkep adalah 2.63 indeks ini memberikan indikasi cukup baik.
3. Cabang Jeneponto selama empat tahun mengalami penurunan yaitu 2.75 di tahun 2007 menjadi 2.35 di tahun 2010. Secara rata-rata indeks GCG untuk cabang Jeneponto adalah 2.58 indeks ini memberikan indikasi cukup baik
4. Cabang Takalar selama empat tahun mengalami penurunan yaitu 2.60 di tahun 2007 menjadi 2.56 di tahun 2010. Secara rata-rata indeks GCG untuk cabang Takalar adalah 2.56 indeks ini memberikan indikasi cukup baik
5. Cabang Pare-pare selama empat tahun mengalami penurunan yaitu 2.65 di tahun 2007 menjadi 2.3 di tahun 2010. Secara rata-rata indeks GCG untuk cabang Pare-pare adalah 2.46 indeks ini memberikan indikasi baik
6. Cabang Barru selama empat tahun mengalami penurunan yaitu 2.70 di tahun 2007 menjadi 2.375 di tahun 2010. Secara rata-rata indeks GCG untuk cabang Barru adalah 2.56 indeks ini memberikan indikasi cukup baik
7. Cabang Bulukumba selama empat tahun mengalami penurunan yaitu 2.55 di tahun 2007 menjadi 2.35 di tahun 2010. Secara rata-

- rata indeks GCG untuk cabang Bulukumba adalah 2.51 indeks ini memberikan indikasi cukup baik
8. Cabang Bantaeng selama empat tahun mengalami penurunan yaitu 2.50 di tahun 2007 menjadi 2.35 di tahun 2010. Secara rata-rata indeks GCG untuk cabang Bantaeng adalah 2.50 indeks ini memberikan indikasi cukup baik
 9. Cabang Selayar selama empat tahun mengalami penurunan yaitu 2.60 di tahun 2007 menjadi 2.25 di tahun 2010. Secara rata-rata indeks GCG untuk cabang Selayar adalah 2.44 indeks ini memberikan indikasi baik
 10. Cabang Pinrang selama empat tahun mengalami penurunan yaitu 2.70 di tahun 2007 menjadi 2.325 di tahun 2010. Secara rata-rata indeks GCG untuk cabang Pinrang adalah 2.49 indeks ini memberikan indikasi cukup baik
 11. Cabang Sinjai selama empat tahun mengalami penurunan yaitu 2.63 di tahun 2007 menjadi 2.50 di tahun 2010. Secara rata-rata indeks GCG untuk cabang Sinjai adalah 2.50 indeks ini memberikan indikasi cukup baik
 12. Cabang Polmas selama empat tahun mengalami penurunan yaitu 2.63 di tahun 2007 menjadi 2.55 di tahun 2010. Secara rata-rata indeks GCG untuk cabang Polmas adalah 2.62 indeks ini memberikan indikasi cukup baik

13. Cabang Mamuju selama empat tahun mengalami penurunan yaitu 2.70 di tahun 2007 menjadi 2.61 di tahun 2010. Secara rata-rata indeks GCG untuk cabang Mamuju adalah 2.61 indeks ini memberikan indikasi cukup baik
14. Cabang Majene selama empat tahun mengalami penurunan yaitu 2.45 di tahun 2007 menjadi 2.325 di tahun 2010. Secara rata-rata indeks GCG untuk cabang Majene adalah 2.48 indeks ini memberikan indikasi baik
15. Cabang Pasangkayu selama empat tahun mengalami penurunan yaitu 2.45 di tahun 2007 menjadi 2.325 di tahun 2010. Secara rata-rata indeks GCG untuk cabang Pasangkayu adalah 2.42 indeks ini memberikan indikasi baik
16. Cabang Bone selama empat tahun mengalami penurunan yaitu 2.40 di tahun 2007 menjadi 2.5 di tahun 2010. Secara rata-rata indeks GCG untuk cabang Pangkep adalah 2.49 indeks ini memberikan indikasi baik, namun trendnya selama 5 tahun mengalami penurunan sehingga perlu mendapat perhatian khusus direksi.
17. Cabang Palopo selama empat tahun mengalami penurunan yaitu 2.53 di tahun 2007 menjadi 2.45 di tahun 2010. Secara rata-rata indeks GCG untuk cabang Palopo adalah 2.54 indeks ini memberikan indikasi cukup baik, namun trendnya selama 5 tahun

mengalami penurunan sehingga perlu mendapat perhatian khusus direksi.

18. Cabang Masamba selama empat tahun mengalami penurunan yaitu 2.45 di tahun 2007 menjadi 2.375 di tahun 2010. Secara rata-rata indeks GCG untuk cabang Masamba adalah 2.49 indeks ini memberikan indikasi baik
19. Cabang Belopa selama empat tahun mengalami penurunan yaitu 2.60 di tahun 2007 menjadi 2.3 di tahun 2010. Secara rata-rata indeks GCG untuk cabang Belopa adalah 2.49 indeks ini memberikan indikasi baik
20. Cabang Malili selama empat tahun mengalami penurunan yaitu 2.55 di tahun 2007 menjadi 2.2 di tahun 2010. Secara rata-rata indeks GCG untuk cabang Malili adalah 2.42 indeks ini memberikan indikasi baik
21. Cabang Sengkang selama empat tahun mengalami penurunan yaitu 2.53 di tahun 2007 menjadi 2.42 di tahun 2010. Secara rata-rata indeks GCG untuk cabang Sengkang adalah 2.53 indeks ini memberikan indikasi cukup baik
22. Cabang Soppeng selama empat tahun mengalami penurunan yaitu 2.45 di tahun 2007 menjadi 2.42 di tahun 2010. Secara rata-rata indeks GCG untuk cabang Soppeng adalah 2.49 indeks ini memberikan indikasi baik

23. Cabang Makale selama empat tahun mengalami penurunan yaitu 2.63 di tahun 2007 menjadi 2.45 di tahun 2010. Secara rata-rata indeks GCG untuk cabang Makale adalah 2.60 indeks ini memberikan indikasi cukup baik
24. Cabang Sidrap selama empat tahun mengalami penurunan yaitu 2.83 di tahun 2007 menjadi 2.575 di tahun 2010. Secara rata-rata indeks GCG untuk cabang Sidrap adalah 2.71 indeks ini memberikan indikasi cukup baik
25. Cabang Enrekang selama empat tahun mengalami penurunan yaitu 2.60 di tahun 2007 menjadi 2.4 di tahun 2010. Secara rata-rata indeks GCG untuk cabang Enrekang adalah 2.50 indeks ini memberikan indikasi cukup baik
26. Kantor Cabang Utama selama empat tahun mengalami penurunan yaitu 2.25 di tahun 2007 menjadi 1.875 di tahun 2010. Secara rata-rata indeks GCG untuk kantor cabang utama adalah 2.06 indeks ini memberikan indikasi baik
27. Cabang Gowa selama empat tahun mengalami penurunan yaitu 2.50 di tahun 2007 menjadi 2.2 di tahun 2010. Secara rata-rata indeks GCG untuk cabang Pangkep adalah 2.34 indeks ini memberikan indikasi baik.

C. Gambaran Umum Variabel

1. *Internal Corporate Governance* Manajerial

Hasil perhitungan internal GCG manajerial ditampilkan pada Tabel 5.4 berikut :

Tabel 5.4. Hasil perhitungan ICG-M Bank Sulsel periode 2006 - 2010

Nama Cabang	<i>Internal Corporate Governance-M</i>					<i>Rata-rata</i>
	2006	2007	2008	2009	2010	
MAROS	2.33	3.11	4.22	6.25	6.78	4.54
PANGKEP	3.08	3.23	5.34	5.25	6.12	4.60
JENEPONTO	2.07	2.77	3.76	4.56	5.65	3.76
TAKALAR	2.74	2.87	3.96	4.22	4.35	3.63
PAREPARE	2.69	2.82	3.88	4.13	4.27	3.56
BARRU	2.05	2.74	3.72	4.51	5.59	3.72
BULUKUMBA	3.02	3.17	5.13	5.35	6.02	4.54
BANTAENG	2.31	3.08	5.76	6.23	6.29	4.73
SELAYAR	2.99	4.25	4.98	5.29	5.35	4.57
PINRANG	3.08	4.47	4.81	5.12	5.28	4.55
SINJAI	2.66	3.11	3.84	4.09	4.22	3.58
POLMAS	3.39	3.84	5.29	5.63	5.81	4.79
MAMUJU	2.74	3.10	4.28	4.56	4.70	3.88
MAJENE	2.67	3.03	4.17	4.44	4.58	3.78
PASANGKAYU	3.35	3.79	5.23	5.57	5.75	4.74
BONE	2.64	2.99	4.13	4.39	4.53	3.74
PALOPO	2.37	2.96	4.08	4.35	4.49	3.65
MASAMBA	3.01	3.76	5.18	5.51	5.69	4.63
BELOPA	2.14	2.66	3.67	4.65	4.72	3.57
MALILI	2.05	2.74	3.71	4.51	5.59	3.72
SENGKANG	2.07	1.96	3.00	3.19	3.29	2.70
SOPPING	2.71	2.84	3.92	4.17	4.30	3.59
MAKALE	2.12	3.12	4.12	4.66	5.12	3.83
SIDRAP	2.10	2.20	3.03	3.23	3.33	2.78
ENREKANG	1.62	2.16	4.23	5.23	5.26	3.70
KCU	2.07	2.77	3.76	4.56	4.73	3.58
GOWA	2.71	4.42	4.65	5.66	5.11	4.51

Sumber : Data Sekunder, diolah 2011

Dari Tabel 5.4. di atas nilai maksimum adalah 6.35, sedangkan nilai minimum adalah 1.62 sehingga rentangnya adalah 4.73 dan panjang klasnya 0.946.

Adapun distribusi frekuensi ICG-M dimasukkan pada tabel 5.5 di bawah ini :

Tabel 5.5. Distribusi frekuensi rata-rata ICG-M Bank Sulsel

Interval			Frekuensi	Intepretasi
1.62	-	2.57	0	Tidak Bagus
2.58	-	3.52	2	Kurang Bagus
3.53	-	4.48	15	Cukup Bagus
4.49	-	5.43	10	Bagus
5.44	-	6.39	0	Sangat Bagus

Sumber : Data Sekunder, diolah 2011

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi didapatkan ada dua cabang Bank Sulsel yang nilai ICG-M berada pada kategori kurang bagus yaitu Sengkang dan Sidrap. Untuk kategori cukup bagus ada 15 cabang yaitu : Jeneponto, Takalar, Parepare, Barru, Sinjai, Mamuju, Majene, Bone, Palopo, Belopa, Malili, Soppeng, Makale , Enrekang Dan Kantor Cabang Utama. Sedangkan yang masuk dalam kategori bagus ada 10 cabang yaitu : Maros, Pangkep, Bulukumba, Bantaeng, Selayar, Pinrang, Polmas, Pasangkayu, Masamba dan Gowa.

2. Internal Corporate Governance Pemilik

Hasil perhitungan internal GCG Pemilik ditampilkan pada Tabel 5.6 berikut :

Tabel 5.6. Hasil perhitungan ICG-P Bank Sulsel periode 2006 – 2010

No	Nama Cabang	<i>Internal Corporate Governance-Pemilik</i>					<i>Rata-rata</i>
		2006	2007	2008	2009	2010	
1	MAROS	1.04	1.04	0.86	0.62	1.67	1.04
2	PANGKEP	0.97	0.98	1.26	1.49	2.11	1.36
3	JENEPONTO	0.62	0.66	0.70	0.74	1.36	0.82
4	TAKALAR	0.85	0.86	1.11	1.31	1.86	1.20
5	PAREPARE	0.98	1.24	1.33	1.46	2.05	1.41
6	BARRU	0.56	0.60	0.64	0.67	1.22	0.74
7	BULUKUMBA	0.86	1.09	1.17	1.28	1.80	1.24
8	BANTAENG	0.85	1.08	1.16	1.27	1.78	1.23
9	SELAYAR	0.76	0.96	1.03	1.46	1.74	1.19
10	PINRANG	0.97	1.23	1.32	1.44	2.03	1.40
11	SINJAI	0.84	0.85	1.10	1.58	1.84	1.24
12	POLMAS	0.08	0.54	0.58	0.61	1.11	0.58
13	MAMUJU	0.85	0.86	1.11	1.59	1.86	1.25
14	MAJENE	0.86	0.87	1.12	1.61	1.88	1.27
15	PASANGKAYU	0.76	0.77	1.00	1.43	1.67	1.13
16	BONE	0.68	0.69	0.88	1.27	1.48	1.00
17	PALOPO	0.56	0.60	0.64	0.70	1.23	0.75
18	MASAMBA	0.91	0.81	0.76	0.74	0.56	0.76
19	BELOPA	0.76	0.77	0.99	1.42	1.66	1.12
20	MAULI	0.86	1.09	1.17	1.66	1.98	1.35
21	SENGKANG	0.85	0.86	1.11	1.59	1.86	1.26
22	SOPPENG	0.76	0.77	0.99	1.42	1.65	1.12
23	MAKALE	0.90	0.80	0.75	0.73	0.56	0.75
24	SIDRAP	0.67	0.68	0.88	1.26	1.47	0.99
25	ENREKANG	0.66	0.67	0.87	1.25	1.45	0.98
26	KCU	0.96	0.97	1.25	1.79	2.13	1.42
27	GOWA	0.66	0.67	0.86	1.23	1.44	0.97

Sumber : Data Sekunder, diolah 2011

Dari Tabel 5.6. di atas nilai maksimum adalah 2.13, sedangkan nilai minimum adalah 0.08 sehingga rentangnya adalah 2.05 dan panjang klasnya 0.41.

Adapun distribusi frekuensi ICG-P dimasukkan pada Tabel 5.7 di bawah ini :

Tabel 5.7. Distribusi frekuensi rata-rata ICG-P Bank Sulsel

Interval	Frekuensi	Intepretasi
0.08 - 0.49	0	Tidak Bagus
0.50 - 0.91	6	Kurang Bagus
0.92 - 1.33	16	Cukup Bagus
1.34 - 1.75	5	Bagus
1.76 - 2.17	0	Sangat Bagus

Sumber : Data Sekunder, diolah 2011

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi didapatkan ada 6 cabang Bank Sulsel yang nilai ICG-P berada pada kategori kurang bagus yaitu Jeneponto, Barru, Polmas, Palopo, Masamba dan Makale. Untuk kategori cukup bagus ada 16 cabang yaitu : Maros, Takalar, Bulukumba, bantaeng, Selayar, Sinjai, Mamuju, Majene, Pasangkayu, Bone, Belopa, Sengkang, Soppeng, Sidrap, Enrekang dan Gowa. Sedangkan yang masuk dalam kategori bagus ada 5 cabang yaitu : Pangkep, Pare-pare, Pinrang, Malili dan KCU.

Meski demikian terdapat dua cabang yang masuk dalam kategori cukup bagus yang mengalami trend menurun yang harus segera dibenahi agar ICG-P nya mengalami peningkatan.

3. CAR

Hasil perhitungan CAR ditampilkan pada Tabel 5.8 berikut :

Tabel 5.8. Hasil perhitungan CAR Bank Sulsel periode 2006 – 2010

No	Nama Cabang	CAR					Rata-rata
		2006	2007	2008	2009	2010	
1	MAROS	12.62	13.39	13.52	13.83	15.39	13.75
2	PANGKEP	11.36	13.38	13.51	13.82	15.37	13.49
3	JENEPONTO	11.48	13.52	13.66	13.97	15.54	13.64
4	TAKALAR	11.61	13.67	13.81	14.13	15.71	13.79
5	PAREPARE	11.74	13.82	13.96	14.28	15.89	13.94
6	BARRU	11.87	13.97	14.11	14.44	16.06	14.09
7	BULUKUMBA	14.51	15.39	15.54	15.90	17.69	15.81
8	BANTAENG	13.05	15.37	15.53	15.88	17.67	15.50
9	SELAYAR	12.68	13.90	13.58	13.45	15.46	13.81
10	PINRANG	12.55	13.76	13.45	13.31	15.30	13.67
11	SINJAI	12.42	13.62	13.31	13.18	15.15	13.54
12	POLMAS	9.83	10.77	10.53	10.43	11.98	10.71
13	MAMUJU	12.30	13.48	13.18	13.05	15.00	13.40
14	MAJENE	12.17	13.34	13.04	12.91	14.84	13.26
15	PASANGKAYU	12.05	13.21	12.91	12.78	14.69	13.13
16	BONE	11.93	13.08	12.78	12.66	14.55	13.00
17	PALOPO	11.81	12.94	12.65	12.53	14.40	12.87
18	MASAMBA	13.20	15.54	15.70	16.06	17.87	15.67
19	BELOPA	11.69	12.81	12.53	12.40	14.25	12.74
20	MAULI	11.57	12.68	12.40	12.28	14.11	12.61
21	SENGKANG	8.38	10.77	10.65	11.47	13.18	10.89
22	SOPPING	11.45	12.56	12.27	12.15	13.97	12.48
23	MAKALE	12.60	13.81	13.50	13.37	15.36	13.73
24	SIDRAP	13.34	15.71	15.87	16.24	18.06	15.85
25	ENREKANG	13.49	15.89	16.05	16.41	18.26	16.02
26	KCU	13.64	16.06	16.22	16.60	18.46	16.20
27	GOWA	14.57	15.97	15.61	15.46	17.77	15.88

Sumber : Data Sekunder, diolah 2011

Dari Tabel 5.8. di atas nilai maksimum adalah 18.46, sedangkan nilai minimum adalah 8.38 sehingga rentangnya adalah 10.08 dan panjang klasnya 2.01613

Adapun distribusi frekuensi CAR dimasukkan pada Tabel 5.9 di bawah ini :

Tabel 5.9. Distribusi frekuensi rata-rata CAR Bank Sulsel

Interval	Frekuensi	Intepretasi
8.38 - 10.40	0	Tidak Bagus
10.41 - 12.42	2	Kurang Bagus
12.43 - 14.45	18	Cukup Bagus
14.46 - 16.48	7	Bagus
16.49 - 18.50	0	Sangat Bagus

Sumber : Data Sekunder, diolah 2011

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi didapatkan ada 2 cabang Bank Sulsel yang nilai CAR berada pada kategori kurang bagus yaitu Sengkang dan Polmas. Untuk kategori cukup bagus ada 18 cabang yaitu : Maros, Pangkep, Jeneponto, Takalar, Pare-pare, Barru, Selayar, Pinrang, Sinjai, Mamuju, Majene, pasangkayu, Bone, Palopo, Belopa, Malili, Soppeng dan Makale . Sedangkan yang masuk dalam kategori bagus ada 7 cabang yaitu : Bulukumba, bantaeng, Masamba, Sidrap, Enrekang, KCU dan Gowa.

4. ATIM

Hasil perhitungan ATIM ditampilkan pada Tabel 5.10 berikut :

Tabel 5.10. Hasil perhitungan ATIM Bank Sulsel periode 2006 – 2010

No	Nama Cabang	ATIM					Rata-rata
		2006	2007	2008	2009	2010	
1	MAROS	10.48	11.49	11.23	11.12	12.78	11.42
2	PANGKEP	11.53	12.64	12.35	12.23	14.06	12.56
3	JENEPONTO	11.30	12.38	12.11	11.99	13.78	12.31
4	TAKALAR	8.27	9.06	8.86	8.77	10.08	9.01
5	PAREPARE	11.07	12.14	11.86	11.75	13.50	12.06
6	BARRU	9.09	9.97	9.75	9.65	11.09	9.91
7	BULUKUMBA	8.91	9.77	9.55	9.46	10.87	9.71
8	BANTAENG	8.73	9.57	9.36	9.27	10.65	9.52
9	SELAYAR	14.84	16.26	15.90	15.74	18.09	16.16
10	PINRANG	13.84	15.17	14.83	14.69	16.88	15.08
11	SINJAI	8.56	9.38	9.17	9.08	10.44	9.33
12	POLMAS	10.85	11.89	11.63	11.51	13.23	11.82
13	MAMUJU	15.30	16.77	16.39	16.23	18.66	16.67
14	MAJENE	8.39	9.20	8.99	8.90	10.23	9.14
15	PASANGKAYU	15.13	16.58	16.21	16.05	18.45	16.48
16	BONE	10.63	11.66	11.39	11.28	12.97	11.59
17	PALOPO	8.22	9.01	8.81	9.48	10.02	9.11
18	MASAMBA	15.51	17.00	16.62	16.45	18.91	16.90
19	BELOPA	14.67	16.08	15.72	15.56	17.89	15.99
20	MALILI	10.42	11.42	11.17	12.02	12.71	11.55
21	SENGKANG	5.57	8.91	8.71	9.38	9.91	8.50
22	SOPPENG	14.82	16.24	15.88	15.72	18.07	16.15
23	MAKALE	10.31	11.30	11.04	11.89	12.57	11.42
24	SIDRAP	14.97	16.41	16.04	15.88	18.25	16.31
25	ENREKANG	13.23	14.50	14.17	14.03	16.13	14.41
26	KCU	11.34	12.43	12.15	13.08	13.82	12.56
27	GOWA	8.94	9.80	9.58	10.32	10.91	9.91

Sumber : Data Sekunder, diolah 2011

Dari Tabel 5.10. di atas nilai maksimum adalah 19.98, sedangkan nilai minimum adalah 5.57 sehingga rentangnya adalah 14.41 dan panjang klasnya 2.88250

Adapun distribusi frekuensi ATIM dimasukkan pada Tabel 5.11 di bawah ini :

Tabel 5.11. Distribusi frekuensi rata-rata ATIM Bank Sulsel

Interval		Frekuensi	Intepretasi
5.57	- 8.45	0	Tidak Bagus
8.46	- 11.34	9	Kurang Bagus
11.35	- 14.23	9	Cukup Bagus
14.24	- 17.13	9	Bagus
17.14	- 20.02	0	Sangat Bagus

Sumber : Data Sekunder, diolah 2011

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi didapatkan ada 9 cabang Bank Sulsel yang nilai ATIM berada pada kategori kurang bagus yaitu : Takalar, Barru, Bulukumba, Bantaeng, Sinjai, Majene, Palopo, Sengkang dan Gowa . Untuk kategori cukup bagus ada 9 cabang yaitu : Maros, pangkep, jenepono, Pare-pare, Polmas, Bone, Malili, Makale dan KCU . Sedangkan yang masuk dalam kategori bagus ada 9 cabang yaitu : Selayar, Pinrang, mamuju, Pasangkayu, Masamba, Belopa, Soppeng dan Sidrap.

5. Primary Ratio

Hasil perhitungan *Primary Ratio* ditampilkan pada Tabel 5.12 berikut :

Tabel 5.12. Hasil perhitungan *Primary Ratio* Bank Sulsel periode 2006 – 2010

No	Nama Cabang	<i>Primary Ratio</i>					<i>Rata-rata</i>
		2006	2007	2008	2009	2010	
1	MAROS	11.72	12.85	13.96	13.82	15.89	13.65
2	PANGKEP	8.59	11.56	12.56	12.44	14.29	11.89
3	JENEPONTO	16.12	17.67	17.27	17.10	19.66	17.57
4	TAKALAR	16.88	18.50	18.09	17.91	20.58	18.39
5	PAREPARE	15.96	17.49	17.10	16.93	19.46	17.39
6	BARRU	14.36	15.74	15.39	15.23	17.51	15.65
7	BULUKUMBA	14.37	15.76	15.40	15.25	17.53	15.66
8	BANTAENG	14.66	16.07	15.71	15.55	17.88	15.97
9	SELAYAR	14.65	16.05	15.69	15.54	17.86	15.96
10	PINRANG	13.03	14.28	15.52	15.37	17.66	15.17
11	SINJAI	17.08	18.72	18.30	18.12	20.83	18.61
12	POLMAS	13.30	14.58	15.84	15.69	18.03	15.49
13	MAMUJU	12.42	13.61	13.31	13.18	15.15	13.53
14	MAJENE	13.58	14.89	16.18	16.02	18.41	15.82
15	PASANGKAYU	16.93	18.56	18.14	17.96	20.65	18.45
16	BONE	17.14	18.78	18.36	18.18	20.90	18.67
17	PALOPO	13.87	15.20	16.52	16.35	18.80	16.15
18	MASAMBA	12.28	13.46	13.16	13.03	14.98	13.38
19	BELOPA	17.34	19.01	18.58	18.40	21.15	18.90
20	MALILI	12.54	13.75	13.44	13.31	15.29	13.67
21	SENGKANG	14.16	15.52	16.86	16.70	19.19	16.49
22	SOPPENG	11.92	13.07	12.78	12.65	14.54	12.99
23	MAKALE	14.46	15.85	17.22	17.05	19.60	16.83
24	SIDRAP	14.76	16.18	17.58	17.41	20.01	17.19
25	ENREKANG	13.06	14.31	13.99	13.85	15.92	14.22
26	KCU	15.07	16.52	17.95	17.77	20.43	17.55
27	GOWA	17.55	19.24	18.80	18.62	24.66	19.77

Sumber : Data Sekunder, diolah 2011

Dari Tabel 5.12. di atas nilai maksimum adalah 24.66, sedangkan nilai minimum adalah 8.59 sehingga rentangnya adalah 16.07 dan panjang klasnya 3.214

Adapun distribusi frekuensi *Primary Ratio* dimasukkan pada Tabel 5.13 di bawah ini :

Tabel 5.13. Distribusi frekuensi rata-rata *Primary Ratio* Bank Sulsel

Interval			Frekuensi	Intepretasi
8.59	-	11.80	0	Tidak Bagus
11.81	-	15.03	7	Kurang Bagus
15.04	-	18.25	14	Cukup Bagus
18.26	-	21.47	6	Bagus
21.48	-	24.70	0	Sangat Bagus

Sumber : Data Sekunder, diolah 2011

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi *Primary Ratio* didapatkan ada 7 cabang Bank Sulsel yang nilai berada pada kategori kurang bagus yaitu : Maros, Pangkep, Mamuju, Masamba, Malili, Soppeng dan Enrekang. Untuk kategori cukup bagus ada 14 cabang yaitu : Jeneponto, Pare-pare, baru, Bulukumba, Bantaeng, Selayar, Pinrang, Polmas, Majene, Palopo, Sengkang, Makale, Sidrap dan KCU. Sedangkan yang masuk dalam kategori bagus ada 6 cabang yaitu : Takalar, Sinjai, Pasangkayu, Bone, Belopa dan Gowa.



6. LDR

Hasil perhitungan LDR ditampilkan pada Tabel 5.14 berikut :

Tabel 5.14. Hasil perhitungan LDR Bank Sulsel periode 2006 – 2010

No	Nama Cabang	LDR					Rata-rata
		2006	2007	2008	2009	2010	
1	MAROS	0.57	0.63	0.67	0.69	0.74	0.66
2	PANGKEP	0.69	0.76	0.81	0.83	0.89	0.80
3	JENEPONTO	0.57	0.62	0.66	0.68	0.73	0.65
4	TAKALAR	0.71	0.78	0.83	0.85	0.91	0.81
5	PAREPARE	0.72	0.79	0.84	0.86	0.93	0.83
6	BARRU	0.56	0.62	0.66	0.67	0.72	0.65
7	BULUKUMBA	0.56	0.61	0.65	0.67	0.71	0.64
8	BANTAENG	0.50	0.60	0.64	0.66	0.71	0.62
9	SELAYAR	0.62	0.62	0.66	0.68	0.73	0.66
10	PINRANG	0.74	0.81	0.86	0.88	0.94	0.85
11	SINJAI	0.57	0.62	0.66	0.68	0.73	0.65
12	POLMAS	0.65	0.71	0.76	0.77	0.83	0.74
13	MAMUJU	0.75	0.82	0.88	0.90	0.92	0.85
14	MAJENE	0.66	0.72	0.77	0.79	0.85	0.76
15	PASANGKAYU	0.65	0.72	0.76	0.78	0.84	0.75
16	BONE	0.65	0.71	0.75	0.77	0.83	0.74
17	PALOPO	0.64	0.70	0.75	0.77	0.82	0.73
18	MASAMBA	0.74	0.81	0.87	0.89	0.95	0.85
19	BELOPA	0.74	0.81	0.86	0.88	0.94	0.84
20	MALILI	0.73	0.80	0.85	0.87	0.93	0.84
21	SENGKANG	0.72	0.79	0.84	0.86	0.92	0.83
22	SOPPENG	0.71	0.78	0.83	0.85	0.91	0.82
23	MAKALE	0.63	0.69	0.74	0.76	0.81	0.73
24	SIDRAP	0.63	0.69	0.73	0.75	0.80	0.72
25	ENREKANG	0.71	0.77	0.82	0.84	0.91	0.81
26	KCU	0.71	0.71	0.76	0.77	0.83	0.76
27	GOWA	0.72	0.79	0.84	0.86	0.92	0.83

Sumber : Data Sekunder, diolah 2011

Dari Tabel 5.14. di atas nilai maksimum adalah 0.95, sedangkan nilai minimum adalah 0.50 sehingga rentangnya adalah 0.45 dan panjang klasnya 0.09063

Adapun distribusi frekuensi *LDR* dimasukkan pada Tabel 5.15 di bawah ini :

Tabel 5.15. Distribusi frekuensi rata-rata *LDR* Bank Sulsel

Interval	Frekuensi	Intepretasi
0.500 - 0.591	0	Tidak Bagus
0.601 - 0.691	7	Kurang Bagus
0.701 - 0.792	8	Cukup Bagus
0.802 - 0.893	12	Bagus
0.903 - 0.993	0	Sangat Bagus

Sumber : Data Sekunder, diolah 2011

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi didapatkan ada 7 cabang Bank Sulsel yang nilai *LDR* berada pada kategori kurang bagus yaitu Maros, Jeneponto, Barru, Bulukumba, Bantaeng, Selayar dan Sinjai. Untuk kategori cukup bagus ada 8 cabang yaitu : Polmas, Majene, Pasangkayu, Bone, Palopo, Makale, Sidrap dan KCU. Sedangkan yang masuk dalam kategori bagus ada 12 cabang yaitu : Pangkep, Takalar, pare-pare, Pinrang, Mamuju, Masamba, Belopa, Malili, Sengkang, Soppeng, Enrekang dan Gowa.

7. QUICK RATIO

Hasil perhitungan *Quick Ratio* ditampilkan pada Tabel 5.16 berikut

Tabel 5.16. Hasil perhitungan *Quick Ratio* Bank Sulsel periode 2006 – 2010

No	Nama Cabang	Quick Ratio					Rata-rata
		2006	2007	2008	2009	2010	
1	MAROS	0.71	0.78	0.76	0.75	0.87	0.77
2	PANGKEP	0.56	0.61	0.60	0.66	0.76	0.64
3	JENEPONTO	0.73	0.80	0.78	0.77	0.89	0.79
4	TAKALAR	0.40	0.60	0.59	0.60	0.68	0.57
5	PAREPARE	0.65	0.71	0.69	0.69	0.79	0.71
6	BARRU	0.65	0.72	0.70	0.69	0.80	0.71
7	BULUKUMBA	0.64	0.70	0.69	0.68	0.78	0.70
8	BANTAENG	0.64	0.70	0.69	0.76	0.88	0.73
9	SELAYAR	0.81	0.89	0.87	0.86	0.99	0.89
10	PINRANG	0.63	0.69	0.68	0.76	0.87	0.73
11	SINJAI	0.63	0.69	0.67	0.68	0.78	0.69
12	POLMAS	0.56	0.61	0.60	0.60	0.69	0.61
13	MAMUJU	0.56	0.62	0.60	0.61	0.70	0.62
14	MAJENE	0.63	0.69	0.68	0.69	0.79	0.70
15	PASANGKAYU	0.64	0.70	0.69	0.69	0.80	0.70
16	BONE	0.65	0.71	0.69	0.70	0.80	0.71
17	PALOPO	0.57	0.62	0.61	0.61	0.71	0.62
18	MASAMBA	0.74	0.81	0.79	0.78	0.90	0.80
19	BELOPA	0.65	0.72	0.70	0.71	0.81	0.72
20	MALILI	0.65	0.71	0.69	0.70	0.80	0.71
21	SENGKANG	0.64	0.70	0.68	0.69	0.79	0.70
22	SOPPENG	0.63	0.69	0.68	0.68	0.79	0.69
23	MAKALE	0.62	0.68	0.67	0.68	0.78	0.69
24	SIDRAP	0.62	0.68	0.66	0.67	0.77	0.68
25	ENREKANG	0.62	0.68	0.66	0.67	0.77	0.68
26	KCU	0.62	0.68	0.66	0.67	0.77	0.68
	GOWA	0.57	0.63	0.61	0.62	0.71	0.63
		0.64	0.70	0.69	0.70	0.80	0.71
		0.59	0.70	0.69	0.69	0.80	0.69

Sumber : Data Sekunder, diolah 2011

Dari Tabel 5.16. di atas nilai maksimum adalah 0.99, sedangkan nilai minimum adalah 0.40 sehingga rentangnya adalah 0.59 dan panjang klasnya 0.118

Adapun distribusi frekuensi *Quick Ratio* dimasukkan pada Tabel 5.17 di bawah ini :

Tabel 5.17. Distribusi frekuensi rata-rata *Quick Ratio* Bank Sulsel

Interval		Frekuensi	Intepretasi
0.40	- 0.52	0	Tidak Bagus
0.53	- 0.65	6	Kurang Bagus
0.66	- 0.78	18	Cukup Bagus
0.79	- 0.90	3	Bagus
0.91	- 1.03	0	Sangat Bagus

Sumber : Data Sekunder, diolah 2011

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi didapatkan ada 6 cabang Bank Sulsel yang nilai *Quick Ratio* berada pada kategori kurang bagus yaitu pangkep, Takalar, Polmas, Mamuju, palopo dan Enrekang. Untuk kategori cukup bagus ada 18 cabang yaitu : Maros, Pare-pare, Barru, Bulukumba, Bantaeng, Pinrang, Sinjai, Majene, Pasangkayu, Bone, Belopa, Malili, Sengkang, Soppeng, Makale, Sidrap dan KCU. Sedangkan yang masuk dalam kategori bagus ada 3 cabang yaitu : Jenepono, Selayar dan Masamba.

8. Manajemen Laba

Hasil perhitungan Manajemen Laba ditampilkan pada Tabel 5.18 berikut

Tabel 5.18. Hasil perhitungan Manajemen Laba Bank Sulsel periode 2006 – 2010

No	Nama Cabang	Manajemen Laba					Rata-rata
		2006	2007	2008	2009	2010	
1	MAROS	(0.6233)	(0.8142)	(0.6939)	(0.8792)	(0.8563)	(0.7734)
2	PANGKEP	(0.6788)	(0.8866)	(0.7556)	(0.9575)	(0.9325)	(0.8422)
3	JENEPONTO	(1.5594)	(2.0371)	(2.0774)	(2.1185)	(2.3346)	(2.0254)
4	TAKALAR	(0.6041)	(0.7891)	(0.6725)	(0.8522)	(0.8391)	(0.7514)
5	PAREPARE	(0.6113)	(0.7986)	(0.6806)	(0.8624)	(0.8492)	(0.7604)
6	BARRU	(0.6107)	(0.7977)	(0.6798)	(0.8614)	(0.8483)	(0.7596)
7	BULUKUMBA	(0.6655)	(0.8693)	(0.7409)	(0.9388)	(0.9244)	(0.8278)
8	BANTAENG	(0.7321)	(0.9563)	(0.8150)	(1.0327)	(1.0169)	(0.9106)
9	SELAYAR	(0.6515)	(0.8511)	(0.7253)	(0.9191)	(0.9050)	(0.8104)
10	PINRANG	0.0556	0.0756	0.0467	0.0552	(0.0294)	0.0407
11	SINJAI	(0.7095)	(0.9268)	(0.7899)	(1.0009)	(0.9856)	(0.8825)
12	POLMAS	(0.7166)	(0.9361)	(0.7978)	(1.0109)	(0.9954)	(0.8914)
13	MAMUJU	(1.7513)	(2.2876)	(2.3329)	(2.3791)	(2.6217)	(2.2745)
14	MAJENE	(0.7238)	(0.9455)	(0.8058)	(1.0210)	(1.0054)	(0.9003)
15	PASANGKAYU	(0.7310)	(0.9549)	(0.8138)	(1.0312)	(1.0154)	(0.9093)
16	BONE	(0.7383)	(0.9645)	(0.8220)	(1.0415)	(1.0256)	(0.9184)
17	PALOPO	(0.7457)	(0.9741)	(0.8302)	(1.0519)	(1.0359)	(0.9276)
18	MASAMBA	(0.7532)	(0.9839)	(0.8385)	(1.0624)	(1.0462)	(0.9368)
19	BELOPA	(1.9667)	(2.5690)	(2.6198)	(2.6717)	(2.9442)	(2.5543)
20	MALILI	(0.7607)	(0.9937)	(0.8469)	(1.0731)	(1.0567)	(0.9462)
21	SENGKANG	(2.2086)	(2.8850)	(2.9421)	(3.0003)	(3.3063)	(2.8685)
22	SOPPENG	(0.7683)	(1.0036)	(0.8553)	(1.0838)	(1.0672)	(0.9557)
23	MAKALE	(2.4802)	(3.2398)	(3.3040)	(3.3694)	(3.7130)	(3.2213)
24	SIDRAP	(2.4527)	(2.9122)	(2.9699)	(3.0287)	(3.6718)	(3.0071)
25	ENREKANG	(0.7760)	(1.0137)	(0.8639)	(1.0946)	(1.0779)	(0.9652)
26	KCU	(0.7682)	(1.0034)	(0.8552)	(1.0836)	(1.0670)	(0.9555)
27	GOWA	(0.7758)	(1.0135)	(0.8637)	(1.0944)	(1.0777)	(0.9650)

Sumber : Data Sekunder, diolah 2011

Dari Tabel 5.18. di atas nilai maksimum adalah 0.08, sedangkan nilai minimum adalah -3.71 sehingga rentangnya adalah 3.79 dan panjang klasnya 0.75

Adapun distribusi frekuensi Manajemen Laba dimasukkan pada Tabel 5.19 di bawah ini :

Tabel 5.19. Distribusi frekuensi rata-rata Manajemen Laba Bank Sulsel

Interval	Frekuensi	Intepretasi
-3.71 - -2.96	0	Tidak Bagus
-2.95 - -2.19	6	Kurang Bagus
-2.18 - -1.42	20	Cukup Bagus
-1.41 - -0.65	1	Bagus
-0.64 - 0.12	0	Sangat Bagus

Sumber : Data Sekunder, diolah 2011

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi didapatkan ada 6 cabang Bank Sulsel yang nilai Manajemen Laba berada pada kategori kurang bagus yaitu Jeneponto, Mamuju, Belopa, Sengkang, Makale dan Sidrap. Untuk kategori cukup bagus ada 20 cabang yaitu : Maros, Pangkep, Takalar, Parepare, Barru, Bulukumba, Bantaeng, Selayar, Sinjai, Polmas, Majene, Pasangkayu, Bone, Palopo, Masamba, Malili, Soppeng, Enrekang, KCU, Gowa. Sedangkan yang masuk dalam kategori bagus ada 1 cabang yaitu: Pinrang.

9. ROA

Hasil perhitungan ROA ditampilkan pada Tabel 5.20 berikut

Tabel 5.20. Hasil perhitungan ROA Bank Sulsel periode 2006 – 2010

No	Nama Cabang	ROA					Rata-rata
		2006	2007	2008	2009	2010	
1	MAROS	0.075	0.083	0.098	0.099	0.100	0.091
2	PANGKEP	0.078	0.085	0.099	0.100	0.099	0.092
3	JENEPONTO	0.070	0.084	0.100	0.100	0.099	0.091
4	TAKALAR	0.070	0.084	0.100	0.100	0.100	0.091
5	PAREPARE	0.077	0.084	0.100	0.100	0.100	0.092
6	BARRU	0.079	0.087	0.100	0.100	0.099	0.093
7	BULUKUMBA	0.071	0.086	0.100	0.100	0.100	0.092
8	BANTAENG	0.089	0.084	0.087	0.100	0.100	0.092
9	SELAYAR	0.086	0.084	0.100	0.100	0.100	0.094
10	PINRANG	0.077	0.084	0.100	0.100	0.100	0.092
11	SINJAI	0.079	0.084	0.091	0.099	0.099	0.090
12	POLMAS	0.063	0.069	0.068	0.067	0.077	0.069
13	MAMUJU	0.065	0.071	0.069	0.058	0.079	0.070
14	MAJENE	0.078	0.086	0.099	0.100	0.098	0.092
15	PASANGKAYU	0.081	0.089	0.100	0.100	0.100	0.094
16	BONE	0.070	0.084	0.100	0.099	0.098	0.090
17	PALOPO	0.100	0.083	0.100	0.099	0.098	0.091
18	MASAMBA	0.060	0.098	0.098	0.099	0.098	0.090
19	BELOPA	0.075	0.082	0.097	0.098	0.098	0.094
20	MALIU	0.077	0.098	0.098	0.098	0.098	0.094
21	SENGKANG	0.088	0.088	0.098	0.098	0.098	0.091
22	SOPPENG	0.063	0.096	0.098	0.099	0.098	0.091
23	MAKALE	0.076	0.084	0.099	0.099	0.098	0.091
24	SIDRAP	0.080	0.087	0.100	0.100	0.100	0.093
25	ENREKANG	0.068	0.100	0.098	0.099	0.097	0.092
26	KCU	0.055	0.097	0.098	0.099	0.100	0.090
27	GOWA	0.088	0.089	0.100	0.097	0.097	0.094

Sumber : Data Sekunder, diolah 2011

Dari Tabel 5.20. di atas nilai maksimum adalah 0.100, sedangkan nilai minimum adalah 0.055 sehingga rentangnya adalah 0.045 dan panjang klasnya 0.009

Adapun distribusi frekuensi ROA dimasukkan pada Tabel 5.21 di bawah ini :

Tabel 5.21. Distribusi frekuensi rata-rata ROA Bank Sulsel

Interval	Frekuensi	Intepretasi
0.05 - 0.06	0	Tidak Bagus
0.07 - 0.08	2	Kurang Bagus
0.09 - 0.10	25	Cukup Bagus
0.11 - 0.12	0	Bagus
0.13 - 0.14	0	Sangat Bagus

Sumber : Data Sekunder, diolah 2011

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi didapatkan ada 2 cabang Bank Sulsel yang nilai ROA berada pada kategori kurang bagus yaitu : Polmas dan Mamuju. Untuk kategori cukup bagus ada 25 cabang yaitu : Pinrang, Maros, Pangkep, Takalar, Parepare, Barru, Bulukumba, Bantaeng, Selayar, Sinjai, Majene, Pasangkayu, Bone, Palopo, Masamba, Malili, Soppeng, Enrekang, KCU, Gowa, Jeneponto, Belopa, Sengkang, Makale dan Sidrap.

10. ROE

Hasil perhitungan ROE ditampilkan pada Tabel 5.22 berikut

Tabel 5.22. Hasil perhitungan ROE Bank Sulsel periode 2006 – 2010

No	Nama Cabang	ROE					Rata-rata
		2006	2007	2008	2009	2010	
1	MAROS	0.320	0.351	0.343	0.340	0.390	0.349
2	PANGKEP	0.317	0.347	0.339	0.336	0.386	0.345
3	JENEPONTO	0.265	0.291	0.254	0.281	0.356	0.289
4	TAKALAR	0.310	0.340	0.333	0.329	0.379	0.338
5	PAREPARE	0.307	0.337	0.329	0.326	0.375	0.335
6	BARRU	0.304	0.333	0.326	0.323	0.371	0.331
7	BULUKUMBA	0.301	0.330	0.323	0.319	0.367	0.328
8	BANTAENG	0.298	0.327	0.319	0.316	0.363	0.325
9	SELAYAR	0.307	0.337	0.329	0.326	0.374	0.335
10	PINRANG	0.316	0.347	0.339	0.336	0.386	0.345
11	SINJAI	0.326	0.357	0.349	0.346	0.397	0.355
12	POLMAS	0.36	0.36	0.36	0.35	0.40	0.366
13	MAMUJU	0.32	0.33	0.32	0.32	0.36	0.330
14	MAJENE	0.336	0.368	0.321	0.356	0.445	0.366
15	PASANGKAYU	0.302	0.331	0.289	0.320	0.405	0.329
16	BONE	0.299	0.327	0.286	0.317	0.400	0.326
17	PALOPO	0.296	0.324	0.283	0.314	0.396	0.322
18	MASAMBA	0.307	0.336	0.329	0.325	0.374	0.334
19	BELOPA	0.262	0.288	0.2142613	0.276	0.321	0.271
20	MALIU	0.288	0.316	0.231	0.303	0.353	0.298
21	SENGKANG	0.317	0.347	0.254	0.333	0.388	0.328
22	SOPPENG	0.295	0.323	0.316	0.312	0.359	0.321
23	MAKALE	0.303	0.333	0.325	0.322	0.370	0.331
24	SIDRAP	0.312	0.342	0.335	0.331	0.381	0.340
25	ENREKANG	0.322	0.353	0.345	0.341	0.392	0.351
26	KCU	0.331	0.363	0.317	0.352	0.445	0.362
27	GOWA	0.298	0.327	0.285	0.316	0.400	0.325

Sumber : Data Sekunder, diolah 2011

Dari Tabel 5.22. di atas nilai maksimum adalah 0.45, sedangkan nilai minimum adalah 0.21 sehingga rentangnya adalah 0.23 dan panjang klasnya 0.0461

Adapun distribusi frekuensi ROE dimasukkan pada Tabel 5.23 di bawah ini :

Tabel 5.23. Distribusi frekuensi rata-rata ROE Bank Sulsel

Interval	Frekuensi	Intepretasi
0.214 - 0.260	0	Tidak Bagus
0.270 - 0.317	4	Kurang Bagus
0.327 - 0.373	23	Cukup Bagus
0.383 - 0.429	0	Bagus
0.439 - 0.485	0	Sangat Bagus

Sumber : Data Sekunder; diolah 2011

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi didapatkan ada 4 cabang Bank Sulsel yang nilai ROE berada pada kategori kurang bagus yaitu : Malili, Jeneponto, Belopa dan Sengkang. Untuk kategori cukup bagus ada 23 cabang yaitu : Pinrang, Maros, Pangkep, Takalar, Parepare, Barru, Bulukumba, Bantaeng, Selayar, Sinjai, Majene, Pasangkayu, Bone, Palopo, Masamba, Soppeng, Enrekang, KCU, Gowa, Makale, Sidrap, Polmas dan Mamuju

Hasil akumulasi penilaian variabel di tampilkan pada Tabel 5.24 berikut :

Tabel 5.24 Hasil Rekapitulasi Indikator Tiap Variabel

No	Nama Cabang	Icgm	Icgp	car	ATIM	PR	ID	QR	ML	ROA	ROE	Jumlah cukup baik dan baik	% sangat baik, baik dan cukup baik	Indeks GCG
1	MAROS	B	CB	CB	CB	KB	KB	CB	CB	CB	CB	8	80	cukup Baik
2	PANGKEP	B	B	CB	CB	KB	B	KB	CB	CB	CB	8	80	cukup Baik
3	JENEPONTO	CB	KB	CB	CB	CB	KB	B	KB	CB	KB	6	60	cukup Baik
4	TAKALAR	CB	CB	CB	KB	B	B	KB	CB	CB	CB	8	80	cukup Baik
5	PAREPARE	CB	B	CB	CB	CB	B	CB	CB	CB	CB	10	100	Baik
6	BARRU	CB	KB	CB	KB	CB	KB	CB	CB	CB	CB	7	70	cukup Baik
7	BULLUKUMBA	B	CB	B	KB	CB	KB	CB	CB	CB	CB	8	80	cukup Baik
8	BANTAENG	B	CB	B	KB	CB	KB	CB	CB	CB	CB	8	80	cukup Baik
9	SELAYAR	B	CB	CB	B	CB	KB	B	CB	CB	CB	9	90	Baik
10	PINRANG	B	B	CB	B	CB	B	CB	B	CB	CB	10	100	Baik
11	SINJAI	CB	CB	CB	KB	B	KB	CB	CB	CB	CB	8	80	cukup Baik
12	POLMAS	B	KB	KB	CB	CB	CB	KB	CB	KB	CB	6	60	cukup Baik
13	MAMUJU	CB	CB	CB	B	KB	B	KB	KB	KB	CB	6	60	cukup Baik
14	MAJENE	CB	CB	CB	KB	CB	CB	CB	CB	CB	CB	9	90	Baik
15	PASANGKAYU	B	CB	CB	B	B	CB	CB	CB	CB	CB	10	100	Baik
16	BONE	CB	CB	CB	CB	B	CB	CB	CB	CB	CB	10	100	Baik
17	PALOPO	CB	KB	CB	KB	CB	CB	KB	CB	CB	CB	7	70	cukup Baik
18	MASAMBA	B	KB	B	B	KB	B	B	CB	CB	CB	8	80	Baik
19	BELOPA	CB	CB	CB	B	B	B	CB	KB	CB	KB	8	80	Baik
20	MALIU	CB	B	CB	CB	KB	B	CB	CB	CB	KB	5	50	cukup Baik
21	SENGKANG	KB	CB	KB	KB	CB	B	CB	KB	CB	KB	9	90	Baik
22	SOPPENG	CB	CB	CB	B	KB	B	CB	CB	CB	CB	8	80	cukup Baik
23	MAKALE	CB	KB	CB	CB	CB	CB	CB	KB	CB	CB	8	80	cukup Baik
24	SIDRAP	KB	CB	B	B	CB	CB	CB	KB	CB	CB	8	80	cukup Baik
25	ENREKANG	CB	CB	B	B	KB	B	CB	CB	CB	CB	10	100	Baik
26	KCU	B	B	B	CB	CB	CB	CB	CB	CB	CB	9	90	Baik
27	GOWA	B	CB	B	KB	B	B	CB	CB	CB	CB	9	90	Baik

Sumber : Data Sekunder, diolah 2011

Berdasarkan Tabel di atas tampak bahwa seluruh cabang Bank Sulsel berada di atas 50 % untuk jumlah baik dan cukup baik untuk semua indikator yang digunakan . hal ini juga memberikan indikasi bahwa dari 27 cabang Bank Sulsel yang diteliti jika dihubungkan dengan indeks GCG memang berada pada kategori cukup baik sampai baik.

D. Hubungan Fungsional *Internal Corporate Governance*, *Eksternal Corporate Governance*, *Manajemen Laba* dan *Kinerja Keuangan*

Berdasarkan hasil analisis *structural equation modelling* yang sudah memenuhi kriteria *goodness of fit*, kemudian dilakukan uji signifikansi hubungan fungsional antar variabel sebagaimana pada lampiran. Untuk memudahkan dalam menganalisis hubungan fungsional antar variabel kemudian nilai koefisien disusun dalam bentuk tabel 5.25 sebagaimana di tampilkan pada Tabel 5.25 di bawah ini :

Tabel 5.25 Hubungan Fungsional Antar Variabel

Variabel Bebas		Variabel terikat	Simbol	Estimate	T value	Prob	T tabel
Internal GCG (X1)	1	Manajemen Laba (Y1)	α_1	-0.197	-3.694	***	1.96
	2	Kinerja Keuangan (Y2)	β_1	0.396	14.501	***	1.96
Eksternal GCG (X2)	3	Manajemen Laba (Y1)	α_2	-0.439	-12.037	***	1.96
	4	Kinerja Keuangan (Y2)	β_2	0.302	24.487	***	1.96
Manajemen Laba (Y1)	5	Kinerja Keuangan (Y2)	β_3	0.293	24.288	***	1.96

Sumber : Lampiran

1. Pengaruh Internal GCG terhadap Manajemen Laba

Koefisien pengaruh variabel internal GCG (X1) terhadap manajemen laba (Y1) sebesar -0,197 dengan nilai t sebesar -3,694 pada taraf signifikansi 0,000. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa variabel internal GCG (X1) berpengaruh negatif terhadap manajemen laba (Y1). Ini berarti bahwa peningkatan kualitas internal GCG (X1), akan diikuti dengan penurunan manajemen laba (Y1) oleh manajer; sebaliknya, penurunan kualitas internal GCG (X1), akan diikuti dengan aktivitas manajemen laba (Y1), dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya kepuasan kerja (Y1) dianggap konstan.

Nilai statistik t hitung pengaruh kualitas internal GCG(X1) terhadap manajemen laba (Y1) sebesar 0,3694 dengan signifikansi 0.00 atau di bawah 0,05. Ini berarti internal GCG (X1) berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba (Y1).

Implikasi kebijakan dari hasil analisa tersebut diatas bahwa untuk menurunkan aktivitas manajemen laba dibutuhkan peningkatan kualitas internal GCG oleh perusahaan.

2. Pengaruh Eksternal GCG terhadap Manajemen Laba

Koefisien pengaruh Eksternal GCG (X2) terhadap Manajemen Laba (Y1) sebesar -0,439 dengan nilai t sebesar -12,037 pada taraf signifikansi 0,000. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa variabel Eksternal GCG (X2) berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba (Y1). Ini berarti bahwa peningkatan Eksternal GCG (X2), akan diikuti

dengan penurunan aktivitas manajemen laba (Y1); sebaliknya, penurunan Eksternal GCG (X2), akan diikuti dengan aktivitas manajemen laba (Y1), dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya manajemen laba (Y1) dianggap konstan.

Nilai statistik *t* hitung pengaruh Eksternal GCG (X2) terhadap manajemen laba (Y1) sebesar -12,037 pada taraf signifikansi 0,000 atau di bawah 0,05. Ini berarti *Eksternal GCG (X2)* berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba (Y1). Dengan demikian, hipotesis 2 yang menyatakan bahwa **terdapat pengaruh *good corporate governance* yang terdiri atas eksternal corporate governance dan internal corporate governance terhadap manajemen laba diterima**

Implikasi kebijakan dari hasil analisa tersebut diatas bahwa untuk menurunkan aktivitas manajemen laba manajer juga dibutuhkan peningkatan *eksternal GCG*.

3. Pengaruh Internal GCG terhadap Kinerja Keuangan

Koefisien pengaruh variabel *Internal GCG (X1)* terhadap Kinerja Keuangan (Y2) sebesar 0,396 dengan nilai *t* sebesar 14,501 pada taraf signifikansi 0,000. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa *Internal GCG (X1)* berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan (Y2). Ini berarti bahwa peningkatan aktivitas *Internal GCG (X1)*, akan diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan (Y2); sebaliknya, penurunan *Internal GCG (X1)*, akan diikuti dengan penurunan kinerja keuangan (Y2), dengan

asumsi faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya kinerja keuangan (Y2) dianggap konstan.

Nilai statistik t hitung pengaruh kualitas internal GCG (X1) terhadap kinerja keuangan (Y2) sebesar 14,501 dengan signifikansi 0,000 atau di bawah 0,05. Ini berarti internal GCG (X1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (Y2).

Implikasi kebijakan dari hasil analisa tersebut diatas bahwa untuk meningkatkan kinerja keuangan dibutuhkan peningkatan internal GCG.

4. Pengaruh Eksternal GCG terhadap Kinerja Keuangan

Koefisien pengaruh Eksternal GCG (X2) terhadap Kinerja Keuangan (Y2) sebesar 0,302 dengan nilai t sebesar 24,487 pada taraf signifikansi 0,00. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa eksternal GCG (X2) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (Y2). Ini berarti bahwa peningkatan eksternal GCG (X2), akan diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan (Y2); sebaliknya, eksternal GCG (X2), akan diikuti dengan penurunan kinerja keuangan (Y2), dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya kinerja keuangan (Y3) dianggap konstan.

Nilai statistik t hitung pengaruh eksternal GCG (X2) terhadap kinerja keuangan (Y2) sebesar 24,487 dengan signifikansi 0,000 atau di bawah 0,05. Ini berarti eksternal GCG (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (Y2). Dengan demikian, hipotesis 3 yang menyatakan *terdapat pengaruh good corporate governance yang terdiri atas*

internal corporate governance dan eksternal corporate governance terhadap kinerja perusahaan, diterima.

Implikasi kebijakan dari hasil analisa tersebut diatas bahwa untuk meningkatkan kinerja keuangan dibutuhkan juga peningkatan eksternal GCG.

5. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Kinerja Keuangan

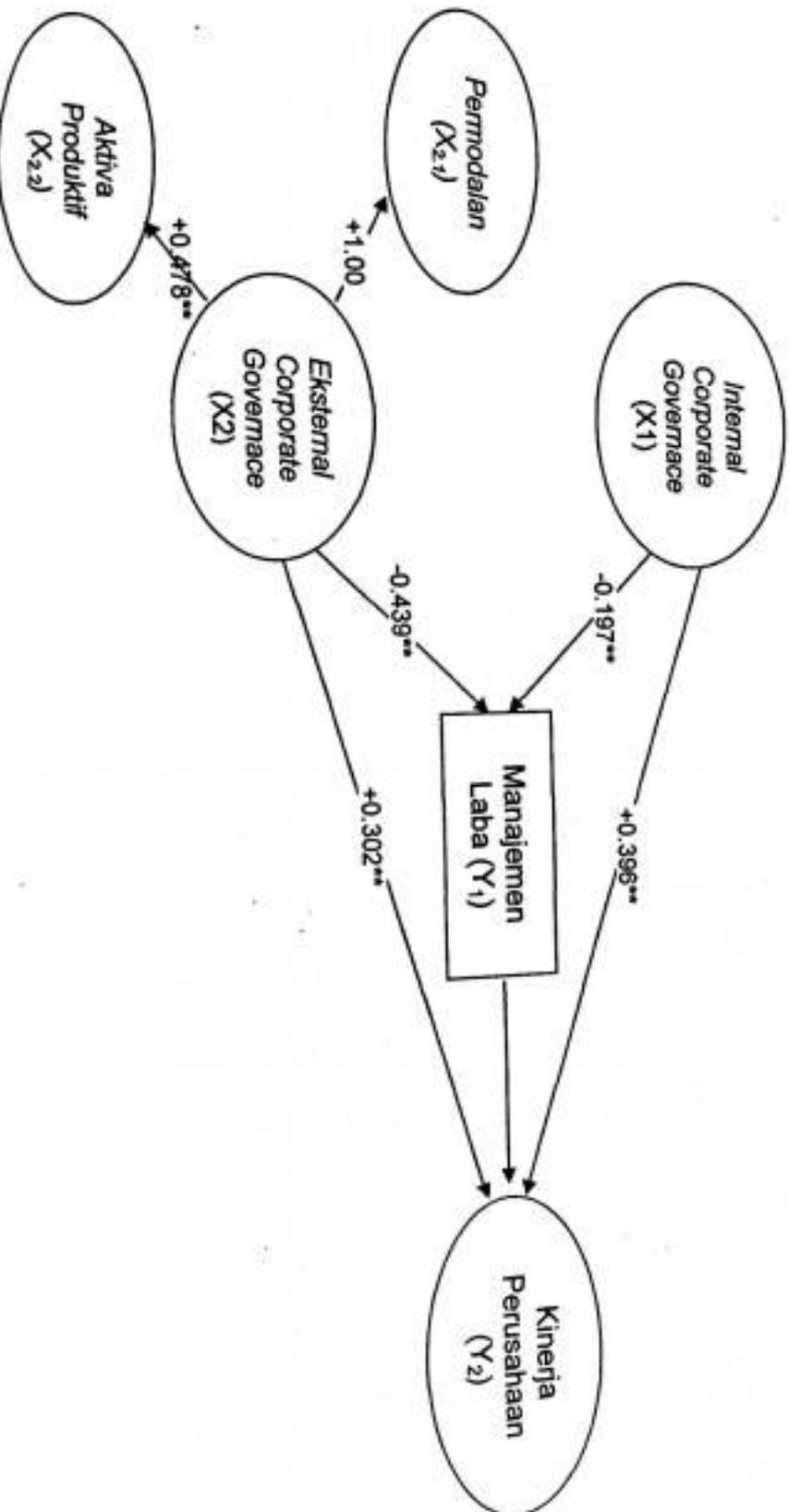
Koefisien pengaruh variabel manajemen laba (Y1) terhadap kinerja keuangan (Y3) sebesar 0,293 dengan nilai t sebesar 24,288 pada taraf signifikansi 0,00. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa variabel manajemen laba (Y2) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (Y3). Ini berarti bahwa peningkatan manajemen laba (Y2), akan diikuti dengan peningkatan nilai kinerja keuangan (Y3); sebaliknya, penurunan kualitas aktivitas manajemen laba (Y2), akan diikuti dengan penurunan nilai kinerja keuangan (Y3), dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya kinerja keuangan (Y3) dianggap konstan.

Nilai statistik t hitung pengaruh manajemen laba (Y2) terhadap kinerja keuangan (Y3) sebesar 24,288 dengan signifikansi 0,00 atau di bawah 0,05. Ini berarti manajemen laba (Y2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (Y3). Dengan demikian, hipotesis 4 yang menyatakan ***terdapat pengaruh manajemen laba terhadap kinerja perusahaan, diterima***

Implikasi kebijakan dari hasil analisa tersebut diatas bahwa untuk nilai kinerja keuangan dapat meningkat melalui manajemen laba.

Hubungan Fungsional *Internal Corporate Governance*, *Eksternal Corporate Governance*, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan lebih jelas ditampilkan pada Gambar 5.1 berikut

Gambar 5.1 : Hasil Estimasi dalam Bentuk Skema



E. Hubungan simultan antara *Internal Corporate Governance* dan *Eksternal Corporate Governance*, Terhadap *Manajemen Laba Kinerja Keuangan*

1. Pengaruh langsung (*Direct Effect*)

Pengaruh langsung (*direct effect*) merupakan pengaruh dari satu variabel bebas ke satu variabel tidak bebas, atau dalam model path digambarkan dengan satu anak panah. Sedangkan jalur tidak langsung melalui satu variabel interverning atau variabel antara. Variabel interverning atau dalam *terminology* disebut variabel control yaitu variabel yang memiliki kemampuan untuk merubah arah, koefisien maupun tingkat signifikan dari suatu pengaruh atau hubungan ketika ada satu atau lebih variabel yang dimasukkan dalam model.

Untuk mengetahui suatu hubungan secara langsung adalah berpengaruh signifikan, dapat dilihat pada nilai *t value* ataupun pada nilai probabilitas alfa sebagaimana ditampilkan Tabel 5.4 di atas. Dari hasil perhitungan statistik tersebut memiliki makna sebagai berikut:

- a. Variabel *internal corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen laba
- b. Variabel *external corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen laba
- c. Variabel *internal corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan
- d. Variabel *external corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

e. Manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

2. Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*)

Berdasarkan hasil skema sebagaimana disajikan dalam Gambar 5.1, diperoleh pengaruh tak langsung (*indirect effect*), masing-masing variabel eksogen, yakni Internal GCG dan Eksternal GCG terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan sebagai berikut :

- a. Pengaruh tak langsung X_1 terhadap Y_2 melalui Y_1 ($\beta_3\alpha_1$) adalah sebesar - 89.719, Ini mengindikasikan bahwa *internal* GCG dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui manajemen laba sebesar 89.719.
- b. Pengaruh tak langsung X_2 terhadap Y_2 melalui Y_1 ($\beta_3\alpha_2$) adalah sebesar -292.354 . Ini mengindikasikan bahwa *eksternal* GCG dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui manajemen laba sebesar 292.354.

3. Total Pengaruh (*Total Effect*)

Total pengaruh masing-masing variabel eksogen yaitu Internal GCG dan Eksternal GCG terhadap manajemen laba dan kinerja keuangan adalah sebagai berikut :

$$\theta_1 = (\beta_1 + \beta_3\alpha_1) = \text{total pengaruh } X_1 \text{ terhadap } Y_2$$

$$= (14.501 + - 0.05772) = 14,44328$$

$$\theta_2 = (\beta_2 + \beta_3\alpha_2) = \text{total pengaruh } X_2 \text{ terhadap } Y_2$$

$$= 0.302 + - 0.128627 = 0.173373$$

BAB VI

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Analisis dan Implikasi *Self Assesment* GCG

Berdasarkan hasil *self assesment* GCG selama empat tahun, secara rata-rata dari 27 cabang Bank Sulsel ada 12 cabang berada pada peringkat ke dua (baik) yaitu Pare-pare, Selayar, Pinrang, Majene, Pasang Kayu, Bone Masamba, Belopa, Malili, Soppeng, Kantor Cabang Utama dan Gowa. Adapun interpretasi pada cabang tersebut adalah:

1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Pemimpin Cabang

- a. Integritas dan kompetensi pemimpin cabang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- b. Mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemimpin cabang telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.
- d. Rapat terselenggara secara efektif dan efisien.
- e. Aspek transparansi pemimpin cabang baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku

2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Kepala Seksi

- a. Integritas dan kompetensi kepala seksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- b. Mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala seksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.
- d. Rapat terselenggara secara efektif dan efisien.
- e. Aspek transparansi kepala seksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

- a. Komposisi dan kompetensi anggota Komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
- b. Pelaksanaan tugas Komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.
- c. Rekomendasi Komite-Komite, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan pemimpin cabang.
- d. Penyelenggaraan rapat Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien.

4. Penangan Benturan Kepentingan

- a. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif.

- b. Benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.
- c. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

- a. Kepatuhan Bank tergolong baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan telah diselesaikan pada masa triwulan penilaian CAMELS Rating.
- b. Pelaksanaan tugas dan independensi berjalan efektif.
- c. Melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional.
- d. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern

- a. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin.
- b. SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.

7. Penerapan Fungsi Audit Ektern

- a. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan namun terdapat kekurangan minor.
- b. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.
- c. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP telah independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

- a. Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
- b. Manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.
- c. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.
- d. Manajemen efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.
- e. Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi bank.

9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (related party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposures)

- a. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
- b. Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun pernah ada pelampauan BMPK, namun telah diselesaikan.
- c. Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.
- d. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pelaporan Internal

- a. Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai.
- b. Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.
- c. Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.

- d. Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

11. Rencana Strategis Bank

- a. Rencana Bisnis Bank (business plan) sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank.
- b. Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) disusun realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.
- c. Realisasi rencana bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (business plan).
- d. *Low Strategic Risk Rating* atau *Moderate to Low Strategic Risk Rating*.

Sedangkan peringkat ketiga (cukup baik) ada 15 cabang yaitu Maros, Pangkep, Jeneponto, Takalar, Barru, Bulukumba, Bantaeng, Sinjai, Polmas, Mamuju, Palopo, Sengkang, Makale, Sidrap, dan Enrekang.

1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Pemimpin Cabang

- a. Integritas dan kompetensi pemimpin cabang cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
- b. Mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemimpin cabang cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif dan terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor.
- d. Rapat pemimpin cabang terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.
- e. Aspek transparansi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Kepala Seksi

- a. Integritas dan kompetensi kepala seksi cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
- b. Mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala seksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif dan terdapat

kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor.

- d. Rapat kepala seksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.
- e. Aspek transparansi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

- a. Komposisi dan kompetensi anggota Komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
- b. Pelaksanaan tugas Komite telah berjalan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor.
- c. Rekomendasi Komite-Komite, cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Pemimpin cabang.
- d. Penyelenggaraan rapat Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.

4. Penangan Benturan Kepentingan

- a. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif.
- b. Benturan kepentingan telah cukup diungkap dalam keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.

- c. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

- a. Kepatuhan Bank cukup baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada masa triwulanan berikutnya.
- b. Pelaksanaan tugas dan independensi berjalan cukup efektif.
- c. Melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan sebagian satuan kerja operasional.
- d. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia cukup lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern

- a. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern cukup sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang apabila tidak segera diatasi dapat menurunkan kualitas pelaksanaan fungsi audit intern.
- b. SKAI menjalankan fungsinya secara cukup independen dan obyektif.

7. Penerapan Fungsi Audit Ektern

- a. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan namun terdapat kekurangan.
- b. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik cukup baik.

- c. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP cukup independen dan cukup memenuhi kriteria yang ditetapkan.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

- a. Manajemen cukup efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
- b. Manajemen cukup aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.
- c. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank cukup komprehensif dan cukup sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.
- d. Manajemen cukup efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.
- e. Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan yang tidak material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank.

9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (related party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposures)

- a. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang cukup up to date, dan cukup lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
- b. Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, karena masih dalam jangka waktu penyelesaian sesuai action plan.
- c. Diversifikasi penyediaan dana cukup merata.
- d. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan cukup independen.

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pelaporan Internal

- a. Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang cukup mudah diakses.
- b. Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara cukup tepat waktu, lengkap, akurat dan kini.
- c. Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan cukup efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara cukup memadai.

- d. Cakupan laporan Pelaksanaan GCG cukup lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara cukup tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank cukup mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta cukup handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

11. Rencana Strategis Bank

- a. Rencana Bisnis Bank (business plan) cukup sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank.
- b. Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) disusun cukup realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.
- c. Realisasi rencana bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (business plan).
- d. *Moderate Strategic Risk Rating.*

B. Analisis dan Implikasi Pengaruh *Internal Corporate Governance* dan *Eksternal Corporate Governance*, Terhadap Manajemen Laba Kinerja Keuangan

1. Pengaruh *Internal Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba

Koefisien pengaruh variabel *internal GCG* (X1) terhadap manajemen laba (Y1) sebesar -0,197 dengan nilai t sebesar -3,694 pada taraf signifikansi 0,000. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa variabel *internal GCG* (X1) berpengaruh negatif terhadap manajemen laba (Y1). Penelitian ini sejalan dengan *Dewatripont dan Tirole (1994)*, *Dechow et al. (1996)* dan *Beasley (1996)*, *Warfield, Terry, Wild, dan Wild (1995)*, *Chtourou et al. (2001)*. yang menyatakan *Internal GCG* berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba.

2. Pengaruh *Eksternal GCG* terhadap Manajemen Laba

Koefisien pengaruh *Eksternal GCG* (X2) terhadap Manajemen Laba (Y1) sebesar -0,439 dengan nilai t sebesar -12,037 pada taraf signifikansi 0,000. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa variabel *Eksternal GCG* (X2) berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba (Y1). Penelitian ini sejalan dengan *Dewatripont dan Tirole (1994)*, *Jensen and Meckling, 1976*, *Dechow et al. (1996)* dan *Beasley (1996)*, *Warfield, Terry, Wild, dan Wild (1995)*, *Chtourou et al. (2001)* yang menyatakan bahwa *Eksternal GCG* berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

3. Pembahasan Pengaruh Internal GCG dan Eksternal GCG terhadap Manajemen Laba

Beberapa penelitian mendukung bahwa manipulasi terhadap earning juga sering dilakukan oleh manajemen. Penyusunan earnings dilakukan oleh manajemen yang lebih mengetahui kondisi di dalam perusahaan, kondisi tersebut diprediksi oleh Dechow (1996) dapat menimbulkan masalah karena manajemen sebagai pihak yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan dievaluasi dan dihargai berdasarkan laporan yang dibuatnya sendiri. Laba yang kurang berkualitas bisa terjadi karena dalam menjalankan bisnis perusahaan, manajemen bukan merupakan pemilik perusahaan. Pemisahan kepemilikan ini akan dapat menimbulkan konflik dalam pengendalian dan pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang menyebabkan para manajer bertindak tidak sesuai dengan keinginan para pemilik. Konflik yang terjadi akibat pemisahan kepemilikan ini disebut dengan konflik keagenan.

Beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah keagenan tersebut adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial (Jansen dan Meckling, 1976). Bernhart dan Rosenstein 1998 menyatakan beberapa mekanisme (mekanisme corporate governance) seperti mekanisme internal, seperti struktur dan dewan komisaris, serta mekanisme eksternal seperti pasar untuk

kontrol perusahaan diharapkan dapat mengatasi masalah keagenan tersebut.

Black et al. (2003) berargumen bahwa pertama, perusahaan yang dikelola dengan lebih baik akan dapat lebih menguntungkan sehingga dapat dividen yang lebih tinggi. Kedua, disebabkan oleh karena investor luar dapat menilai *earnings* atau dividen yang sama dengan lebih tinggi untuk perusahaan yang menerapkan *corporate governance* yang lebih baik.

Healy dan Wahlen (1999) *earning management* terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangannya dalam menyusun laporan keuangan yang dapat membuat *mislead* pada pemangku kepentingan mengenai kondisi mendasar yang ada dalam suatu perusahaan. Beberapa studi menunjukkan kemungkinan terjadinya intervensi pihak manajemen dalam proses pembuatan laporan keuangan yang tidak saja melalui estimasi dan metode akuntansi yang digunakan tetapi juga melalui keputusan operasional. Healy dan Wahlen (1999), Fudenberg dan Tirole (1995), serta Dechow dan Skinner (2000) menunjukkan praktik *earning management* yang dapat dilakukan oleh manajer yakni mempercepat penjualan, mengubah skedul pengiriman barang, memperlambat pengeluaran untuk riset dan pengembangan serta pengeluaran untuk pemeliharaan. Sementara Lo (2007) mengelompokkan *earning management* dalam dua katagori yakni *real earning management* seperti tindakan untuk mempengaruhi arus kas,

dan accrual management melalui perubahan dalam estimasi dan kebijakan akuntansi. Dampak dari kedua tindakan earning management tersebut menimbulkan biaya yang berbeda, dimana tindakan real earning management akan memakan lebih banyak biaya bagi perusahaan (Roychowdhury, 2006).

Internal corporate governance dicerminkan oleh peran dewan direksi (board of directors) yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan good corporate governance. Dalam penelitian ini, Internal corporate governance dibedakan atas dasar fokus pengendalian yakni *Internal corporate governance-Manajer* (ICG-Manajer) dan *Internal corporate governance-Pemilik* (ICG-Pemilik).

ICG-Manajer menekankan pada pengendalian dalam diri manajer yang distimuli secara internal melalui perhatian pemilik terhadap kepentingan manajer yang dicerminkan oleh bentuk kompensasi yakni kepekaan kompensasi kinerja manajer (*pay performance sensitivity*).

4. Pengaruh Internal GCG terhadap Kinerja Keuangan

Koefisien pengaruh variabel *Internal GCG* (X1) terhadap Kinerja Keuangan (Y2) sebesar 0,396 dengan nilai *t* sebesar 14,501 pada taraf signifikansi 0,000. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa *Internal GCG* (X1) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan (Y2). Penelitian ini sejalan dengan John dan Senbet (2000), Houston dan James (1993) dan Saunders, Strock dan Travlos

(SST) (1990), Evans, Noe, dan Thorton (1997), dan Knopf dan Teall (1996), Jensen dan Murphy (1990), Melvill dalam Sunarto (2003), Mehran (2003), Berger et.al., (2004) dan Supriyatno (2006) yang menyatakan bahwa Internal GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan

5. Pengaruh Eksternal GCG terhadap Kinerja Keuangan

Koefisien pengaruh Eksternal GCG (X2) terhadap Kinerja Keuangan (Y2) sebesar 0,302 dengan nilai t sebesar 24,487 pada taraf signifikansi 0,00. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa eksternal GCG (X2) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (Y2). Penelitian ini sejalan dengan John dan Senbet (2000), Houston dan James (1993) dan Saunders, Strock dan Travlos (SST) (1990), Evans, Noe, dan Thorton (1997), dan Knopf dan Teall (1996), Delfgaauw dan Dur (2002), Corneo dan Rob (2001), Holmstrom dan Milgrom, 1991; Itoh, 1991, Deni, Khomsiyah dan Rika, 2004 yang menyatakan bahwa eksternal GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

6. Pembahasan Pengaruh Internal GCG dan Eksternal GCG terhadap Kinerja Keuangan

Melalui penelitian empiris pada industri perbankan, Simpson dan Kohers (2002) menyimpulkan adanya hubungan positif antara corporate social performance (CSP) dan financial performance (FP).

Hubungan positif CSP-FP didasarkan pada dua hipotesis (a) perilaku sosial perusahaan yang tidak bertanggung jawab akan menurunkan reputasi perusahaan dan profitabilitas. Oleh karena itu, manajer yang baik akan melakukan tindakan manajerial dengan penuh tanggung jawab, termasuk tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan/sosial (*good management hypothesis*) dan (b) perusahaan yang mempunyai kinerja keuangan baik dan memiliki sumber daya berlebih (*slack resources*) mempunyai kemampuan untuk meningkatkan *corporate social performance* (CSP) (*slack resources hypothesis*).

Menurut teori keagenan, pemegang saham (*equityholders*) cenderung untuk memberikan kompensasi kepada manajemen dalam bentuk opsi saham karena akan meningkatkan kepekaan kompensasi-kinerja manajemen. Semakin tinggi opsi saham akan semakin meningkatkan motivasi manajemen untuk menerapkan strategi investasi yang (lebih) berisiko. Perusahaan yang memiliki komponen utang (tinggi) dalam struktur permodalannya cenderung untuk memilih strategi investasi yang (lebih) berisiko. Hal ini karena akan menguntungkan pemegang saham terutama adanya kesempatan menggeser risiko dan membebankan biaya pada kreditur (*debtholders*) (Jensen dan Meckling, 1976). John dan Qian (2003) mendukung argumentasi ini dan menemukan bahwa semakin rendah

kepekaan kompensasi-kinerja manajer bank, semakin tinggi rasio utang terhadap total aktiva.

Hasil pengujian pengaruh *external corporate governance* dengan kinerja menunjukkan bahwa kapasitas kepatuhan regulasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Bank BPD Sulsel. Hasil positif dan signifikan pada koefisien ECG Bank BPD Sulsel mencerminkan bahwa kepemilikan disamping mampu memenuhi kepentingan regulator sebagai representasi kepentingan publik, juga mampu mendisiplinkan manajemen dalam upaya maksimisasi kesejahteraan pemilik. Hasil diatas sesuai dengan penegasan La Porta, Lopez-de-Silanes et al., (1996) yang menyatakan bahwa bagi negara yang menggunakan tradisi hukum Perancis (*french civil law*) seperti halnya Indonesia, stuktur kepemilikan cenderung mengarah pada struktur terkonsentrasi sekalipun kepemilikan perusahaan bersifat terbuka/publik sebagai akibat masih lemahnya perlindungan hukum terhadap investor. Disamping itu, hasil penelitian ini menegaskan penelitian McConnell and Servaes (1990) yang menyatakan bahwa identitas kepemilikan mayoritas – keluarga, institusional asing/domestik, negara –mempunyai pengaruh signifikan dalam kinerja.

7. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Kinerja Keuangan

Koefisien pengaruh variabel manajemen laba (Y1) terhadap kinerja keuangan (Y3) sebesar 0,293 dengan nilai t sebesar 24,288 pada taraf signifikansi 0,00. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa variabel manajemen laba (Y2) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (Y3).

Jika dikaji dengan teori, beberapa teknik manajemen laba (earnings management) dapat mempengaruhi laba yang dilaporkan oleh manajemen. Praktik manajemen laba akan mengakibatkan kualitas laba yang dilaporkan menjadi rendah. Earnings dapat dikatakan berkualitas tinggi apabila earnings yang dilaporkan dapat digunakan oleh para pengguna (users) untuk membuat keputusan yang terbaik, dan dapat digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi harga dan return saham (Bernard dan Stober, 1998).

Penelitian yang sejalan adalah Chan et al (2001) menemukan bahwa perusahaan dengan akrual yang tinggi menunjukkan laba perusahaan berkualitas rendah, demikian juga sebaliknya. Sedangkan Sloan (1996) menemukan bukti bahwa kinerja laba yang teratribut pada komponen akrual menggambarkan tingkat persistensi yang rendah dari pada kinerja laba yang teratribut dalam komponen aliran kas. Earnings yang dilaporkan lebih besar dari aliran kas operasi (akrual tinggi), akan mengalami penurunan dalam kinerja earnings pada periode berikutnya. Sementara itu, harga saham yang jatuh merupakan implikasi dari current

accrual untuk earnings periode yang akan datang, serta mempermudah prediksi terhadap pola return untuk perusahaan dengan tingkat akrual yang tinggi. Binter dan Dolan (1996) menemukan bukti bahwa baik dengan menggunakan laba bersih atau ordinary income yang digunakan sebagai sasaran manajemen laba.

C. Temuan Empiris Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini yang diharapkan dapat memberi kontribusi pada perkembangan manajemen keuangan dan perbankan sebagai berikut: *Pertama*, secara rata-rata pelaksanaan GCG pada Bank BPD Sulsel berada pada kategori baik untuk 12 cabang, yaitu: Parepare, Selayar, Pinrang, Majene, Pasangkayu, Bone, Masamba, Belopa, Malili, Soppeng, KCU, Gowa. Dan 15 cabang dalam kategori cukup baik yaitu: Maros, Pangkep, Jeneponto, Takalar, Barru, Bulukumba, Bantaeng, Sinjai, Polmas, Mamuju, Palopo, Sengkang, Makale, Sidrap, Enrekang. *Kedua*: secara menyeluruh faktor GCG yang terdiri atas internal GCG dan eksternal GCG memberikan pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. *Kedua*, secara menyeluruh faktor GCG yang terdiri atas internal GCG dan eksternal GCG memberikan pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. *Ketiga*, secara menyeluruh manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

D. Keterbatasan Penelitian

Pada penilaian *self assesment indeks GCG* yang dilakukan diperhadapkan kepada banyaknya data yang diperlukan namun data tersebut tidak tersedia dan yang ada hanya 11 indikator sehingga untuk peneliti selanjutnya sebaiknya diperluas

Model dibentuk berdasarkan penelitian terdahulu dengan data tersedia masih 5 tahun . Variabel yang diajukan juga masih terbatas sehingga untuk mempertajam kesimpulan maka model yang dibentuk ini masih dapat dikembangkan dengan menambah variabel yang relevan.

BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penilaian Indeks GCG selama 4 tahun, secara rata-rata Pelaksanaan GCG pada Bank BPD Sulsel berada pada kategori baik untuk 12 cabang, yaitu: Parepare, Selayar, Pinrang, Majene, Pasangkayu, Bone, Masamba, Belopa, Malili, Soppeng, KCU, Gowa. Dan 15 cabang dalam kategori cukup baik yaitu: Maros, Pangkep, Jeneponto, Takalar, Barru, Bulukumba, Bantaeng, Sinjai, Polmas, Mamuju, Palopo, Sengkang, Makale, Sidrap, Enrekang. Yang mengindikasikan bahwa Bank BPD Sulsel cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui *homepage* dan media yang cukup mudah diakses. Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara cukup tepat waktu, lengkap, akurat dan kini. Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan cukup efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara cukup memadai, dan cakupan laporan Pelaksanaan GCG cukup lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara cukup tepat waktu kepada *shareholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Terdapat pengaruh negatif *good corporate governance* yang terdiri atas *eksternal corporate governance* dan *internal corporate*

governance terhadap manajemen laba, ini mengindikasikan bahwa saat *eksternal corporate governance* dan *internal corporate governance* terlaksana dengan baik akan memberikan dampak penurunan manajemen laba oleh manajer.

3. Terdapat pengaruh positif *good corporate governance* yang terdiri atas *internal corporate governance* dan *eksternal corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Ini mengindikasikan bahwa saat pelaksanaan *good corporate governance* yang terdiri atas *internal corporate governance* dan *eksternal corporate governance* meningkat akan diikuti peningkatan kinerja keuangan bank.
4. Terdapat pengaruh positif manajemen laba terhadap kinerja perusahaan. Ini mengindikasikan bahwa perilaku manajemen laba dapat menaikkan kinerja keuangan perusahaan, sehingga manajemen laba merupakan manajemen penyalarsan laba.

B. Saran

1. Dari hasil penilaian *self assesment* indeks GCG secara rata-rata predikat yang dihasilkan adalah cukup (tingkatan 3) sehingga dalam hal ini pihak manajemen Bank BPD Sulsel dan Komisaris harus lebih berupaya untuk meningkatkan pengawasan dan kinerjanya agar predikat ke depan dapat meningkat. Meski demikian ada dua cabang yang mengalami peningkatan yang berarti tingkat kepatuhan menurun, kiranya menjadi perhatian bagi direksi bank BPD Sulsel

agar tidak terus menurun dan segera dilakukan pembenahan agar tingkat kepatuhan segera membaik.

2. Hasil pengujian antar variabel adalah signifikan sehingga untuk menghindari pelaksanaan manajemen laba oleh manajemen serta meningkatkan kinerja keuangan Bank BPD Sulsel, pengawasan pelaksanaan GCG perlu lebih intensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, Anup and CR. Knoeber (1996), "Firm Performance and Mechanisms to Control Agency Problems between Managers and Shareholders", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, September, pp. 377-397.
- Andreeva, Olga. 2004. "Aggregate Bankruptcy Probabilities and Their Role in Explaining Bank' Loan Losses". Working Paper. Norges Bank. pp. 1-44.
- Ang, J.S., Cole R.A., and Lin, J.W. (2000), "Agency Cost and Ownership Structure", *Journal of Finance*, pp.81-106.
- Angbazo, L, (1997), "Commercial Bank Net Interest Margin, Default Risk, Interest-Rate Risk, and Off-Balance Sheet Banking," *Journal of Banking and Finance*, 21, 55-87
- Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, 2004. *Komisaris Independen: Penggerak Praktik GCG diPerusahaan*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Ariyoto, K, 2000. *Good Corporate Governance dan Konsep Penegakannya di BUMN dan Lingkungan Usahanya*. Usahawan no 10 tahun XXIX Oktober
- Arun and Turner. 2003. "Foreign Bank Entry on the Performance, Corporate Governance of Banks in Developing Economics Concept and Issue". Working Paper. <http://www.papers.ssrn.com>. pp. 1-39
- Arya, A., Glover, J., & Sunder, S. (2003). Are unmanaged earnings always better for shareholders?, *Accounting Horizons*, p. 111-116 (supplement)

- Bagnoli, M., and S. Watts. 2000. "The Effect of Relative Performance Evaluation on Earning Management: a Game-theoretic approach", *The Journal of Accounting Public Policy* 19 : 377-397
- Barajas, Adolfo, Roberto Steiner, and Natalia Salazar, 1999, "Interest Spreads in Banking in Colombia" IMF Staff Paper Vol. 46., No. 2 (June 1999)
- Beasley, M.S., 1996, An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement fraud, *Accounting Review* 71, p.443-465
- Berle, Adolf dan Gardiner Means, 1932, *The Modern Corporation and Private Property*, MacMillan, New York
- Bernhart, S. W. and Rosenstein S. 1998. "Board Composition, Managerial Ownership, and Firm Performance": An Empirical Analysis. *Financial Review*, 33, p. 1-16
- Bhattacharya, Sudipto & Boot, Arnoud W A & Thakor, Anjan V, 1998. "The Economics of Bank Regulation," *Journal of Money, Credit and Banking*, Blackwell Publishing, vol. 30(4), pages 745-70, November
- Boediono, Gideon, 2005. *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governace dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur*. Simposium Nasional Akuntansi VIII. IAI, 2005.
- Brigham, EF., & Gapenski, LC., Daves PR., 1999, "Intermediate Financial Management", The Dryden Press, New York.
- Brock, P,L and L Rojas-Suarez, (2000), "Understanding The Behavior of Bank Spreads in Latin America, *Journal of Development Economics*, 63, 113-134
- Brownbridge & Kirpatrick, 2002

- Bruns, W.I., dan K. A. Merchant, 1990, The Dangerous Morality of Managing Earnings, *Management Accounting* 72(2): 22-25.
- Caprio, Levine., 2002, Corporate Governance of Banks: Concept and International Observations Global Corporate Governance Forum research Network Meeting, Worldbank, IMF. Working Paper
- Chen, X dan Q.Cheng, 2002. "Abnormal Accrual-Based Anomaly and Managers' Motivations to Record Abnormal Accruals", Working paper. University of Chicago dan University of Winconsin-Madison
- Chinn, Richard, 2000. Corporate Governance Handbook, Gee Publishing Ltd. London.
- Chtourou, SM., Jean Bedard, and Lucie Courteau, 2001, "Corporate Governance and Earnings Management". Working Paper. Universite Laval, Quebec City, Canada. April
- Ciancanelli, Penny., 2000, Corporate Governance in Banking: A Conceptual Framework, Working Paper.
- Claessens, Djankov, Lang., 2000, The separation of ownership and control in East Asian Corporation" *Journal of Financial Economics* 58, 81-112
- Cooper , Donald., Emory , William, 1997. Metode Penelitian Bisnis, Edisi Kelima, Jilid Satu, Erlangga, Jakarta, 1997.
- Cornett M. M, J. Marcuss, Saunders dan Tehranian H. (2006). Earnings Management, Corporate Governance, and True Financial Performance. <http://papers.ssrn.com/>
- Crutchley, C. and R. Hansen (1989), "A Test of the Agency Theory of Managerial Ownership, Corporate Leverage and Corporate Dividends", *Financial Management*, Vol. 18, pp.36-76
- Demirguc-Kunt, A & E Detragiache (January 2000): "Does Deposit Insurance Increase Banking Systems Stability" IMF WP/00/3: 1-29

- Demsetz, H., and K. Lehn., 1985, The Structure of Corporate Ownership: Causes and Consequences, *Journal of Political Economy* 93, no. 6: 1155-77
- Demsetz, H., dan Belen Villalonga, 2001, Ownership structure and firm performance, *Journal of Corporate Finance* 7, 209-233.
- Demski, J. (1998). Performance measure manipulation, *Contemporary Accounting Research*, 15, p.261-285.
- Denis, D., and J. McConnell., 2003, International Corporate Governance, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol. 38, pp. 1-36
- Dewatripont, Mathias, Tirole, Jean., 1994, "The Prudential Regulation of Banks", The MIT Press, Cambridge.
- Djalil, Sofyan A. 2000. Good Corporate Governance, Working Paper, Surabaya Lokakarya GCG
- Eisenhardt, Kathleem. M., 1989. Agency Theory: An Assesment and Review. *Academy of management Review*, 14, hal 57-74
- Fabozzi, Frank J, Franco Modigliani, dan Michael G Ferri. 1994. *Foundation Of Financial Markets and Institution*. Diterjemahkan Oleh Dajkman, Chaerul. 1999. *Pasar Dan Lembaga Keuangan*. Buku Satu. Penerbit SalembaEmpat. Jakarta
- Fan, J., Wong, T., 2001. Corporate ownership structure and the informativeness of accounting earnings in East Asia, *Journal of Accounting and Economics* 33, p. 401-426.
- Firth, Michael, Fung PM, and Rui, Oliver M. (2002), "Simultaneous Relationships among Ownership, Corporate Governance, and Financial Performance, working paper, www.google.com
- Fisher, Marilyn, dan Kenneth Rosenzweigh, 1995. Attitudes of Students an accounting Practitioners Concerning the Ethical Acceptability of

- Earnings Management. *Journal of Business Ethics*, Volume 14, hal. 443-444
- Gabrielsen, Gorm., Jeffrey D. Gramlich dan Thomas Plenborg, 1997. Managerial Ownership, Information Content of Earnings, and Discretionary Accruals in a Non-US Setting. *Journal of Business Finance and Accounting*, Vol.29. No.7 & 8. September/ Oktober, hal. 967 -988.
- Gennotte, Gerard and Pyle, David. 1990. "Capital Control and Bank Risk". Research Program in Finance Working Paper RPF. No. 197. University of California. Berkeley. pp.1-34
- Graham, J.R., Harvey, C.R., Rajgopal, S., 2005. The economic implications of corporate financial reporting, *Journal of Accounting and Economics* 40, p.3-73
- Gujarati, D.N., 2003, *Basic Econometrics*, International Edition, McGraw-Hill, New York.
- Hart, Oliver. 1995., *Corporate Governance: Some Theory and Implications*, *The Economic Journal*, 105(430), pp. 678-689
- Healy, P. and K. Palepu. 1993. "The Effect of Firms' Financial Disclosure Strategies on Stock Prices". *Accounting Horizons*. Vol.7. No.1. March 1993. pp. 1-11.
- Healy, P.M. dan James M. Wahlen. 1999. "A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting". *Accounting Horizons*. Vol. 13. No. 4. pp. 365-383.
- Holderness, C G dan D P Sheehan, (1998), Monitoring the Owner: the Case of Turner Broadcasting, *Journal of Financial Economics*, 30, pp. 325-346
- Husnan, S. 2000 *Corporate Governance di Indonesia : Pengamatan Terhadap Sektor Korporat dan Keuangan*. Lokakarya Pengelolaan Perusahaan 27 Juni 2000. Universitas Sumatera Utara Medan

- Jensen, C M dan W. H. Meckling (1976), *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*, Journal of Financial Economics No. 3
- Jensen, G R ; D P Solberg, and T.S Zorn., 1992, "Simultaneous Determination of Insider Ownership, Debt, and Dividend Policies", *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 27, pp 247-263
- Jensen, M.C, dan K.J. Murphy., 1990, Performance Pay and Top-Management Incentives, *Journal of Political Economy* 98 (2), 225-264.
- Jensen, M.C., & W.H. Meckling, 1976, "Theory of the Firm: Managerial behavior, Agency Cost and Ownership Structure", *Journal of Financial Economics* p. 3-24.
- Jensen, Michael & Clifford Smith, 1984, "Stockholder, Manager and Credit Interests: Applications of Agency Theory," in Altman and Subrahmanyam, eds, *Recent Advances in Corporate Finance*, Homewood: Richard Irwin
- McConnell, J.J. and H. Servaes, 1990. Additional evidence on equity ownership and corporate value. *Journal of Financial Economics*. October: 595-612.
- Megginson, William L., 1997, "Corporate Finance Theory", Addison-Wesley, Inc
- Melvill dalam Sunarto (2003), Mehran (2003), Berger et.al., (2004) dan John dan Senbet (2000), Supriyatno (2006)
- Shaw, John. C, 2003. *Corporate Governance and Risk: A System Approach*, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey,
- Smith, Adam, 1776, *The Wealth of Nations*, The University of Chicago Press, Chicago.

Lampiran halaman 213 dan 214 :

A. Permasalahan/Fraud Tahun 2009

a. Yang telah diselesaikan oleh Intern Bank

1. Penggelapan setoran Pajak milik nasabah yang dilakukan oleh Pegawai Bank Sulselbar Cabang Takalar dengan nilai kerugian Bank sebesar Rp. 182.627.220,- (seratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) (Dipecat)
2. Penggelapan setoran kredit nasabah yang dilakukan oleh Pegawai Bank Sulselbar Cabang Masamba dengan nilai kerugian Bank sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) (Dipecat)

b. Fraud yang dalam proses penyelesaian

1. 2 (dua) kasus masalah kredit fiktif di Bank Sulselbar Cabang Pasangkayu dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 41.500.000.000,- (Empat puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) (Dipecat)

B. Permasalahan/Fraud Tahun 2010

a. Fraud yang telah diselesaikan

1. 3 (tiga) kasus terkait masalah kredit fiktif di Bank Sulselbar Cabang Pasangkayu dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 41.500.000.000,- (empat puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan terdakwa 3 (tiga) orang karyawan Bank. (Kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung).
2. 1 (satu) kasus terkait pemberian kredit yang melanggar prinsip kehati-hatian di Bank Sulselbar Cabang Syariah Sengkang dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan pelaku telah dipecat.
3. 1 (satu) kasus terkait pinjaman karyawan Bank Sulselbar Cabang Pinrang, dimana karyawan tersebut selalu meminjam uang hasil pencairan kredit nasabah (separuh) dan tidak membayar pinjaman tersebut sehingga nasabah dirugikan sebesar Rp. 295.900.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) serta pelakunya dipecat.
4. 1 (satu) kasus terkait penerbitan penerbitan referensi bank dimana uang penerbitan referensi bank tersebut diterima/disetor. Perbuatan ini dilakukan secara berkelompok pegawai Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar Cabang Utama Makassar dengan total kerugian sebesar Rp. 98.325.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). adapun hukuman yang diberikan kepada sekelompok pegawai tersebut adalah diberikan teguran berupa pernyataan tidak puas oleh Direksi.
5. Penggelapan setoran nasabah yang mana dilakukan oleh Satpam Bank Sulsebar Cabang Polmas, dimana satpam tersebut dititipkan uang setoran

oleh nasabah namun tidak disetor ke rekening nasabah dengan total kerugian nasabah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan satpam tersebut telah dipecat.

6. Pembobolan rekening nasabah sebesar Rp. 600.000.000,- yang terjadi di Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar, pegawai dipecat dan 2 (dua) sertifikat rumah milik pegawai disita oleh Bank untuk membayar kerugian nasabah.
7. Penyimpangan dalam pelaksanaan pemberian pengampunan bunga kepada Debitur macet yang dilakukan oleh Pegawai Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar yang mengakibatkan kerugian Bank sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah)

b. Dalam Proses Penyelesaian Internal Bank

1. Pembobolan rekening nasabah, yang diakibatkan adanya 2 (dua) buku tabungan yang beredar dimana nasabah dirugikan sebesar Rp. 59.000.000,- (Lima Puluh sembilan juta rupiah)

c. Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum

1. Pencurian setoran nasabah di Bank Sulselbar Cabang Polmas, dimana setoran nasabah yang dilakukan pada saat tutup kas tidak disimpan secara baik dalam kluis/kasaneh yang mengakibatkan kerugian nasabah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). pelaku telah dipecat oleh bank walaupun kurang cukup bukti sebagaimana dinyatakan oleh Pihak Kepolisian.
2. Pembobolan sejumlah rekening nasabah di Bank Sulselbar Cabang Polmas Kantor Kas Wonomulyo yang dilakukan oleh karyawan Bank Sulselbar Cabang Polmas Kantor Kas Wonomulyo sebesar Rp. 1.158.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah), karyawan telah dipecat dan hingga saat terakhir masih ditahan dipihak kepolisian setempat.

C. Permasalahan Hukum

1. 3 (tiga) kasus Perdata terkait permasalahan Pasangkayu, dimana disamping digugat secara pidana juga digugat secara perdata.
2. 2 (dua) kasus Pidana yaitu Untuk Kasus Bank Sulselbar Cabang Polmas Kantor Kas Wonomulyo dan Kasus Pencurian setoran nasabah di Bank Sulselbar Cabang Polmas.

No	Indikator	Bobot	1	2	3	4	5	6	
			MAROS	PANGKEP	JENEPONTO	TAKALAR	PAREPARE	BARRU	BULUKUMBA
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemimpin cabang	0.100	3	3	2	2	2	2	2
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala seksi	0.200	3	2	3	2	2	2	2
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	0.100	3	3	3	2	3	3	3
4	Penanganan benturan kepentingan	0.100	3	3	2	3	3	3	3
5	Penerapan fungsi kepatuhan bank	0.050	3	2	3	3	3	3	3
6	Penerapan fungsi audit intern	0.050	2	3	3	3	3	3	3
7	Penerapan fungsi audit ekstern	0.075	2	3	3	3	3	3	3
8	Fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern	0.075	3	3	3	3	3	3	3
9	Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur besar (large exposures)	0.150	2	3	3	3	3	3	2
10	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan internal	0.050	3	3	2	3	3	3	3
11	Rencana strategis bank	Skor Indeks	2.73	2.75	2.75	2.60	2.65	2.70	2.55

Self Assessment GCG tahun 2008

No	Indikator	Bobot	1	2	3	4	5	6	7
			MAROS	PANGKEP	JENEPONTO	TAKALAR	PAREPARE	BARRU	BULUKUMBA
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemimpin cabang	0.100	3	3	2	2	2	2	2
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala seksi	0.200	2	2	3	2	2	2	2
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	0.100	3	3	3	2	3	2	3
4	Penanganan benturan kepentingan	0.100	3	3	2	3	3	3	3
5	Penerapan fungsi kepatuhan bank	0.050	3	3	3	3	3	3	3
6	Penerapan fungsi audit intern	0.050	3	2	3	3	2	3	3
7	Penerapan fungsi audit ekstern	0.050	2	3	2	3	3	3	2
8	Fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern	0.075	2	2	3	3	3	3	3
9	Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur besar (large exposures)	0.075	3	3	3	3	3	3	3
10	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan internal	0.150	2	3	3	3	2	3	3
11	Rencana strategis bank	Skor Indeks	2.53	2.68	2.70	2.60	2.50	2.60	2.65

Self Assesment GCG tahun 2007

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BANTAENG	SELAYAR	PINRANG	SINJAI	POLMAS	MAMUJU	MAJENE	PASANGKAYU	BONE	PALOPO	MASAMBA	BELOPA	MALILI	SENGKANG
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3
2	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.50	2.60	2.70	2.63	2.63	2.70	2.45	2.45	2.40	2.53	2.45	2.60	2.55	2.53

Self Assesment GCG tahun 2008

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BANTAENG	SELAYAR	PINRANG	SINJAI	POLMAS	MAMUJU	MAJENE	PASANGKAYU	BONE	PALOPO	MASAMBA	BELOPA	MALILI	SENGKANG
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.65	2.53	2.55	2.55	2.70	2.63	2.60	2.53	2.55	2.60	2.60	2.60	2.50	2.60

Self Assesment GCG tahun 2007

22	23	24	25	26	27
SOPPENG	MAKALE	SIDRAP	ENREKANG	KCU	GOWA
2	2	2	2	1	2
2	2	3	2	2	2
2	3	3	2	2	2
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	2	2
3	3	3	3	2	2
3	2	3	3	2	3
3	3	2	3	2	3
2.45	2.63	2.83	2.60	2.25	2.50

Self Assesment GCG tahun 2008

22	23	24	25	26	27
SOPPENG	MAKALE	SIDRAP	ENREKANG	KCU	GOWA
2	2	2	2	1	2
2	2	3	2	2	2
2	3	3	2	2	2
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	2	2
3	3	3	3	2	2
3	3	3	3	2	2
3	3	3	2	2	2
3	3	2	3	2	2
3	3	3	3	3	3
2.60	2.70	2.75	2.53	2.10	2.35

Self Assessment GCG tahun 2009

No	Indikator	Bobot	7						
			1	2	3	4	5	6	7
			MAROS	PANGKEP	JENEPONTO	TAKALAR	PAREPARE	BARRU	BULUKUMBA
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemimpin cabang	0.100	3	3	2	2	2	2	2
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala seksi	0.200	2	2	3	2	2	2	2
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	0.100	3	3	3	2	3	3	3
4	Penanganan benturan kepentingan	0.050	3	3	3	2	3	3	2
5	Penerapan fungsi kepatuhan bank	0.050	3	2	2	3	3	2	2
6	Penerapan fungsi audit intern	0.050	2	2	2	2	3	3	3
7	Penerapan fungsi audit ekstern	0.075	2	2	3	3	3	3	3
8	Fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern	0.075	2	2	3	3	3	3	3
9	Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur besar (large exposures)	0.150	2	3	2	3	2	3	3
10	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan internal	0.050	2	3	2	2	3	3	3
11	Rencana strategis bank	Skor Indeks	2.40	2.55	2.50	2.55	2.40	2.55	2.50

Self Assessment GCG tahun 2010

No	Indikator	Bobot	7						
			1	2	3	4	5	6	7
			MAROS	PANGKEP	JENEPONTO	TAKALAR	PAREPARE	BARRU	BULUKUMBA
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemimpin cabang	0.100	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala seksi	0.200	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	0.100	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
4	Penanganan benturan kepentingan	0.100	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
5	Penerapan fungsi kepatuhan bank	0.050	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
6	Penerapan fungsi audit intern	0.050	0.15	0.10	0.10	0.10	0.15	0.15	0.10
7	Penerapan fungsi audit ekstern	0.075	0.15	0.15	0.23	0.23	0.15	0.23	0.23
8	Fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern	0.075	0.15	0.23	0.23	0.23	0.15	0.15	0.23
9	Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur besar (large exposures)	0.150	0.30	0.45	0.30	0.45	0.30	0.30	0.30
10	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan internal	0.050	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
11	Rencana strategis bank	Skor Indeks	2.400	2.525	2.350	2.500	2.300	2.375	2.350

Self-Assessment GCG tahun 2009

22	23	24	25	26	27
SOPPENG	MAKALE	SIDRAP	ENREKANG	KCU	GOWA
2	2	2	2	1	2
2	2	3	2	2	2
2	2	3	2	2	3
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
2	3	2	2	2	2
2	3	3	3	2	2
3	3	3	3	2	2
3	3	3	2	1	2
3					
3	3	2	3	2	2
3	3	3	3	3	3
2.50	2.60	2.70	2.48	2.03	2.30

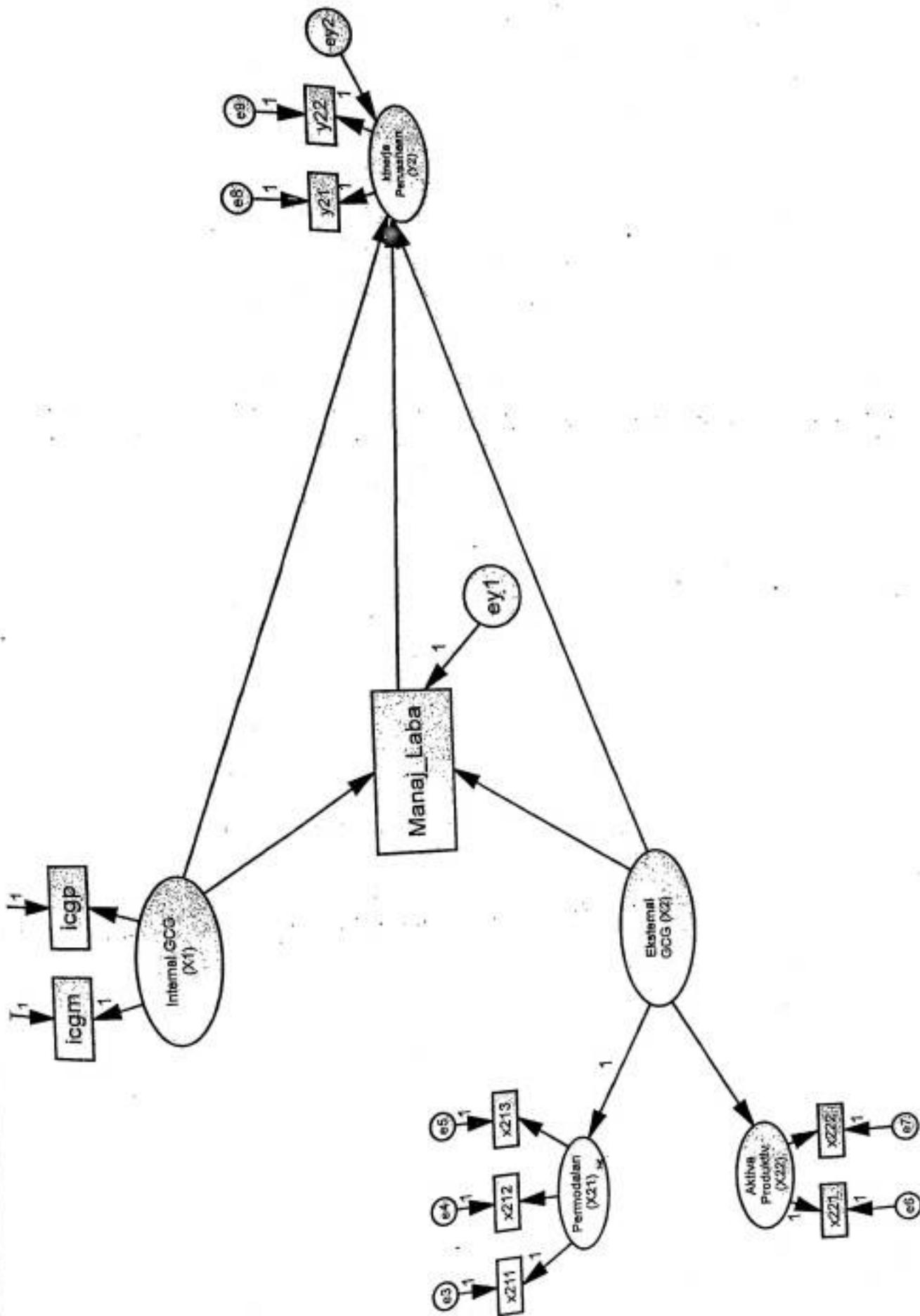
Self Assessment GCG tahun 2010

22	23	24	25	26	27
SOPPENG	MAKALE	SIDRAP	ENREKANG	KCU	GOWA
0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.20
0.40	0.40	0.60	0.40	0.40	0.40
0.20	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20
0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.10	0.15	0.10	0.15	0.10	0.10
0.15	0.15	0.15	0.23	0.15	0.15
0.23	0.23	0.23	0.08	0.08	0.15
0.45	0.45	0.30	0.45	0.15	0.30
0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
2.425	2.475	2.575	2.400	1.875	2.200

Nama Cabang	Indikator									
	I-gcg m	I-gcg p	CAR	ATIM	PR	LDR	QR	ML	ROE	ROA
1	1.19	1.03	14.96	6.46	15.05	0.62	0.64	(3.7267)	0.272	0.272
2	0.81	0.97	13.74	5.57	13.39	0.55	0.57	(1.6738)	0.239	0.239
3	0.31	0.62	13.87	9.22	15.13	0.54	0.64	0.1327	0.237	0.237
4	0.60	1.01	11.92	7.19	10.61	0.54	0.45	(2.7276)	0.234	0.234
5	8.17	1.00	15.31	5.72	9.44	0.53	0.40	0.1010	0.232	0.232
6	0.40	0.46	14.50	10.10	12.17	0.52	0.52	(4.0220)	0.229	0.229
7	0.77	0.19	15.43	12.29	15.69	0.52	0.67	0.1077	0.226	0.226
8	2.32	0.77	13.31	13.75	20.22	0.51	0.72	(0.3998)	0.224	0.224
9	1.24	0.88	14.20	15.29	18.06	0.51	0.64	(0.2085)	0.221	0.221
10	1.95	0.46	13.39	13.84	16.12	0.50	0.58	0.0556	0.219	0.219
11	7.48	0.69	11.78	15.79	14.39	0.50	0.51	(0.1261)	0.217	0.217
12	1.06	0.51	14.13	8.10	13.37	0.49	0.65	0.6987	0.214	0.214
13	1.19	0.93	13.79	15.30	12.42	0.52	0.60	(4.2952)	0.245	0.245
14	0.81	0.99	9.93	14.65	11.54	0.53	0.56	(0.8523)	0.248	0.248
15	0.31	0.75	12.76	16.39	10.72	0.54	0.65	(0.1512)	0.251	0.251
16	0.60	0.87	13.48	10.48	9.96	0.54	0.73	(0.1858)	0.254	0.254
17	8.17	0.64	13.96	13.10	9.25	0.55	0.68	0.0800	0.257	0.257
18	0.40	0.91	13.47	15.51	8.59	0.56	0.63	(1.3962)	0.261	0.261
19	0.77	0.99	10.90	14.67	11.11	0.56	0.81	(0.6059)	0.264	0.264
20	2.32	1.30	11.65	13.67	14.36	0.57	0.71	(1.0174)	0.267	0.267
21	1.24	0.53	8.38	13.65	13.08	0.58	0.65	(0.1207)	0.270	0.270
22	1.95	0.58	14.13	12.65	11.92	0.58	0.59	1.4506	0.274	0.274
23	7.48	0.52	9.12	14.20	10.87	0.59	0.71	0.1085	0.277	0.277
24	1.06	0.12	7.37	14.84	14.05	0.60	0.74	(0.0462)	0.281	0.281
25	0.89	0.51	9.85	13.23	13.06	0.68	0.68	(0.0233)	0.320	0.320
26	0.81	0.45	16.22	16.31	16.88	0.78	0.81	(0.1751)	0.365	0.365
27	0.31	0.24	14.57	14.46	15.02	0.69	0.72	(0.0077)	0.362	0.362
28	7.75	1.04	16.40	7.08	16.50	0.68	0.70	0.5510	0.298	0.298
29	7.75	0.98	15.07	6.10	14.68	0.60	0.62	0.2120	0.262	0.262
30	2.01	0.61	13.73	10.11	14.98	0.59	0.64	(0.0130)	0.259	0.259
31	3.87	0.99	13.07	7.88	11.63	0.59	0.49	0.1995	0.257	0.257
32	1.62	0.91	16.78	6.27	10.35	0.58	0.44	(0.0103)	0.254	0.254
33	4.22	0.34	15.89	11.07	13.34	0.57	0.57	0.2065	0.251	0.251
34	6.84	0.11	16.91	13.47	17.20	0.57	0.73	(0.1624)	0.248	0.248
35	1.66	0.62	14.59	15.07	22.17	0.56	0.79	0.7472	0.245	0.245
36	7.75	0.92	15.57	16.76	19.79	0.56	0.71	(0.4300)	0.243	0.243
37	7.75	0.30	14.68	15.17	17.67	0.55	0.63	0.0756	0.240	0.240
38	2.01	0.52	12.91	17.31	15.78	0.54	0.56	0.1890	0.237	0.237
39	3.87	0.54	15.49	8.88	14.66	0.54	0.71	(0.3106)	0.235	0.235
40	1.62	0.89	15.12	16.77	13.61	0.57	0.66	0.0379	0.269	0.269
41	4.22	0.89	10.89	16.06	12.65	0.58	0.61	1.5890	0.272	0.272
42	6.84	0.67	13.99	17.96	11.75	0.59	0.72	0.1016	0.275	0.275
43	3.87	0.79	14.78	11.49	10.91	0.59	0.80	0.1369	0.279	0.279
44	0.57	0.62	15.30	14.36	10.14	0.60	0.74	(0.0869)	0.282	0.282
45	2.76	0.81	14.77	17.00	9.42	0.61	0.69	0.5881	0.286	0.286
46	0.54	0.87	11.95	16.08	12.17	0.62	0.89	0.1490	0.289	0.289
47	1.34	1.32	12.77	14.98	15.74	0.63	0.78	0.0725	0.293	0.293
48	1.65	0.71	9.19	14.97	14.34	0.63	0.71	0.1470	0.296	0.296
49	1.10	0.57	15.49	13.87	13.07	0.64	0.65	0.0226	0.300	0.300
50	1.43	0.46	10.00	15.57	11.91	0.65	0.78	0.0838	0.304	0.304
51	10.64	1.13	8.08	16.26	15.40	0.66	0.81	0.0411	0.308	0.308
52	1.35	0.50	10.80	14.50	14.31	0.75	0.75	(0.0337)	0.351	0.351
53	0.81	0.38	17.78	17.88	18.50	0.85	0.89	0.3706	0.400	0.400
54	1.00	0.16	15.97	15.85	16.47	0.76	0.79	0.0330	0.396	0.396
55	2.68	0.86	16.03	6.92	16.12	0.67	0.69	0.8894	0.292	0.292
56	0.66	1.16	14.73	5.97	14.35	0.59	0.61	(0.3226)	0.256	0.256
57	1.55	0.40	13.60	9.88	14.83	0.58	0.63	(0.1125)	0.254	0.254
58	1.57	0.51	12.78	7.71	11.37	0.57	0.48	(0.0661)	0.251	0.251

59	0.87	0.90	16.40	6.13	10.12	0.57	0.43	(0.0897)	0.248	0.248
60	0.78	0.26	15.54	10.83	13.04	0.56	0.55	(0.0495)	0.245	0.245
61	9.89	0.11	16.53	13.17	16.81	0.56	0.71	0.0778	0.243	0.243
62	1.28	0.54	14.26	14.74	21.67	0.55	0.77	0.0509	0.240	0.240
63	0.62	1.04	15.22	16.39	19.35	0.54	0.69	(0.7731)	0.237	0.237
64	1.20	0.36	14.35	14.83	17.27	0.54	0.62	0.0026	0.235	0.235
65	1.58	0.55	12.62	16.92	15.42	0.53	0.55	0.0801	0.232	0.232
66	1.40	0.58	15.14	8.68	14.33	0.53	0.69	(1.3717)	0.230	0.230
67	4.76	0.82	14.78	16.39	13.31	0.56	0.64	1.5024	0.262	0.262
68	8.03	0.86	10.64	15.70	12.36	0.57	0.60	0.0685	0.266	0.266
69	4.51	0.87	13.67	17.56	11.48	0.57	0.70	(0.1263)	0.269	0.269
70	11.52	0.09	14.45	11.23	10.67	0.58	0.78	0.2074	0.272	0.272
71	2.67	0.63	14.96	14.03	9.91	0.59	0.73	(0.1241)	0.276	0.276
72	2.68	0.76	14.44	16.62	9.20	0.60	0.67	0.2330	0.279	0.279
73	0.66	0.86	11.68	15.72	11.90	0.60	0.87	0.4800	0.283	0.283
74	1.55	1.33	12.49	14.65	15.38	0.61	0.76	0.7285	0.286	0.286
75	1.57	1.42	8.98	14.63	14.02	0.62	0.69	(1.2705)	0.290	0.290
76	0.87	0.56	15.14	13.56	12.78	0.63	0.63	(0.0222)	0.293	0.293
77	0.78	0.43	9.77	15.22	11.64	0.63	0.76	0.0485	0.297	0.297
78	9.89	1.11	7.90	15.90	15.05	0.64	0.79	(0.1867)	0.301	0.301
79	1.28	0.60	10.55	14.17	13.99	0.73	0.73	(0.0835)	0.343	0.343
80	0.62	0.56	17.38	17.48	18.09	0.83	0.87	(0.5503)	0.391	0.391
81	1.20	0.41	15.61	15.49	16.10	0.74	0.77	0.0513	0.388	0.388
82	1.61	0.62	15.87	6.86	15.96	0.66	0.68	0.7299	0.289	0.289
83	8.38	1.32	14.58	5.91	14.21	0.58	0.60	(0.2160)	0.254	0.254
84	1.00	0.32	13.46	9.78	14.68	0.57	0.62	(0.0853)	0.251	0.251
85	1.21	0.13	12.65	7.63	11.25	0.57	0.48	(0.0628)	0.248	0.248
86	1.84	0.90	16.24	6.07	10.02	0.56	0.43	(0.0662)	0.246	0.246
87	0.59	0.28	15.38	10.72	12.91	0.56	0.55	(0.0187)	0.243	0.243
88	0.87	0.12	16.36	13.04	16.64	0.55	0.71	0.0542	0.240	0.240
89	0.78	0.47	14.12	14.59	21.45	0.54	0.77	0.0494	0.238	0.238
90	9.89	1.22	15.07	16.23	19.15	0.54	0.68	(0.6538)	0.235	0.235
91	0.51	0.34	14.21	14.69	17.10	0.53	0.61	0.0025	0.232	0.232
92	1.28	0.56	12.49	16.76	15.27	0.53	0.54	0.0612	0.230	0.230
93	1.55	0.61	14.99	8.59	14.19	0.52	0.69	(1.3142)	0.227	0.227
94	3.32	0.77	14.63	16.23	13.18	0.55	0.64	1.1338	0.260	0.260
95	7.50	0.88	10.54	15.55	12.24	0.56	0.59	0.0530	0.263	0.263
96	1.21	0.85	13.54	17.38	11.37	0.57	0.69	(0.1213)	0.266	0.266
97	1.84	0.96	14.30	11.12	10.56	0.58	0.77	0.1829	0.270	0.270
98	0.59	0.64	14.81	13.89	9.81	0.58	0.72	(0.1032)	0.273	0.273
99	0.36	0.74	14.29	16.45	9.11	0.59	0.67	0.1802	0.276	0.276
100	6.93	0.87	11.56	15.56	11.78	0.60	0.86	(0.1217)	0.280	0.280
101	0.87	1.21	12.36	14.50	15.23	0.60	0.75	0.6068	0.283	0.283
102	0.78	3.62	8.89	14.49	13.88	0.61	0.69	(1.1691)	0.287	0.287
103	9.89	0.56	14.99	13.42	12.65	0.62	0.63	0.0315	0.290	0.290
104	0.87	0.43	9.67	15.07	11.53	0.63	0.75	0.0576	0.294	0.294
105	0.87	1.07	7.82	15.74	14.90	0.64	0.78	0.3226	0.298	0.298
106	9.89	0.55	10.45	14.03	13.85	0.72	0.73	0.0113	0.340	0.340
107	1.23	0.55	17.21	17.30	17.91	0.83	0.86	0.0494	0.387	0.387
108	1.13	0.53	15.46	15.34	15.94	0.74	0.77	(0.0061)	0.384	0.384
109	1.38	0.58	18.24	7.88	18.35	0.76	0.78	0.0823	0.332	0.332
110	11.20	1.20	16.76	6.79	16.33	0.67	0.69	0.5635	0.292	0.292
111	0.87	0.41	13.33	11.24	14.54	0.66	0.62	0.1403	0.289	0.289
112	0.78	0.14	14.54	8.77	12.94	0.65	0.55	1.2060	0.285	0.285
113	9.89	0.66	18.67	6.98	11.51	0.64	0.49	0.0469	0.282	0.282
114	0.49	0.33	17.68	12.32	14.84	0.63	0.63	(0.0171)	0.279	0.279
115	0.25	0.20	18.81	14.99	19.13	0.63	0.88	(0.2849)	0.273	0.273
116	0.71	0.42	16.23	16.77	24.66	0.62	0.79	1.4625	0.270	0.270
117	2.62	0.10	17.32	18.65	22.02	0.61	0.70	(0.0294)	0.267	0.267
118	0.43	0.30	16.33	16.88	19.66	0.61	0.70	(0.0294)	0.267	0.267

119	0.89	0.47	14.36	19.26	17.55					
120	1.87	0.65	17.23	9.88	16.30	0.60	0.63	0.0388	0.264	0.264
121	2.00	0.67	16.82	18.66	15.15	0.60	0.79	0.1846	0.261	0.261
122	3.11	0.76	12.11	17.87	14.07	0.64	0.73	0.0881	0.299	0.299
123	5.76	0.85	15.56	19.98	13.07	0.65	0.68	(0.2102)	0.302	0.302
124	7.74	0.88	16.44	12.78	12.14	0.65	0.80	0.0912	0.306	0.306
125	1.16	0.54	17.02	15.97	11.28	0.66	0.89	0.0096	0.310	0.310
126	1.29	0.56	16.43	18.91	10.47	0.67	0.83	0.2521	0.314	0.314
127	0.87	0.82	13.29	17.89	13.54	0.68	0.77	0.5329	0.318	0.318
128	0.78	1.21	14.21	16.67	17.51	0.69	0.99	(0.1748)	0.322	0.322
129	9.89	0.37	10.22	16.65	15.96	0.70	0.87	0.0107	0.326	0.326
130	1.23	0.89	17.23	15.43	14.54	0.70	0.79	0.2635	0.330	0.330
131	1.13	0.29	11.12	17.32	13.25	0.71	0.72	0.0254	0.334	0.334
132	0.85	0.43	8.99	18.09	17.13	0.72	0.87	0.0232	0.338	0.338
133	2.41	0.70	12.01	16.13	15.92	0.73	0.90	(0.0415)	0.342	0.342
134	0.62	0.55	19.78	19.89	20.58	0.83	0.83	0.5156	0.390	0.390
135	2.41	0.66	17.77	17.63	18.32	0.95	0.99	(0.0568)	0.445	0.445



Notes for Group (Group number 1)

The model is recursive.
Sample size = 135

Analysis Summary

Date and Time

Date: 13 Juni 2011
Time: 17:09:33

Title

hasil: 13 Juni 2011 17:09

Variable Summary (Group number 1)

Your model contains the following variables (Group number 1)

Observed, endogenous variables

x211
x212
x213
x221
x222
icgm
icgp
y21
y22
Manaj_Laba

Unobserved, endogenous variables

Permodalan_(X21)
Aktiva_Produktif_(X22)
kinerja_Perusahaan_(Y2)

Unobserved, exogenous variables

Eksternal_GCG (X2)
e3
e4
e5
e6
e7
Internal GCG_(X1)
e1
e2
e8
e9
ey2
ey1

Variable counts (Group number 1)

Number of variables in your model:	26
Number of observed variables:	10
Number of unobserved variables:	16
Number of exogenous variables:	13
Number of endogenous variables:	13

Estimates (Group number 1 - Default model)

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)

Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

		Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Manaj_Laba	<-- Internal GCG_(X1)	-,197	,053	-3,694	***	
Manaj_Laba	<-- Eksternal_GCG (X2)	-,439	,036	-12,037	***	
Permodalan_(X21)	<-- Eksternal_GCG (X2)	1,000				
Aktiva_Produktiv_(X22)	<-- Eksternal_GCG (X2)	,171	,082	2,077	,038	
kinerja_Perusahaan_(Y2)	<-- Eksternal_GCG (X2)	,302	,012	24,487	***	
kinerja_Perusahaan_(Y2)	<-- Internal GCG_(X1)	,396	,027	14,501	***	
kinerja_Perusahaan_(Y2)	<-- Manaj_Laba	,293	,012	24,288	***	
x211	<-- Permodalan_(X21)	1,000				
x212	<-- Permodalan_(X21)	2,958	1,560	1,896	,058	
x213	<-- Permodalan_(X21)	,207	,105	1,965	,049	
x221	<-- Aktiva_Produktiv_(X22)	1,000				
x222	<-- Aktiva_Produktiv_(X22)	,909	,100	9,101	***	
icgm	<-- Internal GCG_(X1)	1,000				
icgp	<-- Internal GCG_(X1)	,655	,125	5,266	***	
y21	<-- kinerja_Perusahaan_(Y2)	1,000				
y22	<-- kinerja_Perusahaan_(Y2)	,142	,046	3,049	,002	

Variances: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Eksternal_GCG (X2)	,215	,209	1,031	,302	
Internal GCG_(X1)	,047	,033	1,404	,160	
ey1	,621	,076	8,130	***	
ey2	,000	,000	-,638	,523	
e3	6,642	,812	8,184	***	
e4	11,790	1,442	8,178	***	
e5	9,533	1,165	8,185	***	
e6	,000	,000	2,506	,012	
e7	,008	,001	8,117	***	
e8	-,013	,033	-,398	,691	
e1	9,420	4,270	2,206	,027	
e2	,005	,001	8,183	***	
e8	,000	,000	,795	,427	
e9					

Parameter summary (Group number 1)

	Weights	Covariances	Variances	Means	Intercepts	Total
Fixed	16	0	0	0	0	16
Labeled	0	0	0	0	0	0
Unlabeled	11	0	13	0	0	24
Total	27	0	13	0	0	40